

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN
INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN BONE**



**ASNINA
A 111 02 005**

7-12-07
Fak. Ekonomi
1 ekis.
H
715

**JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**



HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN BONE**



Oleh :

**ASNINA
A 111 02 005**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Makassar

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Sanusi Fattah, SE, MSi
NIP. 132 088 816

Pembimbing II



Drs. Anas Iswanto Anwar, MA
NIP. 131/002 631

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir / Skripsi ini dengan Judul "**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BONE**" yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat dukungan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga, terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Abd.Salam** serta Ibunda **Hj.Rosdiana** yang telah banyak berkorban demi untuk mendidik dan mengasuh penulis dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran juga doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis yang takkan pernah bisa dibalas dengan apapun juga. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, rezeki yang halal serta berkah dan rahmat-Nya untuk mereka, amin.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.H.A.Karim Saleh** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini serta selama mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak **Dr. Sanusi Fattah,SE.M.Si** selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan – masukan dan bimbingan yang sangat membantu penyelesaian penelitian ini kepada penulis.
3. Bapak **Drs.Anas Iswanto Anwar,MA** yang telah banyak sekali membantu baik materi maupun spiritual, memberikan bimbingan dan selalu senantiasa memberikan motivasi, dan semangat penulis pada saat menyelesaikan penelitian ini. Buat Pak Anas thank's banget pa. Semua kebaikan bapak tidak akan pernah terlupakan.
4. Ibu **Retno Fitrianti,SE.M.Si**, bapak **Drs.Hamrullah,M.Si**, dan bapak **Drs.Baktiar Mustari,M.Si** selaku penguji dengan berbagai macam kritik dan sarannya pada saat ujian meja.
5. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, MA** sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan para pembantu dekan. Jadilah pemimpin yang bijak dengan mengayomi semua civitas ekonomi. Dan seluruh karyawan Fakultas Ekonomi pak Jamal, ibu Sri, pak Ichal, pak Adhi, pak Malik, pak Iwan, ibu Arni, kak Santi, serta tak terlupa kak **Susie** dan kak **Ruli** yang telah banyak membantu dalam penelusuran buku – buku dan karya tulis di Perpustakaan Fakultas Ekonomi.

6. Ibu **Dr. Hj. Rahmatia, MA** sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan bapak **Hamrullah, SE, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan berbagai kemudahan – kemudahan dan kebijakan – kebijakan. Jadikan Jurusan Ilmu Ekonomi sebagai jurusan paling favorit di Unhas.
7. Bapak **Amri** dan bapak **Parman** sebagai pegawai Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu serta menjadi sumber informasi yang paling aktual mengenai jadwal ujian di Jurusan Ekonomi. **Pa Amri**, aduh pa makasih banyak sudah banyak membantu mulai dari pengurusan berkas sampai ujian meja..biarpun lagi stress, pusing, tapi kalau sudah ada bapak yang menghibur semua beban pikiran jadi terlupakan walaupun hanya sesaat. **Pa Parman** juga makasih ya pa...mungkin kalau tidak ada bapak juga yang membantu, berkasku tidak akan bisa selesai dengan cepat.
8. Trimakasih yang sebesar – besarnya buat kakak – kakakku semua sama **k'Jus, k'anthi, k'Osse, k'Udin** yang sudah banyak membantu dalam hal materi dan dukungan serta motivasinya. Dan tidak terlupakan juga sama semua keponakanku yang manis – manis dan lucu **Rara, Imam, Tiza, Yaza, Aqil** dan **Faiz** kalian semua membuatku banyak terhibur..dengan semua masalah – masalahku. Sama **Wawan** yang juga selalu ingin membantuku dalam menyelesaikan skipripsiku..
9. Buat **k'Mady** yang selalu baik, tulus, tidak pernah benci sama saya walaupun saya selalu bersikap kurang baik padanya. Trimakasih yang tak terhingga dengan segala perhatian, dukungan dan semangatnya..**k'Mady** kalau bukan kita yang mau membantu saya dalam menyelesaikan skripsiku mungkin sampai sekarang saya tidak akan bisa selesai..makasih ya k..!.

10. Buat **Maman** thank's juga dengan kesabarannya, kesetiannya yang selalu senantiasa temani saya menyelesaikan penelitianku..trimakasih yang tak terhingga banget atas semua dukungan, bantuannya..semoga segala kebaikan yang diberikan kepadaku dilipat gandakan pahalanya..jadilah selalu orang yang terbaik buatku..!amien.
11. Sahabat – sahabatku **Heni maniiz, Eno dengan suami dan anaknya Juan** yang lucu sekali, **ma Ern** yang baik hati..Firlita yang jauh dikampungnya..thank's semuanya. Kalian adalah sahabat2koe yang paling baik..tidak lupa juga buat **Mila** dan **k'Anto** semoga bahagia selalu teman..
12. Semua keluarga di **Ilmu Ekonomi 02 "Spes Partrie"**...Perjuangan harus terus bung ayo semangat!!!!. Untuk teman seperjuangan di ujian Ime, Uly, Astrid yang tabah dan tegar, k'Hana yang baik, Bibie, Rendra, Jufry sukses buat kalian ya. Kita uda lewatin dan berjuang sama – sama dan itu takkan terlupakan !!! berkesan banget ya karna kita semua pada nangis. Hee...hee...dan tidak lupa temen – temen yang lain **Aksar, Valent, Binyo, Ijal**, dan masih banyak temen – temen yang lain yang saya ngga sebutin namanya ayo buruan apalagi yang kalian tunggu. Belum tentu hari esok kita masih hidup. Jangan terlalu santai cepat ya.....semangat!!!
13. Teman – teman yang uda lebih dulu jadi **SE, Ikhsan SE, Githo SE, Ratu SE, Yohanis SE, Marwah SE, Uswah SE, Risnal SE dan Ani SE** (undangannya ditunggu ya), **Alimin SE, Baba SE, Yayank SE, None SE, Dila SE, Mia SE, Hj. Riri SE, Bunga SE, Shinta SE, Kiki SE, Cindy SE, Salma SE**, dan semua sarjana – sarjana yang uda pada sukses, semoga sukses selalu.

14. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan tugas akhir / skripsi ini, thanks a lot.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan ini jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik **الله**. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga tugas akhir / skripsi ini dapat bermanfaat kepada kita semua, amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Desember 2007

ASNINA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	8
2.2. Pengertian Anggaran Pembangunan Daerah	11
2.3. Pengertian Pengeluaran Pemerintah	12
2.4. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	14
2.5. Jenis Pengeluaran Pemerintah	15
2.6. Fungsi Utama Pengeluaran Pemerintah	18
2.7. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	19
2.8. Investasi	21
2.9. Teori – Teori Investasi	22
2.10. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	23
2.11. Teori Pertumbuhan Ekonomi	27
2.12. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	29
2.13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	32
2.14. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Perkapita	33
2.15. Tinjauan Empiris	35
2.16. Kerangka Konseptual	37
2.17. Hipotesis	40

BAB III	
METODE PENELITIAN	41
3.1. Lokasi Penelitian 40 3.2. Metode Pengumpulan Data	41
3.3. Jenis dan Sumber Data	41
3.4. Metode Analisis	42
3.5. Defenisi Operasional.....	43
BAB IV	
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1. Letak Geografis	45
4.2. Keadaan Iklim	45
4.3. Penduduk	46
4.4. Indikator Ekonomi	46
4.4.1. Perkembangan Ekonomi	46
4.4.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	47
4.4.3. Pendapatan Perkapita	48
4.4.4. Struktur Ekonomi Kabupaten Bone.....	49
4.4.5. PDRB Perkapita.....	51
BAB V	
HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1. Hasil	53
5.2. Pembahasan	56
5.2.1. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pertanian, Perdagangan dan Investasi Swasta terhadap PDRB	56
5.2.2. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pertanian, perdagangan terhadap PDRB	57
5.2.3. Hubungan antara Investasi Swasta terhadap PDRB	59
BAB VI	
KESIMPULAN DAN SARAN	61
6.1. Kesimpulan	61
6.2. Saran – Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Skema Pengeluaran Pembangunan Sektor Pembangunan dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	39
2.	Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006.....	54
3.	Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006.....	55
3.	Hubungan Antara Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006	55

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Tabel 1.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006.	3
2.	Tabel 1.2. Pdrb Perkapita Kabupaten Bone Dan Pdrb Perkapita Sulawesi Selatan Tahun 1996 – 2006.....	4
3.	Tabel 2.1. Pdrb Sulawesi Selatan Dan Pdrb Kabupaten Bone Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1996 – 2006.....	47
4.	Tabel 2.2 Perkembangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1.	Data Umum Perkembangan Investasi Swasta, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006	
2.	Hasil Analisis Pengaruh Perkembangan Investasi Swasta, Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PRDB) Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006	
3.	Hasil Analisis Pengaruh Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) Tahun 1996 – 2006	
4.	Hasil Analisis Pengaruh Perkembangan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006.....	
5.	Tabel Nilai Distribusi F (Uji F = 5 %).....	
6.	Tabel Nilai Distribusi t (Uji t)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang tengah giat-giatnya menggalakkan pembangunan nasional, menyadari akan pentingnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang merupakan usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan negara.

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan faktor-faktor produksi, yang merangsang perkembangan ekonomi dalam skala besar. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi atau yang lebih umum dikenal dengan peranan sektor publik telah menjadi suatu analisis yang penting dan sangat menarik. Berdasarkan alasan teoritis, terdapat beberapa pendapat yang kontroversi terhadap peranan sektor publik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam jangka panjang. Pandangan umum adalah pengeluaran pemerintah khususnya pada *human capital* dan infrastruktur fisik, dapat mempercepat pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dirasakan belum menghasilkan perbaikan tingkat kehidupan secara umum bagi sebagian penduduk. Dimana ada

indikasi bahwa telah terjadi kesenjangan dalam hal pendapatan, disatu sisi ada sekelompok masyarakat yang mengalami peningkatan taraf hidup yang semakin tinggi namun disisi lain ada sebagian masyarakat yang tidak mengalami peningkatan taraf hidup.

Melihat kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki dan kemampuan daerah itu untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki berbagai kebijaksanaan, langkah dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Semua kebijaksanaan dan upaya pembangunan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2003 telah mencapai Rp. 2.755.785.97 juta, maka terjadi kenaikan sebesar 12,41% pertahun.

Salah satu manfaat dari hasil perhitungan PDRB yaitu dapat digunakan untuk melihat gambaran struktur perekonomian suatu daerah atau wilayah. Struktur perekonomian Kabupaten Bone masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan total PDRB Tahun 2003 sebesar 58,50%, urutan kedua sektor jasa-jasa sebesar 10,16% disusul sektor industri pengolahan 9,06%, dan perdagangan sebesar 8,53%, sedangkan sektor lainnya sebesar 11,85%.

**Tabel.1.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Bone
Tahun 1996 – 2006 (%)**

KOMODITAS	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pertanian	4,50	0,40	-5,23	67,74	66,27	65,02	58,65	58,50	56,92	56,17	56,33
2. Pertambangan/penggalian	9,88	10,52	-23,63	0,40	0,38	0,39	0,39	0,40	0,42	0,43	0,39
3. Industri pengolahan	9,86	6,81	0,99	6,87	6,90	6,89	9,02	9,06	9,23	8,97	8,36
4. Listrik, gas, dan air	24,72	4,15	38,12	0,58	0,62	0,68	0,80	0,84	0,86	0,89	0,95
5. Bangunan	8,87	8,49	-14,19	3,17	3,31	3,19	3,86	3,77	3,95	3,98	4,20
6. Perdagangan	8,58	5,50	-4,12	8,78	8,49	8,26	8,45	8,53	8,73	8,54	7,93
7. Angkutan dan komunikasi	8,56	7,08	-6,74	3,34	4,08	4,20	4,66	4,67	4,96	4,93	4,68
8. Bank dan lembaga keuangan	8,8	5,03	-1,18	2,44	2,69	2,83	3,52	4,07	4,49	4,90	4,49
9. Jasa – jasa	6,8	1,86	-13,2	6,67	7,25	8,54	10,66	10,16	10,39	11,19	12,17

(Sumber data PDRB Kabupaten Bone 1996 - 2006)

Dengan berkembangnya perekonomian kabupaten bone dan melambatnya laju pertumbuhan penduduk akan berdampak pada peningkatan PDRB perkapita. Namun angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata – rata. Walaupun demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Setiap tahun PDRB Perkapita Kabupaten Bone mengalami peningkatan cukup pesat. Dalam sepuluh tahun terakhir misalnya, dari 1.306.280 rupiah pada tahun 1996 menjadi 3.505.628 rupiah pada tahun 2006.

Tabel 1.2. PDRB Perkapita Kabupaten Bone dan PDRB Perkapita Sulawesi Selatan, Tahun 1996 – 2006

Tahun	PDRB Perkapita Kabupaten Bone (Rupiah)	PDRB Perkapita Sulawesi Selatan (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1996	1.306.280	1.274.937
1997	1.335.978	1.314.788
1998	1.339.533.	1.230.697
1999	2.795.944	1.251.233
2000	3.073.663	1.297.050
2001	3.502.163	4.510.560
2002	3.157.643	4.888.084
2003	3.156.907	5.343.024
2004	3.217.729	6.047.000
2005	3.325.439	6.943.006
2006	3.505.628	-

(Sumber data PDRB Kabupaten Bone 1996 - 2006)

Peranan anggaran belanja pembangunan sebagai turunan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu instrumen yang memegang peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi pemerintah daerah baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari sistem kebijakan daerah yang berperan dalam penerjemahan secara operasional keputusan politik dan rencana strategis (Renstra) pembangunan nasional yang selanjutnya dijabarkan oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia melalui Pola Dasar pembangunan daerah (Poldas).

Secara umum peranan pengeluaran pemerintah baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD khususnya pengeluaran untuk *human capital* dan

infrastruktur fisik, dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktifitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya, yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total output (PDRB) yakni melalui penyediaan infrastruktur, barang-barang publik dan insentif pemerintah terhadap dunia usaha seperti subsidi ekspor.

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut, dimana harus senantiasa memperhatikan penataan ruang baik fisik maupun sosial tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang melibatkan semua pihak (*stakeholder*), dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat serta dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya pemerintah memegang peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan disuatu daerah karena melalui instrumen pengeluaran, pemerintah dapat berperan menjamin bahwa suatu keputusan yang menyangkut pengalokasian anggaran yang terbatas telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan efek yang akan ditimbulkannya terhadap aktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Upaya lain untuk mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah dengan

meningkatkan investasi dengan merangsang masuknya penanaman modal asing. Partisipasi pihak swasta dalam proses pembangunan khususnya pembangunan di bidang investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi yang mempengaruhi tinggi rendahnya PDRB dan mencerminkan marak lesunya pembangunan.

Dalam upaya menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Paradigma pembangunan yang melandaskan sumber pembiayaan asing dengan mendorong PDRB dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dianut pemerintah sejak awal sampai sekarang. Dilihat dari kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Bone dan komposisi masyarakatnya yang mana mata pencahariannya yang paling dominan adalah sektor pertanian dan perdagangan. Untuk itulah, maka dipilih judul penelitian **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bone”**

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini adalah **“Apakah Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bone”**.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- Sebagai bahan informasi untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone.
- Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Bone dalam penyusunan proyeksi pengalokasian anggaran tahunan dan target pertumbuhan ekonomi.
- Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya terutama yang berhubungan dengan masalah yang sama, sekaligus menjadi sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah merupakan sumber yang secara terus menerus ditingkatkan dan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya mencapai rata-rata 13.61%. Ini berarti bahwa angka ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Untuk mengatasi masalah ini salah satu sudut pandang kebijakan yang dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal pendistribusian anggaran pada sektor-sektor unggulan, sehingga dapat merangsang terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Sedangkan **Kunarjo (1996)** menyatakan bahwa penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD) mempunyai fungsi utama yaitu :

1. Fungsi alokasi, dimaksudkan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta.
2. Fungsi distribusi, dimaksudkan sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan distribusi pendapatan antar warga negara dalam upaya memperkecil ketimpangan ekonomi.

3. Fungsi stabilitas, dimaksudkan sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam menjamin terpeliharanya kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang memadai

Selanjutnya **Davey (1998)**, mengatakan bahwa terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari alokasi anggaran pemerintah pusat kepada daerah diantaranya adalah:

1. Pembelanjaan, seluruhnya atau sebagian, biaya pelayanan atau program-program pembangunan yang kepentingannya bersifat nasional, yaitu yang dipandang sejalan dengan keinginan, kebijaksanaan dan sasaran pada tingkat nasional.
2. Mendorong upaya pemerintah daerah untuk program-program dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional.
3. Merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, baik untuk membantu pertumbuhan maupun penyimpangan antar wilayah.
4. Mengendalikan pengeluaran daerah untuk memastikan penyesuaian terhadap standar kebijakan nasional.
5. Memantapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil dan merata.
6. Mengembangkan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah untuk meningkatkan penerimaan langsung mereka.
7. Membantu daerah-daerah untuk mengatasi keadaan darurat.

Sedangkan **Mamesah (1995)** mengemukakan bahwa, dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD) ada empat prinsip yang harus diperhatikan :

1. Prinsip kemandirian, dimana adanya usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta adanya upaya ketepatan kegunaan dana yang tersedia agar dapat mengurangi ketergantungan pada instansi yang lebih tinggi.
2. Prinsip prioritas, dimana dalam penyusunan anggaran diupayakan mempertajam prioritas dalam penggunaan dana.
3. Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, dimana pengendalian pembiayaan dan penghematan yang meluas pada prioritas daerah tersebut.
4. Prinsip disiplin anggaran, dimana setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah yang memperoleh anggaran harus dapat menggunakan secara efisien, tepat guna dan tepat waktu pertanggung jawabannya, serta tidak melaksanakan kegiatan atau proyek yang tidak tersedia atau belum tersedia kredit anggarannya dalam APBD.

Syafruddin (2001) telah melakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan alokasi anggaran pembangunan daerah serta perkembangan ekonomi daerah di Kabupaten Waringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada kriteria-kriteria yang digunakan dalam menunjang pengalokasian anggaran pembangunan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dihubungkan dengan 9 sektor PDRB dengan hasil 8 sektor terjadi perbedaan yang berarti perkembangannya tidak searah dan 1 sektor yang tidak menunjukkan perbedaan, yang berarti terjadi perkembangan searah.

Hal tersebut berarti bahwa dari 8 sektor yang terdapat perbedaan menunjukkan pengalokasian anggaran pembangunan tidak secara langsung meningkatkan PDRB namun terlebih dahulu melalui proses pada periode tertentu, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian.

2.2. Pengertian Anggaran Pembangunan Daerah

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan senantiasa mengacu pada Trilogi Pembangunan (Pertumbuhan, Pemerataan, Stabilitas), pemerintah mengambil beberapa kebijakan penting yang tertuang dalam rencana program anggaran, terutama yang terkait langsung dengan bidang keuangan pemerintah atau lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana halnya dengan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memiliki sejumlah rencana yang matang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Anggaran keuangan bagi daerah adalah merupakan hal yang sangat substansial dan menjadi penentu bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di daerah. Alokasi anggaran pemerintah yang lebih dikenal sebagai anggaran keuangan daerah menyangkut tentang alokasi penerimaan dan pengeluaran yang merupakan rencana dan gambaran kegiatan serta dinyatakan dalam bentuk angka-angka untuk jangka waktu tertentu atau biasa disebut budget (APBD).

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anggran



Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Pemerintah Daerah (Perda).

Dalam kesempatan lain **Mamesah (1995)** memberikan batasan dan definisi dari APBD adalah merupakan suatu rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan atau proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan penerimaan.

2.3. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada anggaran dan belanja daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan optimalisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini APBD secara efisien dan efektif, maka struktur APBD untuk tahun 2003 terjadi perubahan yakni disusun berdasarkan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja atau output dan bukan lagi pada input seperti kecenderungan sebelumnya.

Dalam struktur APBD yang baru, sisa lebih APBD tahun lalu dan pinjaman (utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun dimasukkan sebagai pembiayaan daerah, sedangkan anggaran belanja rutin dan pembangunan yang ada pada struktur APBD sebelumnya diarahkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal yang diklasifikasikan dalam belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dengan struktur yang baru tersebut akan lebih mudah mengetahui surplus atau defisit dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik). Jika terjadi defisit anggaran untuk menutupinya disediakan pos tambahan yaitu pos pembiayaan.

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat *exhaustive expenditure* yaitu merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial. Jadi *exhaustive expenditure* mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Pengeluaran ini dapat berupa pembelian terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, seperti jasa-jasa guru, meliter, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Suparmoko (1996).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang "Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan APBD".

Menyatakan pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran tertentu. Serta memberikan penjelasan tentang belanja daerah yaitu semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

2.4. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Basri dan Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
3. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan datang.
4. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang luas.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.104 tahun 2000 dijelaskan terdapat tiga sumber dana pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu :

- Bagi hasil pajak penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu komponen dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu pembagian hasil penerimaan SDA dan penerimaan perpajakan (*tax sharing*), termasuk di dalamnya adalah pembagian hasil pajak : Pajak penghasilan (Pph), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- Dana Alokasi Umum (DAU), besarnya didasarkan pada formula tahun anggaran (APBD) yang bersumber dari dana sektoral dan dana regional yang ditransfer dari APBN yang dikelompokkan menjadi DAU.
- Dana Alokasi Khusus (DAK), yang ditentukan besarnya berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan mempunyai fungsi yang sangat khusus namun prosesnya tetap dari bawah (*bottom-up*).

2.5. Jenis Pengeluaran Pemerintah

Kunarjo (1996) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berperan dalam untuk mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan negara harus ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya yang sebahagian besar berasal dari pajak.

Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah tersebut. Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional. Dengan komposisi dari pengeluaran tersebut akan terjawab suatu pertanyaan yaitu pengeluaran mana yang kiranya lebih diprioritaskan apakah pengeluaran rutin harus lebih besar dari pengeluaran pembangunan atau sebaliknya.

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa *pada dasarnya pengeluaran pemerintah terdiri dari :*

1. Aparatur Daerah

Yaitu pengeluaran yang dikaitkan dengan yang sifatnya terus menerus seperti aktivitas pengeluaran, pembinaan, bimbingan dan sebagainya.

Aparatur Daerah ini meliputi :

a). Belanja Administrasi Umum

- belanja pegawai/ personalia
- belanja barang dan jasa
- belanja perjalanan dinas
- belanja pemeliharaan

b). Belanja Operasi dan Pemeliharaan

- belanja pegawai/ personalia
- belanja barang dan jasa
- belanja perjalanan dinas
- belanja pemeliharaan

c). Belanja Modal

- pelayanan publik
- belanja administrasi umum
- belanja pegawai / personalia
- belanja barang dan jasa
- belanja perjalanan dinas
- belanja pemeliharaan

d). Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

e). Belanja tak terduga

Sementara oleh **Suparmoko (1996)** membedakan pengeluaran negara dalam beberapa macam yakni :

1. Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian untuk seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah akan mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan.
2. Pengeluaran yang *produktif*, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan yang ekonomis bagi masyarakat dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dari sasaran pajak maka pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah.
3. Pengeluaran yang *tidak self liquidating* maupun *tidak produktif*, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan.
4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran, pada satu sisi terjadi pemborosan namun pada sisi lain yang menerima mengalami kenaikan pendapatan.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa yang akan datang pada saat usia lanjut akan jauh lebih besar.

2.6. Fungsi Utama Pengeluaran Pemerintah

Hyman (1996) menjelaskan pengeluaran pemerintah yang didistribusikan dengan daya beli di tengah masyarakat disebut dengan pembayaran transfer pemerintah. Pembayaran transfer ini membuat sumber-sumber pendapatan menyokong pada penerimaan yang tidak mampu menyediakan pelayanan sebagai imbalan dari pendapatan yang diterima kemudian. Defisit anggaran dapat mempengaruhi alokasi sumber daya (dengan mempengaruhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah) dan seluruh ukuran sektor pemerintah dalam perekonomian. Defisit juga dapat mempengaruhi harga dan tingkat bunga dengan demikian mempengaruhi distribusi pendapatan.

Lebih Lanjut Hyman (1996) mengatakan bahwa dalam perekonomian modern, fungsi pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam tiga golongan besar yaitu

- 1) Fungsi alokasi, yaitu sumber-sumber dana yang diperoleh pemerintah hendaknya dialokasikan untuk barang-barang kebutuhan perorangan dan sarana-sarana yang dibutuhkan dengan kepentingan umum
- 2) Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang menyeimbangkan dan menyesuaikan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Fungsi stabilitas, yaitu penggunaan anggaran yang merupakan kebijaksanaan mempertahankan kesempatan kerja, stabilisasi peningkatan harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mantap.

2.7. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro **Basri dan Subri (2003)**.

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain :

1. Hukum Wagner

Berdasarkan pengalaman empiris dari negara-negara maju (USA, Jerman, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meskipun demikian, Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks.

Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

2. Teori Peacock dan Wiserna

Teori Peacock dan Wiserman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan

masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut teori Peacock dan Wiserman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain. Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GDP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya.

2.8. Investasi

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu komponen ekonomi makro yang memiliki pengertian sangat luas dan rumit karena tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis para investor, iklim politik serta keadaan sosial masyarakat yang beraneka ragam bentuknya.

Menurut **Jhingan (1994)**, investasi atau pembentukan modal "masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produksi saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembentukan modal, perkakas dan alat-alat, mesin, dan fasilitas angkutan publik dan perlengkapannya, segala macam modal nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produksi".

Investasi atau pembentukan modal diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa tertentu yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa dengan tujuan menambah stok modal di gudang.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam investasi terdapat unsur-unsur penting yang ditekankan yaitu :

1. Penambahan modal atau kapital
2. Yang bertujuan untuk menambah barang-barang atau alat produksi
3. Dalam jangka panjang
4. Dengan pertimbangan dialokasikan pada sektor-sektor yang menguntungkan dan keamanan dari resiko kerugian.

2.9. Teori – Teori Investasi

1. Teori Klasik

Investasi merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan (potensi) masyarakat dalam meningkatkan produksi. Selain itu pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam masyarakat dan apabila ini bertambah maka produksi dan pendapatan akan meningkat, dengan demikian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan pendapat para ahli ekonomi modern, kaum klasik yang menganggap akumulasi kapital sebagai syarat mutlak pembangunan ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan.

2. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik tentang investasi intinya berdasarkan teori produktivitas marginal dari faktor produksi modal, artinya modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginal dibandingkan dengan tingkat harga.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan investasi yaitu :

- Tingkat biaya barang modal
- Tingkat bunga
- Tinggi pendapatan yang akan diterima

Perubahan dari salah satu faktor tersebut akan mengakibatkan perubahan dalam perhitungan profitabilitas.

3. Teori Keynes

Masalah investasi oleh Keynes didasarkan atas konsep *marginal efficiency of investment* (MEI) lebih tinggi. Ekonomi di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi dari investasi. **Yonathan (2003).**

Secara teoritis, Harrod – Domar telah menganalisa hubungan antara investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kedua ekonom tersebut menyimpulkan adanya hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal keseluruhan, K , dengan GNP, Y , yang diformulasikan sebagai rasio modal/output (*Capital/output ratio*, COR). Semakin tinggi stok modal semakin tinggi pula output yang dihasilkan.

Dalam model multiplier Keynes menyebutkan bahwa peningkatan jumlah investasi swasta akan memperluas output dan penggunaan tenaga kerja. Olehnya itu, investasi merupakan salah satu bagian dari GNP, sehingga bila salah satu bagian meningkat, maka dengan sendirinya seluruh bagian juga akan meningkat. **Samuelson dan Nordaus (1986).**

2.10. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets ahli ekonomi terkemuka, menamakan pertumbuhan ekonomi sebagai *Modern Economic Growth*. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami hanya dua abad sekarang ini. Di samping itu pertumbuhan ekonomi merupakan masalah dalam jangka panjang.

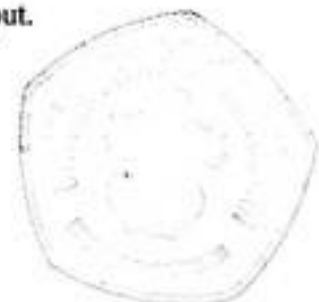
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari Trilogi pembangunan yang harus dipenuhi sebagai landasan pembangunan. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka pertumbuhan dibidang lain tidak akan dapat dicapai dengan baik, karena tanpa kondisi ekonomi yang memadai, bangsa Indonesia akan selalu berorientasi pada tujuan jangka pendek dan ruang lingkup yang lebih sempit pula.

Menurut **Suparmoko (1996)** bahwa ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, tidak hanya meningkatkan output tetapi juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak. Pertumbuhan dapat meliputi penggunaan lebih banyak input dan lebih efisien, yaitu adanya kenaikan output per satuan unit.

Menurut **Djojohadikusumo (1996)**, memberikan definisi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah sarana produksi tertentu.

Selanjutnya **Kuznets dan Jhingan (1994)** mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan ideologis yang diperlukan. Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa/daerah terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang.
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dan penyediaan beraneka macam barang kepada penduduk.
3. Pertumbuhan ekonomi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga motivasi yang dihasilkan oleh pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.
4. Indikator pertumbuhan ekonomi merupakan pertanda pentingnya di dalam kehidupan perekonomian. **Jhingan (1996)** menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja dan lain-lain. Adapun keenam ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita. Pertumbuhan ekonomi modern sebagaimana terungkap dari pengalaman negara maju sejak akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, ditandai dengan kenaikan produk perkapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat.
 2. Peningkatan produktifitas. Pertumbuhan ekonomi terlihat dari semakin meningkatnya laju produk perkapita terutama adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi dan produktifitas per unit input. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal atau semakin meningkatnya efisiensi, atau kedua-duanya. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang lebih besar untuk setiap unit input.



3. Laju perubahan struktur yang tinggi. Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri
4. ke jasa, perubahan dari skala unit-unit produksi dan peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh.
5. Urbanisasi. Pertumbuhan ekonomi ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.
6. Ekspansi negara maju. Pertumbuhan negara maju kebanyakan tidak sama pada beberapa bangsa. Pertumbuhan ekonomi modern terjadi lebih awal daripada bangsa lain. Hal ini sebagian besar disebabkan perbedaan latar belakang sejarah masa lalu.
7. Arus barang, modal dan orang antar bangsa. Arus barang, modal dan orang antar bangsa akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut **Boediono (1998)**, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Berdasarkan pengertian tersebut ada tiga aspek yang ditekankan oleh Boediono yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu yang dilihat dari perkembangan atau perubahan output.
2. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan kenaikan output perkapita yaitu PDB dan jumlah penduduknya.
3. Pertumbuhan ekonomi berlaku dalam jangka panjang.

2.11. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Teori pertumbuhan para **Pakar Klasik**

Kaum Klasik berpendapat bahwa mekanisme pasar akan secara otomatis menjadikan perekonomian berjalan secara efisien.

- a. **Smith dalam Suparmoko (1998)**. Untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktifitas tenaga kerja bertambah. Disebutkan pula bahwa sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi modal dimana modal ini berasal dari investasi dan tabungan. Di samping itu pasar harus seluas mungkin dapat menampung hasil produksi dan karena perdagangan luar meluaskan pasar, maka pasar terdiri pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.
- b. **Ricardo dalam Suparmoko (1998)**, ia membagi masyarakat ekonomi menjadi tiga golongan, yaitu golongan kapitalis, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Sesuai dengan penggolongan tersebut maka pendapatan nasional dibagi menjadi tiga yaitu upah, sewa, dan keuntungan. Dalam kaitan ini secara jelas **Ricardo** membedakan antara penerimaan bruto dengan penerimaan netto. Penerimaan bruto merupakan nilai pasar dari barang-barang akhir yang diproduksi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan penerimaan netto adalah pendapatan yang memungkinkan adanya pertumbuhan selanjutnya. Dengan kata lain, apabila penerimaan netto tersebut diinvestasikan lagi akan mengakibatkan perkembangan.

c. **Maltus dalam Suparmoko (1998).** Menurut tokoh ekonomi pangan ini, yang namanya kenaikan jumlah penduduk, yang berarti pula tambahan permintaan, merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan. Di samping itu, juga harus diikuti dengan kemajuan, faktor-faktor, atau unsur-unsur perkembangan lainnya. Untuk mendukung perkembangan ekonomi dibutuhkan kenaikan kapital untuk investasi, dimana kapital tersebut didapat dari tabungan. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang menekan upah. Selain itu pendapatan yang diterima ada yang ditabung karena tidak dikonsumsi seluruhnya.

d. **Mill dalam Jhingan (1994).** Pandangannya dapat dikatakan sama dengan Smith dan Ricardo,. Salah satu analisisnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi antara lain :

- Faktor-faktor non ekonomi seperti adat istiadat dan kepercayaan masyarakat.
- Ada tidaknya golongan masyarakat yang kreatif.
- Ada tidaknya pengetahuan

Oleh karena itu perbaikan dalam pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor-faktor penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi pembangunan ekonomi.

2. **Teori Schumpeter menurut Schumpeter dalam Suparmoko (1998).** Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus yang disebabkan oleh gangguan ekonomi. Jadi perkembangan ekonomi di sini disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan.

3. Teori Harrood – Domar

Kedua pakar ini berpendapat bahwa akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi mempunyai peran ganda, yaitu menimbulkan pendapatan dan kenaikan kapasitas produksi.

Untuk mempertahankan keseimbangan pada tingkat *full employment*, maka diperlukan pengeluaran berupa investasi untuk menyerap kenaikan output yang terjadi sesuai dengan pertumbuhan penduduk untuk menjaga agar pendapatan perkapita tidak turun. Semakin besar pendapatan nasional, maka investasi yang dibutuhkan juga semakin besar.

4. Teori Neo Klasik

Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertumbuhan dalam penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Sebab, perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal tetap digunakan sepenuhnya dari masa ke masa.

2.12. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi, yang semua merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, nilai-nilai moral dalam suatu negara atau daerah tidak menunjang. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh bangun merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor-faktor produksi tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

- a. **Sumber daya alam.** Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunan kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, lautan dan sebagainya. Dalam pertumbuhan ekonomi tersedianya sumberdaya alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Namun demikian, yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumberdaya alam dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.
- b. **Akumulasi modal.** Faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Disatu pihak ini mencerminkan permintaan efektif, dan dilain pihak ini menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses pembentukan modal dapat menghasilkan kenaikan pendapatan nasional dalam berbagai cara.

- c. **Organisasi.** Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi.
Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dalam membantu meningkatkan produktifitasnya.
- d. **Kemajuan teknologi.** Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil perubahan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan teknologi akan meningkatkan produktifitas buruh, modal dan faktor produksi lainnya.
- e. **Pembagian kerja dan skala produksi.** Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

2. Faktor Non Ekonomi

Faktor non ekonomi berguna terhadap faktor ekonomi, saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Dalam kenyataan faktor non ekonomi umumnya seperti organisasi sosial, budaya dan politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu faktor non ekonomi juga memiliki arti penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Faktor non ekonomi tersebut antara lain :

a. Faktor Sosial

Jika pembangunan ekonomi diinginkan berjalan mulus, pandangan nilai-nilai dan lembaga sosial harus diubah. Perubahan hanya mungkin terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi bila tatanan sosial

dipengaruhi oleh sistem yang ketat dan sistem yang famili, kebebasan individu dan mobilitas untuk bekerja lebih keras, mendapatkan lebih banyak dan menabung lebih banyak.

b. Faktor Manusia

Persyaratan yang lebih penting bagi laju pertumbuhan ekonomi adalah manusia. Manusia yang berdedikasi terhadap pembangunan negerinya dan terhadap kejujuran, kewibawaan, pengetahuan dan prestasi kerja.

c. Faktor Politik dan Administratif Kerja

Faktor politik dan administratif kerja juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Lewis dengan tepat melihat tindakan pemerintah memainkan peranan penting dalam

merangsang dan mendorong kegiatan ekonomi. Ketertiban stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan, semakin besar kebebasan itu maka semakin besar pula kewiraswastaan itu.

2.13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk dapat mengukur sejauh mana pembangunan maupun sasaran serta target pembangunan yang ingin dicapai, maka diperlukan berbagai alat analisis salah satu diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan konsep dari BPS dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PDRB adalah nilai yang ditimbulkan oleh aktifitas faktor-faktor produksi dalam merubah/memproses bahan-bahan baku/penolong sehingga lebih dekat pada pengguna atau nilai yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Nilai-nilai dari PDRB tersebut dapat dihitung dengan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
2. Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah (satu tahun).
3. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit serta ekspor netto (setelah dikurangi impor), dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Dari segi penyajiannya, PDRB selalu dibedakan kepada dua pendekatan yaitu, (a) PDRB atas harga berlaku dan (b) PDRB atas harga konstan. Adapun yang dimaksud dengan PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas harga konstan adalah merupakan jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap pada tahun dasar dan dalam publikasi ditetapkan tahun dasar adalah tahun sebelumnya.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa dalam penyusunan PDRB akan diperoleh manfaat seperti :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor.
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah,
3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan harga (inflasi/deflasi), dan
4. Sebagai suatu indikator mengenai tingkat kemakmuran

2.14. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Perkapita

Menurut Suparmoko (1996), pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial, pembayaran bunga dan bantuan pemerintah lainnya akan menambah pendapatan dan daya beli. Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah ini akan memperluas pasaran hasil-hasil perusahaan dari industri yang pada gilirannya akan memperbesar pendapatan.

Dari segi penerimaan, maka pungutan pajak oleh pemerintah akan mengurangi pendapatan para pengusaha yang sebetulnya dapat digunakan untuk konsumsi dan pembentukan modal atau akan mengurangi pendapatan konsumsi dan penerimaan akan hasil produksi.

Selanjutnya Suparmoko (1996) mengatakan pengaruh yang terjadi dengan adanya pengeluaran dan penerimaan pemerintah, ini tergantung pada hubungan perimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan pemerintah itu sendiri. Bilamana anggaran surplus, artinya pendapatan dari pajak-pajak dengan pungutan-pungutan lain lebih besar dari pengeluarannya, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap kehidupan ekonomi bersifat kontraktif atas *employment*, produksi regional dan output. Sebaliknya bila anggaran itu ternyata defisit yakni pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah melampaui pendapatannya timbullah efek ekspansif dalam perekonomian.

Di samping soal defisit atau surplusnya anggaran, maka komposisi dari penerimaan dengan pengeluaran pemerintah turut juga berpengaruh terhadap proses ekonomi. Jadi bilamana kenaikan penerimaan pemerintah turut juga berpengaruh terhadap proses ekonomi. Jadi bilamana kenaikan penerimaan pemerintah itu kebanyakan berasal dari pembayaran pajak yang dimaksud melakukan hoarding dan pemerintah menggunakan hasil dari pemungutan pajak itu untuk membayar para pekeja yang *Marginal Propensity to Consume* (MPC)-nya besar, maka tindakan ini akan mengakibatkan meningkatnya semua tingkat pengeluaran.

Dengan adanya kebijakan fiskal pemerintah, maka produksi regional, konsumsi dan tabungan akan terpengaruh, sebab pembayaran-pembayaran atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah itu akan menambah pendapatan masyarakat kepada pemerintah akan mengurangi pendapatan daya beli dan konsumsi serta tabungan masyarakat.

2.15. Tinjauan Empiris

Samboja (1994) menyimpulkan bahwa total pembelanjaan meningkat lebih cepat dari total GDP, perlu dicatat bahwa studi yang menggunakan konsumsi pemerintah sebagai perbandingan umumnya menemukan suatu hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang menggunakan tingkat pertumbuhan belanja pemerintah pada investasi secara umum menemukan hubungan yang positif.

Rachman (2001), dalam penelitiannya "Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 1983-1998", bahwa berdasarkan uji *t* statistik dan arah koefisien yang terbentuk dalam model, diperoleh bahwa investasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 1983-1998. Diketahui dari hasil analisa bahwa jika terjadi peningkatan investasi sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.000143%. Hal ini secara teoritis dapat dimaklumi bahwa peningkatan investasi akan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja sektor produksi dan memperluas kesempatan kerja. Peningkatan investasi akan mendorong meningkatnya permintaan sumber-sumber produksi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia (*human resources*) sedangkan peningkatan terhadap sumber daya manusia yang berarti perluasan kesempatan kerja tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang otomatis meningkatkan kemampuan daya belinya.

Pada sisi lain **Ram (1986)**, dan **Grossman (1988)** menemukan suatu hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan *disaggregation* pengeluaran tersebut.

Menurut **Bose dan Haque (2003)**, dalam jurnalnya mengkaji tentang efek-efek pertumbuhan dari pengeluaran pemerintah untuk sebuah panel dari 30 negara sedang berkembang selama dekade tahun 70an dan 80an dengan sebuah fokus tertentu tentang pengeluaran-pengeluaran sektoral akan bersifat sektoral. Metode kami mengangkat penelitian terdahulu tentang masalah ini dengan secara eksplisit mengenalkan model *budget* pemerintah yang dipakasakan dan bias-bias yang

mungkin berasal dari variabel yang dihilangkan. Hasil penelitian kami yang utama adalah dua kali lipat.

1. Bagian dari modal pengeluaran pemerintah dalam GDP yang mana secara positif dan signifikan berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran terkini tidak signifikan.
2. Pada level sektoral investasi pemerintah dan pengeluaran total dalam pendidikan adalah pengeluaran yang secara signifikan diasosiasikan dengan pertumbuhan budget aggaran yang dipaksakan dan variabel-variabel yang dihilangkan dimana hal tersebut dijadikan sebagai sebuah perkembangan.

2.16. Kerangka Konseptual

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana pembangunan daerah yang secara terus – menerus harus selalu ditingkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

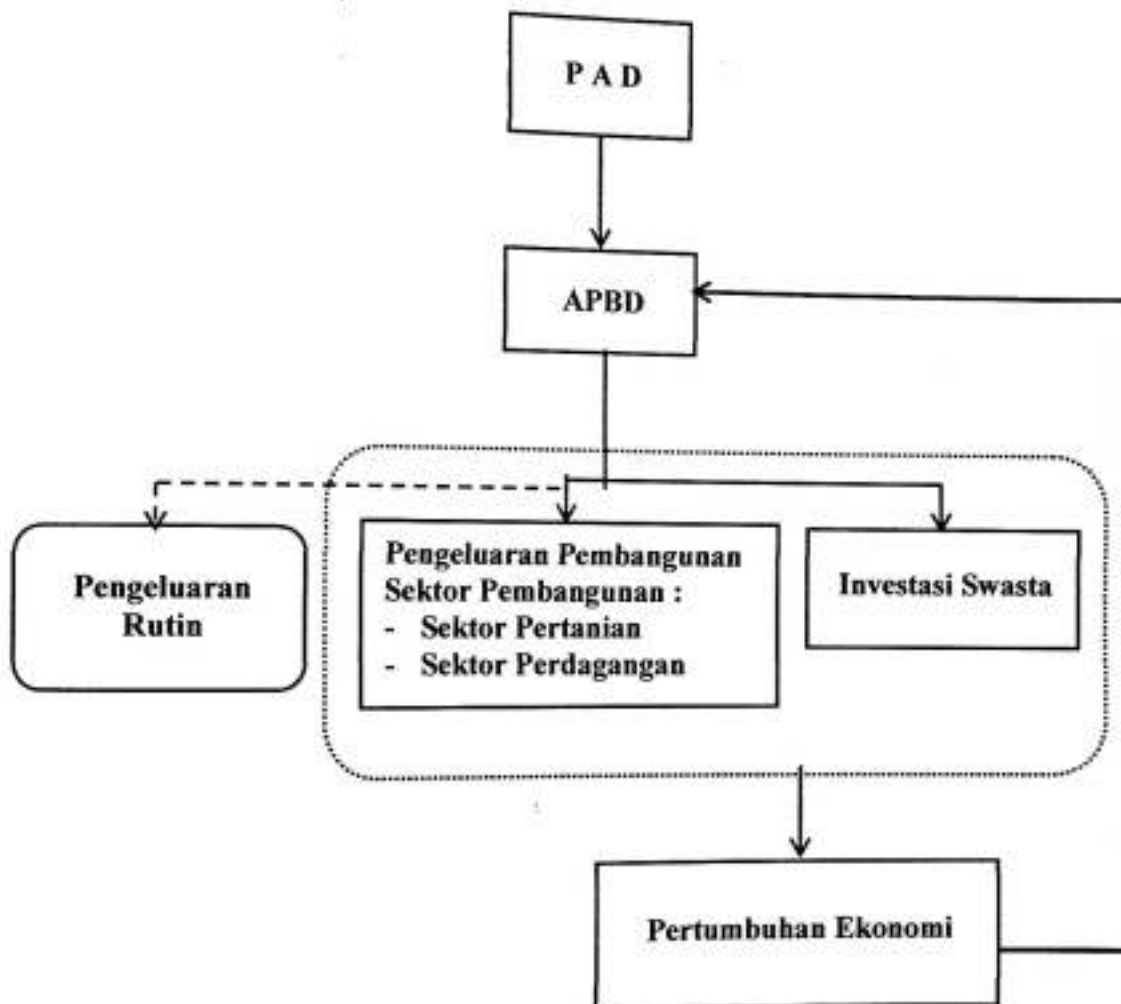
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah merupakan suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan pemerintah daerah. Alokasi anggaran pemerintah yang lebih dikenal sebagai anggaran keuangan daerah menyangkut tentang alokasi penerimaan dan pengeluaran yang merupakan rencana dan gambaran kegiatan serta dinyatakan dalam bentuk angka – angka dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain APBD merupakan suatu rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan tentang bagaimana membiayai kegiatan atau proyek – proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan penerimaan.

Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada anggaran dan belanja daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan dalam semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintah daerah sehari – hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Didalam APBD terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu : pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang sifatnya secara terus – menerus seperti aktivitas pengeluaran, pembinaan, bimbingan dan sebagainya. Yang meliputi : belanja pegawai atau pensiunan, belanja barang, dan subsidi daerah otonom. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah kebijakan anggaran pembangunan yang lebih ditekankan pada pengalokasian dana pembiayaan pembangunan pada program atau proyek yang mendukung tercapainya tujuan pemerataan, pertumbuhan, dan kestabilan. Pengeluaran pembangunan diarahkan pada proyek – proyek yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor – sektor pertanian, industri, serta pada bidang dan sektor – sektor lain yang menunjang tercapainya sasaran pertumbuhan dan kesinambungan struktur perekonomian. Dalam suatu pengalokasian dana pembiayaan pembangunan pada program atau proyek sering terjadi defisit anggaran sehingga diperlukan adanya tambahan dana dari pihak investor untuk bisa menanamkan investasi. Baik itu investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA). Dalam membantu proses kelancaran pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.

Skema Pengeluaran Pembangunan Sektor Pembangunan dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



2.17. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hipotesisnya sebagai berikut :

Diduga pengeluaran pemerintah (sektor pertanian dan sektor perdagangan) dan investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone dimana penelitian ini di fokuskan pada Analisis Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan dari bulan Maret sampai April 2007.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencermati secara langsung ke objek penelitian yang dilaksanakan. Sedangkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui pengumpulan informasi atau menelaah dokumen dan laporan yang dalam hal ini merupakan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui dinas atau instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai teori-teori, defenisi atau pengertian serta referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4. Metode Analisis

Pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diuraikan dalam 3 kategori yaitu pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X1), pengeluaran pemerintah sektor perdagangan (X2), dan investasi (X3). Pengeluaran pemerintah dan investasi secara bersama-sama diduga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah fungsi Cobb-Douglas dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \quad (1)$$

Selanjutnya persamaan diestimasi ke bentuk linier sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + X_3\beta_3 + e^\mu \quad (2)$$

dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan PDRB (Rp/tahun)

X1 = Pengeluaran Pemerintah sektor Pertanian (Rp/tahun)

X2 = Pengeluaran Pemerintah sektor Perdagangan (Rp/tahun)

X3 = Investasi Swasta (Rp/tahun)

$\beta_0 - \beta_3$ = Koefisien Pengeluaran Pemerintah pada tiap sektor

μ = Error term

Untuk dapat mengambil keputusan sebagai hasil dari pengujian hipotesis, maka hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari koefisien regresi antara variabel bebas (*independent variabel*) dengan variabel terikat (*dependent variabel*) yang melalui beberapa pengujian yaitu :

1. Uji Statistik R^2

Digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat.

2. Statistik uji t (*t test*)

Hal ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Dikatakan signifikan jika t hitung > dari t tabel dengan taraf nilai uji 5 %.

3. Statistik uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dengan tingkat taraf uji 5 %. Signifikan bila F hitung sama atau lebih besar dari F tabel.

3.5. Definisi Operasional

Dalam tulisan ini ada beberapa hal yang menjadi inti pembahasan yaitu :

1. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan merata.
2. Investasi swasta adalah investasi yang dikeluarkan baik dari dalam negeri maupun investasi asing yang dialokasikan pada beberapa sektor antara lainnya sektor pertanian dan sektor perdagangan.
3. Pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini berpedoman pada tiga aspek yaitu proses, output, dan jangka panjang.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Letak Geografis

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten dipesisir timur propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke utara. Secara astronomis terletak dalam posisi $4^{\circ} 13'$ – $5^{\circ} 6'$ lintang selatan dan antara $119^{\circ} 42'$ – $120^{\circ} 40'$ bujur timur dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru

4.2. Iklim

Kabupaten Bone memiliki dua jenis musim yakni musim penghujan dan musim kemarau dengan tipe iklim sedang. Pada periode bulan April – September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada periode bulan Oktober – Maret bertiup angin barat, yang pada waktu itu Kabupaten Bone akan mengalami musim kemarau, tetapi terdapat juga sektor peralihan dimana kecamatan Bontocani dan Libureng dan sebagian wilayahnya mengikuti sektor barat dan sebagiannya lagi mengikuti sektor timur. Suhu minimum di Kabupaten Bone adalah 26°C dan suhu maksimum mencapai 43°C . Menilik kondisi tersebut, makadearah ini memungkinkan untuk menghasilkan berbagai komoditi pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

4.3. Penduduk

Total penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2005 sebanyak 694.311 jiwa, terdiri dari 328.617 jiwa pria dan 365.694 jiwa wanita dengan kepadatan penduduk rata – rata 152 jiwa per km². laju pertumbuhan penduduk dalam kurung waktu 2004 – 2005 memperlihatkan peningkatan yakni sebesar 0,91% dimana jumlah penduduk pada tahun 2004 sebanyak 688.080 jiwa.

4.4. Indikator Ekonomi

4.4.1. Perkembangan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone disajikan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan 2000. digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, karena nilai PDRB tidak dipengaruhi oleh perubahan harga sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besar dan struktur ekonomi suatu daerah.

PDRB Kabupaten Bone Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, nilainya telah mencapai sekitar Rp 3.327.715.77 juta atas dasar harga berlaku. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sekitar 0,12%.

Dengan angka tersebut, kontribusi Kabupaten Bone terhadap pembentukan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2006 ini sekitar 6,12 persen yang berarti sumbangan daerah ini terhadap perekonomian Sulawesi Selatan cukup besar.

**Tabel 2.1 PDRB Sulawesi Selatan dan PDRB Kabupaten Bone
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1997 – 2006**

Tahun	PDRB Sulsel (juta Rp)	PDRB Bone (Juta Rp)	Persentase Bone Thd Sulsel
-1	-2	-3	-4
1996	15.107.506,82	803.397,79	8,01
1997	18.182.050,7	1.361.204,7	8,13
1998	20.851.956,6	1.561.088,0	7,81
1999	24.064.892,99	1.801.625,55	7,49
2000	27.772.137,30	1.992.007,18	7,17
2001	31.436.140,33	2.282.520,84	7,15
2002	35.344.427,65	2.632.084,04	7,45
2003	39.414.659,75	2.915.609,11	7,40
2004	44.744.532,59	2.978.646,53	6,66
2005	52.042.724,45	3.327.715,77	6,39
2006	60.187.125,7	3.848.485,0	6,12

(sumber data PDRB Kabupaten Bone 1996 – 2006)

4.4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar harga konstan) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Mulai tahun 2004, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 sebagai tahun dasar.

Tabel dibawah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi Kabupaten Bone tahun 2001 – 2006.

**Tabel 2.2. Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bone Tahun 2001 – 2006**

Tahun	PDRB adh Berlaku (juta Rp)	Perkembangan (%)	PDRB adh konstan (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	2,154,912.48	15,23	1,969,994.70	5,36
2002	2,491,568.69	15,62	2,069,953.70	5,07
2003	2,755,785.97	10,60	2,164,344.20	4,56
2004	2,978,646.53	8,08	2,209,958.50	2,11
2005	3,327,715.77	11,72	2,305,158.94	4,31
2006	3.860,830.96	16,02	2,442,413,22	5,95
Rata-rata	***	12,41	***	3,39

(sumber data PDRB Kabupaten Bone 2001 - 2006)

Selama periode 2001 – 2006 perekonomian Kabupaten Bone relatif stabil dengan rata – rata pertumbuhan 4,28 persen. Dari tahun ketahun tampak terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik yakni pada tahun 2001 tumbuh sebesar 5,36 persen, kemudian tumbuh sebesar 5,07 persen pada tahun 2002. dan pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 2,11 persen, dan tahun 2005 meningkat sekitar 4,31 persen, dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 5,95 persen.

4.4.3. Pendapatan Perkapita

Didalam perhitungan agregat maka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dan pendapatan per kapita sering dipergunakan sebagai indikator untuk

mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pendapatan per kapita yang tinggi mencerminkan masyarakat yang lebih makmur, sedangkan pendapatan per kapita yang rendah mencerminkan ekonomi yang kurang makmur dengan asumsi sektor kegiatan yang menggunakan padat modal sangatlah diperlukan. Dengan berkembangnya perekonomian kabupaten bone dan melambatnya laju pertumbuhan penduduk akan berdampak pada peningkatan PDRB perkapita. Namun angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata – rata. Walaupun demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata – rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

4.4.4. Struktur Ekonomi Kabupaten Bone

Manfaat lain dari PDRB adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing – masing sektor terhadap total PDRB-nya.

Struktur ekonomi Kabupaten Bone pada kurun waktu tahun 1999 – 2003 tidak mengalami pergeseran yang berarti, peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Bone masih cukup besar yakni rata – rata 5,0 persen. Tingginya peranan ini ditopang oleh sub – sektor tanaman bahan makanan (tabama) dengan kontribusi rata – rata 41,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bone perekonomiannya masih mengandalkan pada pertanian tanaman pangan. Produk Kabupaten Bone perekonomiannya masih mengandalkan pada pertanian tanaman pangan.

**Tabel 2.4. Struktur Ekonomi Kabupaten Bone
Tahun 1996 – 2006 (%)**

KOMODITAS	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10. Pertanian	4,50	0,40	-5,23	67,74	5,48	65,02	58,65	58,50	56,92	56,17	56,33
11. Pertambangan/penggalian	9,88	10,52	-23,63	0,40	6,50	0,39	0,39	0,40	0,42	0,43	0,39
12. Industri pengolahan	9,86	6,81	0,99	6,87	-11,58	6,89	9,02	9,06	9,23	8,97	8,36
13. Listrik, gas, dan air	24,72	4,15	38,12	0,58	7,33	0,68	0,80	0,84	0,86	0,89	0,95
14. Bangunan	8,87	8,49	-14,19	3,17	2,99	3,19	3,86	3,77	3,95	3,98	4,20
15. Perdagangan	8,58	5,50	-4,12	8,78	3,91	8,26	8,45	8,53	8,73	8,54	7,93
16. Angkutan dan komunikasi	8,56	7,08	-6,74	3,34	5,15	4,20	4,66	4,67	4,96	4,93	4,68
17. Bank dan lembaga keuangan	8,8	5,03	-1,18	2,44	-26,33	2,83	3,52	4,07	4,49	4,90	4,49
18. Jasa – jasa	6,8	1,86	-13,2	6,67	1,80	8,54	10,66	10,16	10,39	11,19	12,17

(sumber data PDRB Kabupaten Bone 1999 - 2006)

Selain sektor pertanian, sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah adalah sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan dan masing – masing menyumbang 10,16 persen; 8,53 persen; 9,06 persen, (kondisi tahun 2003). Terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Bone. Sedangkan pertambangan dan penggalian pada tahun yang sama mempunyai kontribusi yang paling kecil.

Bila dicermati lebih dalam, maka selama kurun waktu 1996 – 2006 tampak bahwa sektor pertanian sejak tahun 1999 mengalami pergeseran menurun, dari 67,74 persen menjadi 58,50 persen. Hal ini wajar mengingat setiap tahunnya ada pergeseran lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Bila dibandingkan antara struktur ekonomi kabupaten bone dengan struktur ekonomi Sulawesi Selatan tampak sangat beda. Pada tahun 2002 misalnya, sektor primer yang meliputi sektor pertanian dan sektor pertambangan/penggalian terhadap perekonomian Kabupaten Bone memberikan kontribusi sekitar 64,73 persen. Dari sektor sekunder yang meliputi sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, dan sektor bangunan 10,41 persen. Sumbangan dan sektor – sektor terhadap perekonomian Kabupaten Bone masing – masing 24,86 persen.

4.4.5. PDRB Perkapita

Dengan berkembangnya perekonomian kabupaten bone dan melambatnya laju pertumbuhan penduduk akan berdampak pada peningkatan PDRB perkapita. Namun angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata – rata. Walaupun demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Setiap tahun PDRB Perkapita Kabupaten Bone mengalami peningkatan cukup pesat. Dalam lima tahun terakhir misalnya, dari 1.306.280 rupiah pada tahun 1996 menjadi 3.505.628 rupiah pada tahun 2006.

Bila dibandingkan dengan PDRB Sulawesi Selatan, PDRB perkapita Kabupaten Bone masih lebih rendah. Pada tahun 2003 misalnya, PDRB Sulawesi Selatan mencapai 5.343.024 rupiah, sementara PDRB perkapita Kabupaten Bone masih sekitar 3.156.907 rupiah.

Tabel 2.5. PDRB Perkapita Kabupaten Bone dan PDRB Perkapita Sulawesi Selatan, Tahun 1996 – 2006

Tahun	PDRB Perkapita Kabupaten Bone (Rupiah)	PDRB Perkapita Sulawesi Selatan (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1996	1.306.280	1.274.937
1997	1.335.978	1.314.788
1998	1.339.533	1.230.697
1999	2.795.944	1.251.233
2000	3.073.663	1.297.050
2001	3.502.163	4.510.560
2002	3.157.643	4.888.084
2003	3.156.907	5.343.024
2004	3.217.729	6.047.000
2005	3.325.439	6.943.006
2006	3.505.628	-

(sumber data PDRB Kabupaten Bone 1996 - 2006)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

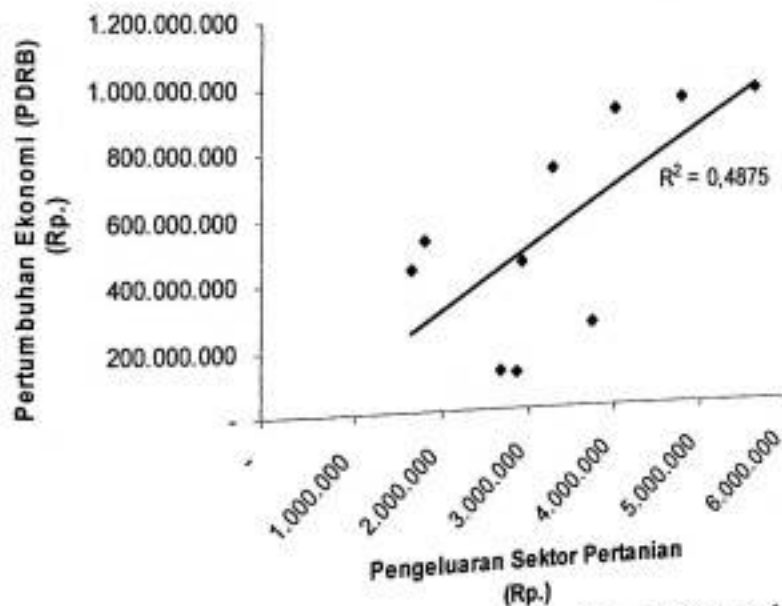
5.1. Hasil

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2), data yang diperoleh sebanyak 11 data dari tahun 1996 – 2006. Untuk investasi swasta (X_3) dan perkembangan pertumbuhan ekonomi (dengan indikator PDRB) (Y), data yang diperoleh sebanyak 11 data dari tahun 1996 – 2006. (Lampiran 1).

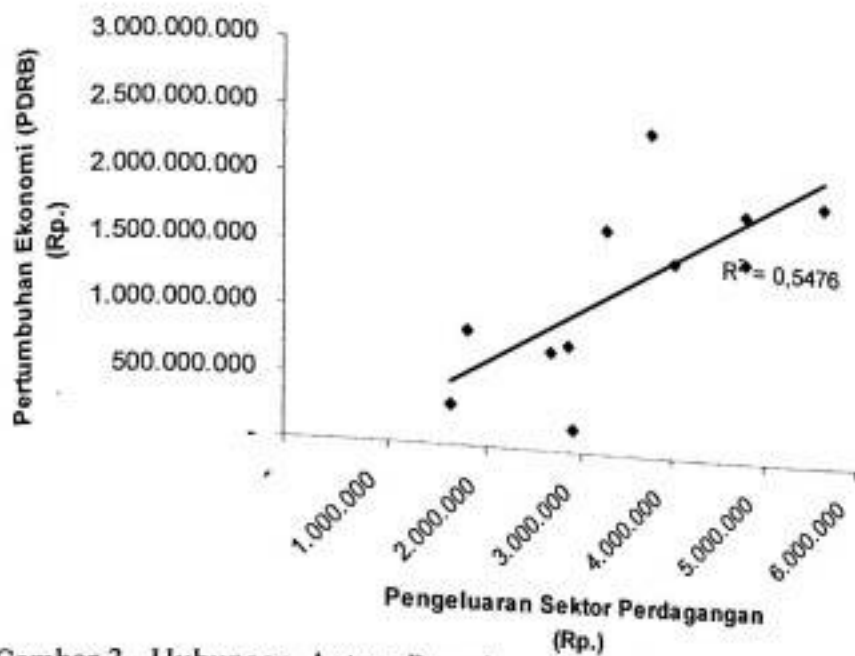
Analisis data (*Uji T*) untuk mengetahui signifikansi antara variabel bebas sektor pertanian (X_1), perdagangan (X_2) dan investasi swasta (X_3) terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi (PDRB) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) serta investasi swasta (X_3) signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) kabupaten Bone, ditunjukkan dengan nilai perbandingan antara $t\text{-stat}$ (3.069) > t tabel (2.365), nilai $p\text{-value}$ (0.018) < α (0.05) (Lampiran 2).

Hasil analisis data (*Uji F*) untuk mengetahui signifikansi antara variabel-variabel pengeluaran pemerintah (X_1, X_2) dan investasi swasta (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y), ditunjukkan dengan perbandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel sebesar (9.147) > (4.35) dengan nilai signifikansi F sebesar (0.008) < α (0.05) (Lampiran 2).

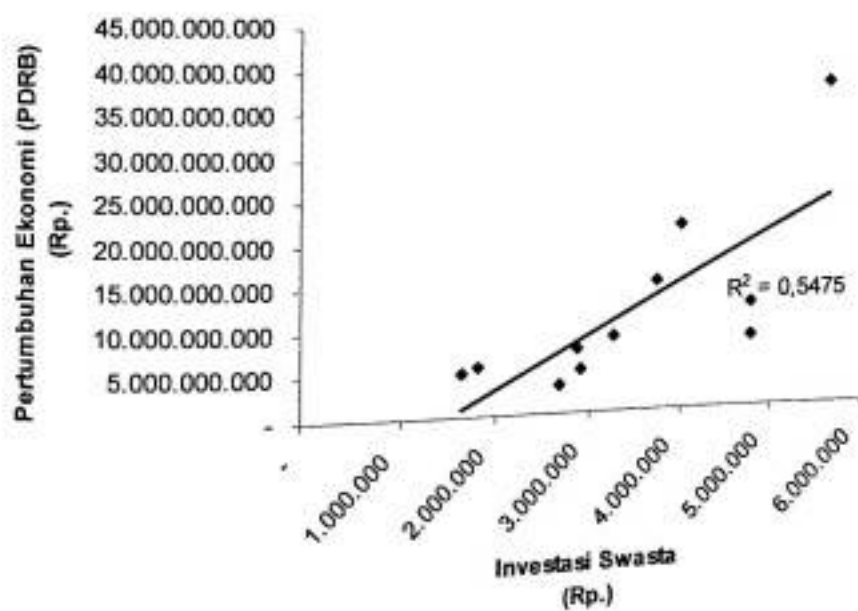
Berdasarkan perbandingan di atas, menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel bebas dalam hal ini pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) serta investasi swasta (X_3) signifikan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) Kabupaten Bone. Besaran nilai pengaruh pada sektor pertanian (X_1), perdagangan (X_2) dan investasi swasta (X_3) diketahui berdasarkan nilai R^2 sebesar (0.797) atau sebesar 80% dengan besaran nilai R^2 terkoreksi atau peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) dan investasi swasta (X_3) sebesar (0.71) atau sebesar 71%. (Gambar 1, 2 dan 3).



Gambar 2. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006.



Gambar 3. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006.



Gambar 4. Hubungan Antara Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006.

5.2. Pembahasan

5.2.1. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pertanian, Perdagangan dan Investasi Swasta terhadap PDRB

Hubungan yang ditunjukkan antara pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) serta investasi swasta (X_3) adalah hubungan yang linier positif yang ditunjukkan dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 150266122,1 + 0,89 (X_1) + 0,54 (X_2) + 0,552 (X_3)$$

(Lampiran 2)

Berdasarkan persamaan di atas, diketahui koefisien regresi sektor pertanian (X_1) (0,89), sektor perdagangan (X_2) (0,54) dan (0,552) untuk investasi swasta (X_3), menunjukkan bahwa peningkatan investasi swasta (X_3) sebesar (0,552) atau 55,2% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar satu satuan nilai. Hanya saja perubahan nilai investasi swasta (X_3) tidaklah sendirian, pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) akan mengalami perubahan sebesar 7% sejalan dengan perubahan investasi swasta (X_3). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh **Rachman (2001)** bahwa berdasarkan uji t statistik dan arah koefisien yang terbentuk dalam model diperoleh bahwa investasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dimana jika terjadi kenaikan sebesar 1 % akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000143%. Hal ini terjadi karena adanya dampak langsung terhadap peningkatan kinerja sektor produksi dan memperluas kesempatan kerja. Peningkatan investasi akan mendorong meningkatnya permintaan sumber-sumber produksi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Meningkatnya sumber produksi sumberdaya alam khususnya pada bidang pertanian akan meningkatkan kegiatan perdagangan terhadap komoditi sumberdaya alam atau hasil-hasil pertanian dan komoditas lainnya. Sehingga dengan adanya peningkatan investasi swasta akan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan perdagangan.

Sehingga ada ketergantungan investasi swasta (X_3) terhadap pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2). (Lampiran 2) Dengan demikian perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) bukan semata-mata sebagai akibat perubahan dari investasi swasta (X_3), akan tetapi juga merupakan pengaruh dari perubahan pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) dan sektor lainnya (e) secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan teori **Keynes** dalam model **multiplier Keynes** yang menyebutkan bahwa peningkatan jumlah investasi swasta akan memperluas output dan penggunaan tenaga kerja. Olehnya itu investasi merupakan salah satu bagian dari GNP, sehingga bila salah satu bagian mengalami peningkatan maka dengan sendirinya bagian yang lain juga akan mengalami peningkatan.

5.2.2. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pertanian, Perdagangan terhadap PDRB

Untuk analisis faktor pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) yang terpisah dengan faktor investasi swasta (X_3), diketahui bahwa nilai F (9,782) dengan nilai *signifikansi* F (0,007). Besaran nilai R^2 sebesar (0,710) atau sebesar 71% dengan R^2 *terkoreksi* sebesar (0,637) atau sebesar 64%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2)

mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar 71%, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) dapat dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) sebesar 64%. Artinya pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) juga dipengaruhi oleh nilai investasi swasta (X_3) sebesar 7%. (Lampiran 3).

Hasil analisis di atas memberikan informasi mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y), yang ditunjukkan oleh persamaan regresi berikut.

$$Y = 1330496 + 0,165 (X_1) + 0,087 (X_2) \quad \text{(Lampiran 3)}$$

Berdasarkan persamaan di atas, diketahui koefisien regresi (0,165) menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran sektor pertanian (X_1) sebesar satu satuan nilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar (0,165) satuan atau 16,5%. Hanya saja perubahan nilai sektor pertanian (X_1) tidaklah sendirian, pengeluaran pemerintah pada sektor perdagangan (X_2) akan mengalami perubahan sebesar 7% sejalan dengan perubahan investasi swasta (X_3). Sesuai dengan teori **Klasik** yang mengatakan bahwa investasi merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat dalam meningkatkan produksi. Selain itu pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah alat – alat modal dalam masyarakat dan apabila ini bertambah maka produksi dan pendapatan akan meningkat dengan demikian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

5.2.3. Hubungan Antara Investasi Swasta terhadap PDRB

Pada analisis yang dilakukan secara terpisah, pengaruh investasi swasta (X_3) terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) diketahui nilai F (10,888) dengan nilai *signifikansi F* (0.009). Besaran nilai R^2 sebesar (0,547) atau sebesar 55% dengan nilai R^2 *terkoreksi* sebesar (0,497) atau sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta (X_3) mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar 55%, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) dapat dijelaskan oleh investasi swasta (X_3) sebesar 50%. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 238085786,983 + 0,900 (X_3) \quad (\text{Lampiran 4})$$

Berdasarkan persamaan di atas, diketahui koefisien regresi (0,900) menunjukkan bahwa peningkatan investasi swasta (X_3) satu satuan nilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar (0,900) satuan atau sebesar 0,9%. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yonathan (2003) bahwa semakin besar investasi suatu negara akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Hanya saja perubahan nilai investasi swasta (X_3) tidaklah sendirian, pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) akan mengalami perubahan sebesar 7% sejalan dengan perubahan investasi swasta (X_3). Artinya investasi swasta dipengaruhi pula oleh sektor pertanian dan perdagangan, karena dari hasil analisis di atas menunjukkan adanya informasi yang hilang setelah dilakukan analisis secara terpisah dengan pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) sebesar

5%. Ada ketergantungan investasi swasta (X_3) terhadap pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) sebesar 5%.

Dengan demikian perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) bukan semata-mata sebagai akibat perubahan dari investasi swasta (X_3), akan tetapi juga merupakan pengaruh dari sektor pertanian (X_1) dan perdagangan (X_2) dan mungkin juga sektor lainnya (e) secara bersama-sama. Secara teoritis, perubahan peningkatan investasi swasta akan meningkatkan pertumbuhan pada sektor pertanian dan perdagangan. Dengan peningkatan pertumbuhan pada kedua sektor, maka dengan sendirinya PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan seiring peningkatan nilai investasi swasta, peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perdagangan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dari keseluruhan uraian mengenai analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bone maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel – variabel yang dianalisis menunjukkan hubungan yang linier positif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi F sebesar (0.008) atau 0.8% lebih kecil dari α (0.05) atau 5% dengan perbandingan (0.008 < 0.05) perbandingan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan sektor perdagangan serta investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone.(lampiran 2).
2. Daya ramal, atau daya prediksi (R^2) dari pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan sektor perdagangan serta investasi swasta sebesar (0.797) atau sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan serta investasi swasta sebesar 80%. Dengan besaran nilai R^2 terkoreksi atau peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan sektor perdagangan dan investasi swasta sebesar (0.71) atau sebesar 71%.(lampiran 2).

3. Pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan sektor perdagangan yang terpisah dengan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) diketahui tingkat nilai F (0.9782) dengan nilai signifikansi (0.007). besaran nilai R^2 sebesar (0.710) atau sebesar 71% dengan R^2 terkoreksi sebesar (0.637) atau sebesar 64%. Hal ini menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan sektor perdagangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar 71%. peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan sektor perdagangan sebesar 64%. Sisanya 7% dipengaruhi oleh investasi swasta.(lampiran 3).
4. Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pertanian sebesar satu atuan nilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar (0.165) satuan atau 16.5%.(lampiran 3). Sedangkan peningkatan pengeluaran pemerintah sektor perdagangan sebesar satu satuan nilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar (0.87) satuan atau sebesar 8.7%.(lampiran 3).
5. Peningkatan investasi swasta sebesar satu satuan nilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar (0.900) satuan atau sebesar 90%.(lampiran 4). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa investasi swasta berpengaruh lebih besar dibandingkan kedua sektor tersebut yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan. Tapi bukan berarti sektor pertanian dan sektor perdagangan tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) Kabupaten Bone, hanya saja berdasarkan analisis diperoleh t stat untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan lebih kecil dibandingkan investasi swasta.

6.2. Saran – saran

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDRB di Kabupaten Bone dimasa yang akan datang, maka ada beberapa hal yang perlu ditekankan yaitu :

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan prioritas pembiayaan pembangunan pada sektor publik dengan mendorong peningkatan investasi swasta, serta peningkatan alokasi anggaran pada sektor riil seperti sektor pertanian dan perdagangan dan sektor lainnya.
2. Dalam penelitian yang akan dilakukan pada pembiayaan sektor publik agar melihat faktor-faktor lainnya seperti sektor jasa, transportasi dan lain-lain, bukan hanya pada sektor pertanian dan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *BPS Kabupaten Bone 2000 - 2003*. Makassar. Sulawesi Selatan
- Boediono, 1998. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta. BPFE
- Basri, Zainal. Yuswan Subri Mulyadi, 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bose dan Haque. 2003. *Public Expenditure and Economic Growth; A Disaggregated Analysis for Developing Countries*. Journal of Applied Economics.
- Davey, K. J. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Djojohadikusumo, S. 1996. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta. LP3ES.
- Grossman, P. 1988. *Government and Economic Growth; A Non Linier Relationship*. Public Choice.
- Hyman, Priyatno dan Santoso, B. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Jhingan, L. M. 1994. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Jakarta. Rajawali Press.
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Informasi Keuangan Negara*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Rachman, Yolanda. 2001. *Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 1983 - 1998*. Makassar

Ram, Rati. 1986. *Government Size and Economic Growth; A New Framework and Some Empirical Evidence From Cross Sectional and Time Series Data*. American Economic Review.

Samboja, J. J. 1994. *Trend in Government Recurrent Expenditure; Lessons for the Future in Msambichaka L. Moshi, Hp. B - et al Development Challenges and Strategies for Tanzania an Agenda for the 21 Century*. Economic Research.

Samuelson dan Nordaus. 1986. *Ekonomi, Terjemahan Indonesia, Edisi Ke-12*. Jakarta. Erlangga.

Suparmoko, M. 1996. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi Ke-3*. Yogyakarta. BPFE.

Syafruddin, Akhmad. 2001. *Pengaruh Anggaran Pembangunan Terhadap Perkembangan Ekonomi Kota Waringin Barat*. Makassar.

Yonathan. 2003. *Analisis Vektor Auto Regression Terhadap Korelasi Antara Pendapatan Nasional dan Investasi Pemerintah di Indonesia. 1983/1984 - 1999/2000*. Jurnal Keuangan dan Moneter.

Lampiran 1. Data Umum Perkembangan Investasi Swasta, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 1996 - 2006.

Tahun	PDRB (Rp.)	Sektor Pertanian (Rp.)	Sektor Perdagangan (Rp.)	Investasi Swasta (Rp.)
1996	1.636.110	444.447.000	305.271.000	5.116.250.000
1997	1.800.206	531.990.000	885.401.500	5.785.115.000
1998	2.670.955	120.151.200	763.454.900	3.250.000.000
1999	2.911.953	460.775.000	171.426.000	4.990.250.000
2000	2.865.683	114.305.300	824.336.000	7.604.412.000
2001	3.265.189	750.000.000	1.755.223.000	8.937.498.000
2002	3.744.119	260.000.000	2.563.125.000	15.344.222.000
2003	4.005.830	940.228.200	1.550.830.750	21.895.172.000
2004	4.792.831	975.229.000	1.600.832.000	8.412.481.000
2005	4.792.831	975.920.200	1.975.959.000	12.475.664.000
2006	5.650.000	1.005.848.000	2.092.343.000	38.984.238.000

Lampiran 2. Hasil Analisis Pengaruh Perkembangan Investasi Swasta, Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PRDB) Kabupaten Bone Tahun 1996 - 2006.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893 ^a	.797	.710	68,419,386.311

a. Predictors: (Constant), INVESTASI, PERDAGANGAN, PERTANIAN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	128458636009323800	3	42819545336441270	9.147	.008 ^a
	Residual	32768486962443460.0	7	4681212423206200.0		
	Total	161227122971767200	10			

a. Predictors: (Constant), INVESTASI, PERDAGANGAN, PERTANIAN

b. Dependent Variable: PDRB

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.5E+08	48960225.861		3.069	.018
	PERTANIAN	.089	.083	.245	1.083	.315
	PERDAGANGAN	.054	.037	.330	1.470	.185
	INVESTASI	.552	.319	.458	1.731	.127

a. Dependent Variable: PDRB

Lampiran 3. Hasil Analisis Pengaruh Perkembangan Sektor Pertanian dan Perdagangan terhadap PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) Tahun 1996 – 2006.

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842(a)	.710	.637	76480576.568

a Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	114432894234486 100.000	2	57216447117243 000.000	9.782	.007(a)
	Residual	467942287372811 00.000	8	58492785921601 30.000		
	Total	161227122971767 200.000	10			

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13304959 9.994	53587501. 135		2.483	.038
	X1	.165	.078	.454	2.114	.067
	X2	.087	.035	.531	2.475	.038

a Dependent Variable: Y

Lampiran 4. Hasil Analisis Pengaruh Perkembangan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bone Tahun 1996 – 2006.

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3(a)		Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740(a)	.547	.497	90036502.546

a Predictors: (Constant), X3

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	882679768556009 00.000	1	882679768556 00900.000	10.888	.009(a)
	Residual	729591461161663 00.000	9	810657179068 5140.000		
	Total	161227122971787 200.000	10			

a Predictors: (Constant), X3
b Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	238085786.9 83	42663483.81 0		5.581	.000
	X3	.900	.273	.740	3.300	.009

a Dependent Variable: Y

Lampiran 5. Tabel Nilai Distribusi F (Uji F = 5%)

df	1	2	3	4	5	6	7	-
1	161.000	200.00	216.00	225.00	230.00	234.00	237.00	239.00
2	18.50	19.00	19.20	19.20	19.30	19.30	19.40	19.40
3	10.1	9.55	9.28	9.12	8.94	8.94	8.89	8.85
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.16	6.16	6.09	6.04
5	6.61	5.79	5.41	5.19	4.25	4.95	4.88	4.82
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.28	4.28	4.21	4.15
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07
11	4.81	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	3.95
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70
-	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64

Lampiran 6. Tabel Nilai Distribusi t (Uji t)

Df	t 0,10	t 0,05	t 0,025	t 0,01	t 0,005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.376	3.741	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.343	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.165
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.005
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.150	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
Inf	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878

**PENGARUH INVESTASI MELALUI PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KESEMPATAN KERJA
DI MAKASSAR PERIODE 1995-2005**



**OLEH :
ALBAINATUL JANNAH
A111 02 023**

*Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar*

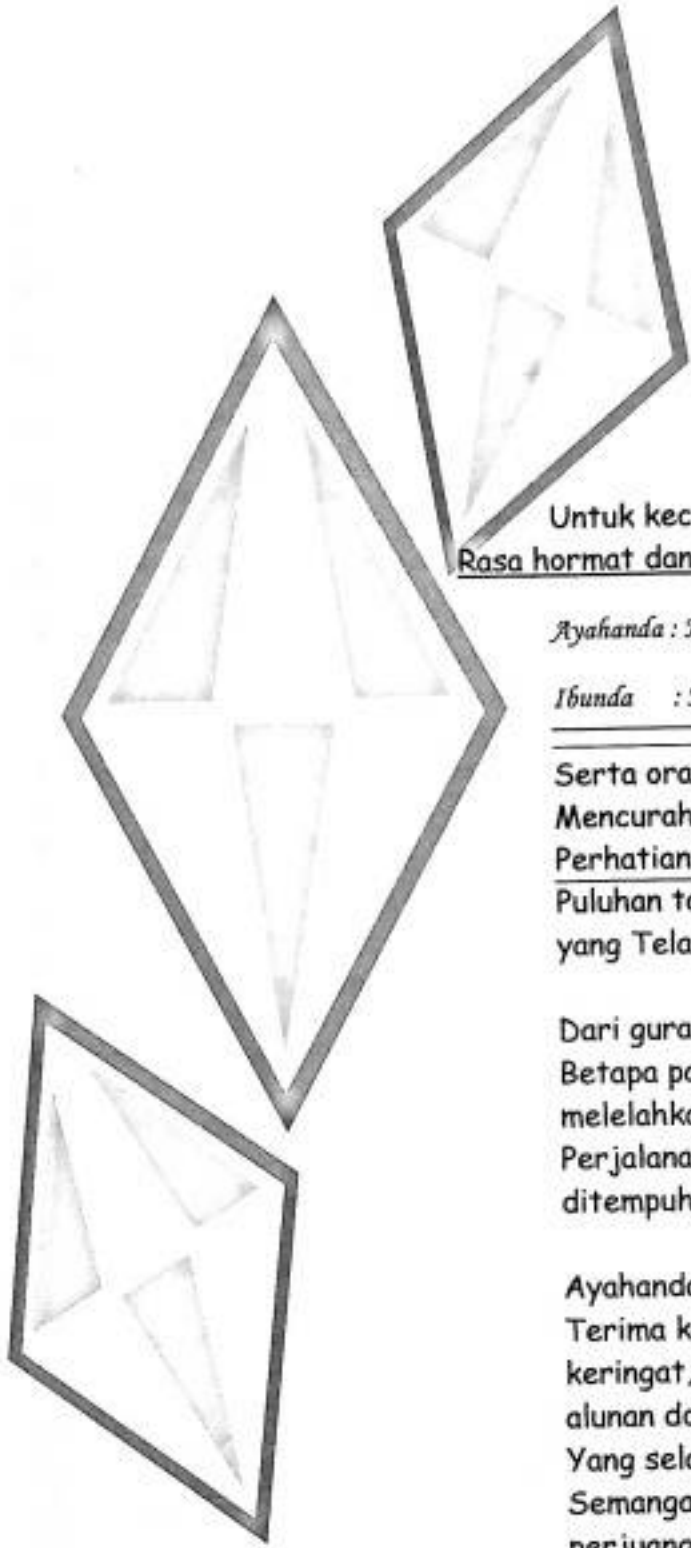
Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. H. Madris DPS, M.S
NIP : 131 803 208

Pembimbing II

Dra. Hj. Sri Undai Nurbayani, M.Si
NIP : 131 961 604



Untuk kecintaan, kekaguman serta
Rasa hormat dan terima kasihku

Ayahanda : H. Usman Sulaiman, S.pd

Ibunda : Hj. Ma'ani

Serta orang-orang yang selalu
Mencurahkan cinta kasih dan
Perhatiannya.....

Puluhan tahun perjalanan hidup
yang Telah terlalui.....

Dari guratan wajah dapat terbaca
Betapa panjang dan
melelahkan.....
Perjalanan yang telah
ditempuh.....

Ayahanda dan Ibunda
Terima kasih dengan cucuran
keringat, Lantunan nasihat dan
alunan doa-doamu,
Yang selalu ditiupkan kepada kami,
Semangat telapak-telapak
perjuangan mu.....
Mendapat ridho Allah dan tidak
tersia-sikan oleh kami
.....anak-anakmu!

KATA PENGANTAR
Bismillahi Rahmanir Rahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala yang telah membuat semuanya menjadi ada dan berfungsi, baik itu atas nikmat kesehatan, petunjuk, semangat dan apapun itu, serta salawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dan segenap keluarga-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penulisan skripsi dengan judul **"Pengaruh Investasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Di Makassar Periode 1995-2005"**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak melibatkan berbagai pihak yang memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung, berupa pikiran serta petunjuk-petunjuk sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, diantaranya:

1. Bapak **Dr.H. Madris DPS, M.si** dan Ibu **Dra. Hj.Sri Undai Nurbayani, M.Si** selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya yang sangat membantu dan besar manfaatnya bagi penulis dalam penulisan skripsi.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unhas dan Bapak **Drs. H. Muh. Toaha, MBA** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Unhas.

3. Ibu **Dr. Hj. Rahmatia, MA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Unhas dan Bapak **Drs. Hamrullah, M.Si** selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Unhas.
4. Bapak **Drs. H. Abdul Madjid Sallatu M.Si** selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam semua kegiatan akademik selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah membimbing dan membekali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi Unhas yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan maupun dalam proses peyelesaian skripsi ini, khususnya **Pa'Amri n Pa'Parman** (makasih buanyaaak atas semuanya), **Pa'Ical, Pa'Iwan, Pa'Malik, Pa'Jamal, Pa'Udin, Ibu Sri, Ibu Arni, Ibu Susi** dan **Pa'Ruri** (makasi atas semuaaa bantuannya).
7. Buat teman-teman SP'02 terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya semua selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Dan penulis berharap, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya dan memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Amin...

Makassar, juli 2007

ALBAINATUL JANNAH

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk Kedua Orang Tua_ku :

Ibundaku Tercinta Hj. Maani, yang selalu memberiku kasih sayang yang tak terhingga, memberiku semangat, dorongan, dan selalu mendoakan penulis. Ibunda yang mengandungku selama 9 bulan dan melahirkan dengan berurai air mata, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih dan cinta, hanya Allah yang bisa membalas semua itu..(I love you so much Mama)

Ayahandaku Tercinta H. Usman sulaiman S.pd yang senantiasa memberiku semangat, dorongan, dan selalu mendoakan penulis. untuk menjadi contoh yang baik bagi adik-adikku, selalu ada dan mengiringi langkahku ke jalan yang benar, dan engkau akan selalu menjadi idolaku..Semoga Allah Membalas Semuanya Aminn..

Sembah sujud Anakda untuk Ibundaku dan Ayahandaku..

Buat kakakku tercinta, syahrul iman selamat udah dapat kerja, ingat-ingat kami ya? Penerus_penerusku: Al-Muslih (Rajin_ko selalu pergi kuliah), Abdul Hakim(kakak doa'kan deh! mudah-mudahan lulus jadi tentara), buat Raodatul jannah yang selalu memberi kakak support dan doa("Tetap rajin_rajin belajar agar dapat lulus sekolah chayoo"). Aya Tullah H. (rajin_rajin belajar ya! Biar dapat bersaing dan menjadi yan terbaik di antara teman_temanmu).

Nene' Tersayangku.. Makasih atas kasih sayang n doanya untuk penulis n makasih juga subsidinya..

Teman SP ' 02 diantaranya:

Yang Co_wo'x: Sul (Anil) sbg ketua sukunya ana' 02, Edo, Bibie, Rendra, Ikkal, Rijal, Aksar, Dedi, n pokokx semua ana" SP 02 tanpa terkecuali...(SEMANGAT KAWAN)

Yang Ce_we'x: Mila, Eka, Sari, Nina, Astrid, Eran, Enno, Lina, Uli, Mia, Ime, Ida...(KALIAN BISA...)

Teman_Teman Terbaikku...Waty, Salma (akhirnya kita telah melaluinya, walaupun harus dengan berlinang air mata kawan..panggilka kalo ada lowongan), Baba n Alimin (makasih atas semuanya cez, tidak akan kulupa jasmu..Ok Bro),

Para Sarjana_Sarjana : Ita, Rehana, Ratu, Wawa, Ani_Risnal, Mama Uswa, Vera, Aya', Iccank, Githo, Daniel, Unga', Yayang, Anis, Kaisar, Litha, Riri, Idawati, Herlin, Rini, Golden, Tia, Yohanes, Shinta, Bunga, Puput, Dila, Mia, None, Baba, Alimin, Opik, Dayat, Herman, Fika, Bahtiar, Uni(akhinya aku menyusul kalian)

Agry, Herni, Kiki F, Kiki H, Wiria, Fattah, Yoszet, Imanuel, Serli, Omo, Teguh, Septi, Salma, Wati, Cindy, Runggang, Fatma, Ishak...(Sarjana miki' Cezzzt...)

Juju...(keindahan itu mungkin tidak datang sekarang pada mu, mungkin esok' sabar miki cezzz....).

K'fadilah...(sabar K' semuanya pasti terlewati dengan selalu berusaha n berdoa).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.4. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Investasi	7
2.1.1. Pengertian Investasi	7
2.1.2. Teori-Teori Investasi	10
2.2. Pertumbuhan Ekonomi	13
2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	14
2.2.2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi	21
2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	25
2.4. Kesempatan Kerja.....	27

2.5. Teori Tentang Hubungan Antara Investasi, PDRB Dan Kesempatan Kerja.....	31
2.6. Penelitian Terdahulu/Studi Empirik.....	33
2.7. Kerangka Konsepsional.....	34
2.8. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Lokasi Penelitian	37
3.2. Jenis Data dan Sumber Data	37
3.3. Metode Analisis.....	37
3.4. Batasan Variabel	39
BAB IV GAMBARAN UMUM	40
4.1. Demografis Sosial	40
4.3. Ekonomi	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1. Perkembangan Investasi PMDN Dan PMA	45
5.2. Perkembangan PDRB Kota Makassar	47
5.3. Kesempatan Kerja Kota Makassar	51
5.4. Pengaruh Investasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Makassar.....	53
BAB VI PENUTUP	57
6.1. Kesimpulan	57
6.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

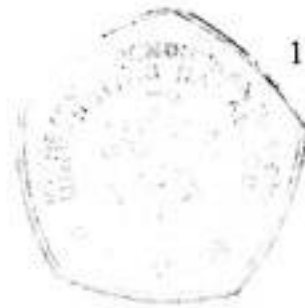
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penduduk Kota Makassar Menurut Umur Tahun 2000-2005.....	40
Tabel 4.2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar Tahun 2000-2005.....	42
Tabel 5.1	Investasi (PMDN & PMA) yang disetujui di Kota Makassar tahun 1995- 2005	45
Tabel 5.2	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar atas dasar harga konstan 1993 Tahun 1995-2005	48
Tabel 5.3	Kesempatan Kerja Menurut Sektor Di Kota Makassar Tahun 1995-2005 (Ribu Orang).....	50
Tabel 5.4	Hasil Estimasi Model Pengaruh Investasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Marginal Efficiency Of Investment	12
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir	34

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Masalah pertumbuhan ekonomi dewasa ini menjadi tujuan utama setiap Negara, khususnya Negara-negara sedang berkembang, karena pertumbuhan ekonomi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara.

Akan tetapi persoalan yang kerapnya dialami oleh beberapa Negara berkembang adalah pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu memberikan dampak terhadap penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mampu menyelesaikan masalah pengangguran tiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Konsekwensi dari pertumbuhan jumlah penduduk adalah meningkatnya jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan jumlah penduduk ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kelahiran, teknologi dalam dunia kedokteran yang semakin maju yang menyebabkan tingkat kematian menurun, serta adanya migrasi neto.

Fenomena di atas merupakan konsekwensi dari strategi kebijakan pembangunan ekonomi Negara-negara berkembang salah satu doktrin utama dalam literatur ekonomi yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi hanya dapat dicapai melalui kegiatan akumulasi modal dan industrialisasi. Dengan mengkonsentrasikan seluruh kekuatan dibidang pembangunan sektor industri modern untuk mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri serta menyerap kelebihan tenaga kerja dipasaran, maka Negara-negara berkembang dapat mencapai swasembada ekonomi dengan cepat. Kebijakan tersebut mengakibatkan pesatnya pertumbuhan

ekonomi pusat-pusat kota karena meningkatnya arus urbanisasi penduduk dari desa yang mencari pekerjaan di kota.

Sangat disayangkan bahwa perkiraan yang optimis tentang kemampuan sektor industri modern untuk menyediakan kesempatan kerja dalam jumlah yang besar merupakan kegagalan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia ketiga yang mengkonsentrasikan pembangunannya pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga masalah penduduk masalah utama khususnya mengenai tingkat pengangguran yang tinggi.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2005 tercatat sekitar 105 802 372 orang. Mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan jumlahnya sekitar 94 948 118 orang. Hal ini berarti terdapat sekitar 10 854 254 orang yang masih menganggur (Statistik Indonesia, BPS: 2005). Sedangkan di Makassar angkatan kerja sekitar 480.692 orang dan mereka yang mencari kerja sebesar 91.537 orang. Berarti terdapat sekitar 19,04 persen yang masih menganggur (Susenas, BPS: 2005). Adanya kelebihan angkatan kerja ini menjadi momentum untuk memacu kegiatan ekonomi karena merupakan faktor produksi yang mampu mendorong dan menambah produksi jika disertai dengan produktifitas yang tinggi. Penyebab utama pengangguran adalah akibat ketidakberhasilan penyerapan tenaga kerja di sektor industri yang dipandang paling potensial dalam penyerapan tenaga kerja, karena kecenderungan investasi di sektor industri lebih berat pada investasi padat modal.

Sementara investasi padat modal cenderung menggunakan teknologi tinggi yang biasanya dibutuhkan tenaga kerja dengan syarat pendidikan yang lebih tinggi,

sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke bawah.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pembangunan sektor industri modern yang hanya memaksimalkan tingkat pertumbuhan GDP, akan tetapi lebih penting adalah penciptaan lapangan kerja melalui usaha mendorong industri padat karya di sektor pertanian dan industri kecil yang lebih dikenal dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi diperlukan pemupukan sumber pembiayaan dana pembangunan dan kemampuan pengelolaannya oleh pemerintah maupun pihak swasta. Dalam hal ini penanaman modal (investasi) merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi suatu Negara untuk mewujudkan kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi Makassar berdasarkan perhitungan atas dasar harga konstan tahun 1993 PDRB Makassar pada tahun 1995 tercatat sebesar Rp 2.372.094,37 juta. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 1995 mengalami kenaikan yang cukup berarti dibandingkan pada tahun 1994 yaitu sebesar Rp 214.394,93 juta atau sekitar 9,62%. Sedangkan pada tahun 1996 PDRB Makassar tercatat sebesar Rp 2.627.849,36 juta. Pertumbuhan PDRB pada tahun 1997 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 1996 yaitu sebesar Rp 181.847,18 juta atau sekitar 6,92%. Dan tahun 1998 masih mengalami penurunan sebesar -7,82%. Pertumbuhan PDRB Makassar mulai mengalami peningkatan pada tahun 1999 sebesar 4,17%, demikian pula pada tahun 2000 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08% (BPS: 2000).

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Makassar selama periode tahun 2000-2005 mencapai rata-rata 8,09 persen per tahun. Namun demikian rata-rata pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan yang cukup signifikan periode tahun 2004 sebesar 10,24% yang disebabkan oleh besarnya andil sub-sektor perbankan. Pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya relatif stabil, yaitu 7,30% pada tahun 2001, kemudian menurun menjadi 7,14% pada tahun 2002, dan selanjutnya pada tahun 2003 tumbuh sebesar 8,60%. Sementara di tahun 2005 pertumbuhannya hanya 7,16%, atau lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan tahun 2004. meski demikian kondisi tersebut merupakan suatu hal penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi stabilnya perekonomian kota Makassar untuk masa yang akan datang (BPS:2005).

Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi Makassar dapat dikatakan mengalami penurunan, maka merupakan hal penting bagi pemerintah daerah Makassar dalam usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya yang menyangkut masalah ketenagakerjaan yaitu bagaimana menyediakan kesempatan kerja yang cukup bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul **“PENGARUH INVESTASI, MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI MAKASSAR PERIODE 1995-2005”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana gambaran singkat pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah seberapa besar Investasi berpengaruh terhadap Kesempatan Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar Periode 1995-2005.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Investasi, berpengaruh terhadap Kesempatan Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar Periode 1995-2005.

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

- a. sebagai bahan perbandingan serta bahan pustaka bagi setiap pihak yang membutuhkan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Makassar dan daerah-daerah lain dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

1.4. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini sistematika pembahasan terdiri dari :

- Bab I.** Pendahuluan berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan serta Sistematika Pembahasan.
- Bab II.** Tinjauan Pustaka berisi landasan Teori-Teori, Investasi, Pertumbuhan ekonomi dan PDRB, Kesempatan Kerja, Teori tentang hubungan

Investasi, Melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja, Studi Empiris, dan Hipotesis.

- Bab III.** Metode Penelitian berisi, Kerangka Konseptual, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Analisis serta Batasan Variabel.
- Bab IV.** Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- Bab V.** Hasil dan Pembahasan Penelitian
- Bab VI.** Kesimpulan dan Saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Investasi

Pembentukan modal adalah mutlak diperlukan dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, karena sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan agar produksi (output) nasional dapat ditingkatkan maupun untuk perluasan kesempatan kerja. Investasi merupakan dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan diharapkan akan memberikan hasil berupa balas jasa dan modal dimasa yang akan datang, investasi merupakan variabel yang sangat tidak stabil, yang dalam hal ini selalu berfluktuasi (Gardner, 1983). Hal ini disebabkan karena investasi tidak saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti politik, sosial, budaya dan lain sebagainya.

2.1.1 Pengertian Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa depan (Sukirno, 1999).

Sejalan dengan itu, Kaum Klasik berpendapat bahwa investasi atau pembentukan modal merupakan suatu pengeluaran yang akan menambah kesanggupan masyarakat untuk menambah produksi. Bagi kaum Klasik, investasi adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam

masyarakat, kalau kesanggupan itu bertambah maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan ekonomi akan tercipta (Sukirno, 1996).

Uraian di atas memberikan indikasi bahwa investasi merupakan pendorong dalam pembangunan ekonomi, sebab dengan adanya investasi maka usaha produksi dapat dilakukan secara teknis, dan kualitas barang dan jasa dapat dipertahankan. Dengan demikian, investasi mempunyai fungsi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Adapun pengeluaran-pengeluaran investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan mencakup, yaitu:

- a) Pengeluaran untuk membeli bahan baku/material, mesin-mesin dan peralatan pabrik, serta semua modal lain yang diperlukan dalam proses produksi.
- b) Pengeluaran untuk keperluan bangunan kantor, pabrik, tempat tinggal karyawan dan bangunan/konstruksi lainnya.
- c) Perubahan nilai stock atau barang cadangan sebagai akibat perubahan jumlah dan harga.

Jadi jumlah dari seluruh pengeluaran yang disebutkan di atas dinamakan Investasi Bruto. Untuk mendapatkan Investasi Neto maka Investasi Bruto tersebut harus dikurangi dengan penyusutan (depresiasi), yaitu pengurangan nilai stock kapital karena digunakan dalam proses produksi (Deliarnov, 1995).

Jika dilihat dari ruang lingkupnya, maka investasi (penanaman modal) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

- a) Penanaman modal dalam negeri terdiri dari penanaman modal dalam negeri pemerintah adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan atau BUMN atau penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan swasta, atas nama lembaga pemerintah. Sedangkan penanaman modal dalam negeri swasta adalah investasi yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha swasta domestik.
- b) Penanaman modal asing terdiri dari atas penanaman modal asing swasta, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta (bukan Pemerintah) di Negara selain asal pemilik modal serta penanaman modal asing pemerintah/nasional yaitu penanaman modal dari suatu Negara kenegara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal (Dernburg, 1994).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di satu pihak, ia mencerminkan permintaan efektif, dan dipihak lain ia menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Penanaman modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Pembentukan atau penanaman modal dalam negeri (investasi) ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang pada gilirannya membawa kearah spesialisasi dan penghematan produksi skala luas. Penanaman modal membantu penyediaan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga buruh yang semakin meningkat. Penyediaan *overhead* ekonomi dan sosial seperti pengangkutan, sumber tenaga, pendidikan dan sebagainya di nagara bersangkutan dimungkinkan

melalui penanaman modal juga. Penanaman modal ini pula membawa kearah pengalihan sumberdaya alam industrialisasi, dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

Jadi PMDN menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran, serta membuat perekonomian bebas dari utang luar negeri (Jhingan, 1994).

Oleh karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan investasi perlu digalakan baik pemerintah, melalui penyertaan modal dan melalui penciptaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi peningkatan investasi maupun oleh pihak swasta.

2.1.2 Teori-Teori Investasi

Masalah investasi adalah masalah yang langsung berhubungan dengan besarnya harapan akan pendapatan yang akan diperoleh dari barang modal dimasa depan. Harapan akan pendapatan merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan besarnya investasi (Dernburg, 1994). Berikut ini dibahas beberapa aliran teori mengenai investasi.

1. Teori Klasik

Menurut teori Klasik, investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan sehingga pendapatan ekonomi dapat tercapai. Investasi juga sebagai sarana dan



motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi (output). Sejalan dengan pendapat para ahli ekonomi kaum Klasik juga menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Maka dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan.

2. Teori Neo Klasik

Teori Neo Kasik tentang investasi pada pokoknya berdasarkan pada teori produktifitas marjinal dari faktor teori modal. Menurut teori besarnya modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktifitas marjinal dibandingkan dengan tingkat biaya. Suatu investasi akan dijalankan apabila pendapatan investasi lebih besar dari tingkat bunga, dan investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan jika biaya sewa ditambah bunga lebih kecil dari pada hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut. Dengan demikian menurut teori ini ada tiga unsur yang harus diperhitungkan dalam menentukan investasi, yaitu (1) tingkat biaya barang modal (2) tingkat bunga (3) tingginya pendapatan yang akan diterima. Perubahan dari salah satu faktor tersebut akan mengakibatkan perubahan dalam perhitungan profitabilitas.

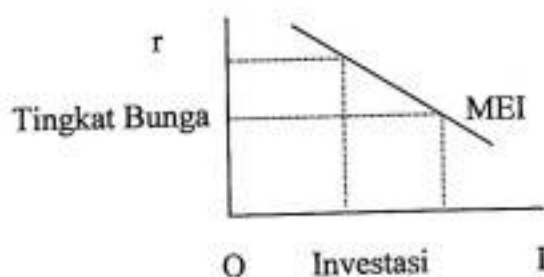
3. Teori Keynes

Masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi bagi Keynes didasarkan atas konsep keuntungan yang akan diharapkan dari investasi atau *Marginal Efficiency Of Investment* (MEI). Maksudnya bahwa investasi tersebut akan dijalankan bilamana MEI masih lebih tinggi dari pada tingkat bunga.

Secara garis besar maka MEI itu dapat digambarkan sebagai suatu skedul yang menurun. Skedul ini menggambarkan jumlah investasi yang akan terlaksana pada setiap tingkat bunga. Menurut Keynes MEI ini antara lain disebabkan oleh:

- Bahwa semakin banyak jumlah investasi yang terlaksana dalam masyarakat, maka makin rendahnya MEI. Sebab semakin banyak investasi yang terlaksana dalam berbagai lapangan ekonomi maka menjadi semakin tinggilah persaingan antara investor sehingga MEI itu menurun.
- Bahwa semakin banyak investasi dilakukan maka ongkos dari biaya barang modal menjadi lebih tinggi. Dari grafik ini dapat dinyatakan semakin rendah tingkat bunga, semakin banyaklah investasi yang akan dijalankan, begitu pula sebaliknya.

Gambar 2.1. Marginal Efficiency of Investment



Sumber: Sobri, 1987: Ekonomi Makro.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian laju pertumbuhan yang cukup tinggi dan perluasan kesempatan kerja merupakan hal penting cukup fundamental bagi pembangunan yang berkelanjutan, dimana pembangunan ekonomi adalah merupakan suatu proses kegiatan investasi yang diarahkan kepada perubahan struktur dan keserasian keterkaitan antara sektor guna mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di suatu Negara atau daerah dalam jangka panjang (Panetto, 2001).

Sedangkan menurut Nanga (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebagai peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam produksi barang-barang dan jasa-jasa. Menurut definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya beliau ini memandang pertumbuhan ekonomi sebagai suatu perubahan yang bersifat kuantitatif, yang tentunya diukur dengan menggunakan gross domestik produk (GDP).

Selanjutnya menurut Boediano (1986) memberikan batasan tentang pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Disini dapat kita lihat bahwa definisi tersebut menekankan pada tiga aspek yakni: proses, output perkapita, jangka panjang. Jadi perekonomian itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu adanya kenaikan output perkapita berarti ada dua sisi yang dipandang yaitu output dan jumlah penduduk. Jadi output total (GDP) yang ada dibagi dengan jumlah penduduk dalam perekonomian tersebut. Sementara aspek ketiga dapat menunjukkan bahwa suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka

waktu yang cukup lama seperti rentang waktu 10, 20, dan 30 tahun dan bahkan mungkin lebih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perekonomian dikatakan bertumbuh bilamana perekonomian tersebut telah menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kemampuan Negara untuk menyediakan sejumlah besar barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh penduduknya dengan menggunakan teknologi yang maju dalam jangka panjang. Karena kemungkinan saja sebuah perekonomian akan mengalami peningkatan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa dalam tempo satu tahun, namun kemudian setahun berikutnya mengalami penurunan dalam tingkat output.

2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan, sebab tanpa pertumbuhan tidak terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktifitas, dan distribusi pendapatan. Disamping itu pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya.

Pembangunan yang terlaksana dalam perubahan-perubahan yang terencana pada berbagai aspek kehidupan bangsa dengan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta kelembagaan yang tersedia, pada hakekatnya tidak lain untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu tentu saja dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Sehingga pada dasarnya yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah semua usaha yang dimaksud untuk meningkatkan pendapatan nyata perkapita penduduk suatu negara dalam jangka waktu yang singkat. Jika pandangan pembangunan ini didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maka tampak cenderung pembangunan itu dipandang sebagai suatu masalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Kedua definisi ini pada hakekatnya adalah sama yaitu menitik beratkan pada peningkatan pendapatan nyata perkapita. Berarti pada umumnya perkembangan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi pula. (Jhingan 1994),

a. Adam Smith

Dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry Into The Nature And Cause Of The Wealth Of Nations*", Adam Smith mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi tercermin dalam pertumbuhan output. Pertumbuhan output ditentukan oleh pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pertumbuhan output ditentukan oleh tiga faktor:

a) Sumber alam yang tersedia (faktor produksi tanah).

Sumber alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan ekonomi artinya selama sumber ini masih tersedia maka output akan terus meningkat dan pertumbuhan dapat terjadi.

b) Sumber-sumber manusiawi (jumlah penduduk).

Dalam proses pertumbuhan output unsure jumlah penduduk mempunyai peranan pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat tersebut.

c) Stok barang kapital yang ada.

Stok barang kapital yang ada secara aktif menentukan tingkat output, dalam hal ini adam smith menggambarkan dalam spesialisasi dan pembagian kerja. Karena dalam stok kapital mempunyai dua pengaruh terhadap tingkat output: yang pertama, adalah pengaruh langsung dimana adanya penambahan stok kapital yang diikuti dengan penambahan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap output. Kedua, adalah pengaruh tidak langsung, dimana peningkatan produktifitas perkapita akan terjadi melalui spesialisasi dan pembagian kerja.

Aspek kedua dari pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Dimana smith melihat bahwa penduduk akan meningkat apabila tingkat upah berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah subsistem, yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk seseorang agar bisa dipertahankan hidupnya.

b. David Ricardo

Dalam bukunya yang berjudul *the principles of political and taxation*. Bahwa faktor alam sebagai faktor pembatas dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya alam mempunyai keterbatasan sedang penduduk berkembang secara pesat. Sehingga pada akhirnya jumlah penduduk semakin banyak dan sumberdaya alam sangat terbatas. Akibatnya, tingkat perkembangan perekonomian sangat rendah dan tidak berkembang dan pendapatan pekerja hanya untuk sekedar hidup.

Ricardo mengatakan dengan terbatasnya tanah, maka pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja akan menghasilkan produk marginal yang semakin menurun atau *the law of diminishing return*, yaitu apabila salah satu input tetap, sedangkan yang lainnya bertambah penggunaannya maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input variabel tersebut, mula-mula mengalami kenaikan, akan tetapi kemudian seterusnya menurun, apabila input variabel tersebut ditambah.

Selanjutnya Ricardo mengatakan, kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja maupun produktivitas kapital. Ini berarti apabila kemajuan teknologi cukup cepat, maka akibat dari *the law of diminishing return* bisa dihambat atau dinetralisir.

c. Robert Sollow-Swan

Sejalan dengan teori yang dipaparkannya oleh Smit juga seperti yang dijelaskan oleh Sollow yang merupakan salah satu aliran dari neo klasik yang juga menyatakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah: 1) Akumulasi kapital, 2) pertumbuhan tenaga kerja (penduduk), 3) kecenderungan menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang kemudian semua tabungan masyarakat tersebut diinvestasikan, 4) produktivitas atau perubahan teknologi. Sehingga dengan terpenuhinya kondisi tersebut didalam perekonomian akan diharapkan dalam jangka panjang untuk mencapai peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Mencermati kedua teori pertumbuhan ekonomi tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, adalah pandangan yang menfokuskan pada peranan modal manusia. Kaitan antara human capital dan pertumbuhan dapat dilihat dari dua arah, disatu pihak dengan semakin majunya suatu perekonomian, maka

semakin banyak yang akan menginvestasikan dalam manusia, adalah mulai dari perbaikan gizi, pendidikan dan pelatihan. Di lain pihak dengan semakin sehat dan semakin tingginya tingkat keahlian yang dimiliki tenaga kerja, akan membuat semakin produktif yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan standar hidup. *Kedua*, adalah pandangan yang menekankan pentingnya inovasi teknologi oleh perusahaan-perusahaan swasta sebagai suatu pertumbuhan produktivitas. Sehingga diperlukan adanya inovasi teknologi dengan memulai berbagai program penelitian dan pengembangan. Tentu saja kedua kondisi ini saling berinteraksi dalam menentukan besarnya tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai.

d. Schumpeter

Berbeda dengan ekonom klasik sebelumnya, Schumpeter optimis bahwa dalam jangka panjang taraf hidup dapat ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi.

Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya adalah para wiraswasta atau inovator. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterangkan dengan adanya inovasi oleh para wiraswasta. Ada tiga pengaruh munculnya inovasi oleh para inovator : 1) munculnya teknologi baru, 2) munculnya keuntungan lebih, 3) munculnya proses imitasi.

Teori ini juga menyoroti satu faktor fundamental yang merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, yaitu sangat langkanya calon-calon inovator dan belum adanya lingkungan yang menunjang inovasi.

Schumpeter percaya bahwa pertumbuhan ekonomi melalui jalur kapitalis akhirnya akan membawa kemakmuran bagi rakyat banyak tanpa perlu campur tangan pemerintah. Pemerintah cukup menyediakan lingkungan yang menunjang inovasi, dan sistem ekonomi itu sendiri akhirnya akan membawa kemakmuran yang cukup merata.

Melihat perkembangan secara teoritik teori pertumbuhan ekonomi, kaum klasik mengandalkan sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dalam kegiatan produksi masyarakat, sehingga kaum klasik berkesimpulan bahwa suatu saat akan terjadi kemandekan pertumbuhan dimana sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini tergantung pada pertumbuhan dalam penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Sebab perekonomian akan mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan tetap digunakan sepenuhnya dari masa ke masa. Hal ini pada dasarnya memberikan asumsi bahwa modal yang kuat dapat digunakan untuk investasi dalam hal pertumbuhan/peningkatan penawaran faktor-faktor produksi dan penggunaan teknologi modern akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyerap banyak tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan mendorong peningkatan pendapatan nasional agar tercipta *full employment*.

Perluasan kesempatan kerja akan meningkatkan produksi sehingga dapat meratakan pendapatan dan partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan. Oleh karena itu salah satu tolak ukur menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara yang sementara ini kurang mendapat perhatian menurut Suharsono (1986), adalah

kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh adanya investasi yang berkembang disetiap daerah dan akan mendorong pembangunan.

Sejalan dengan pendapat Okun dalam Raharja dan Manurung (2001) bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dimana dinyatakan tingkat pengangguran yang minimal (4% pertahun) akan tercapai bila seluruh kapasitas produksi terpakai, Okun menformulasikan bahwa bila tingkat output (Q) dan kesempatan kerja (L) serta hubungan proposionalnya dilambangkan dengan (C) : sehingga dapat dinyatakan sebagai :

$$L = CQ \quad (2.1)$$

$$\delta L / \delta Q = C \quad (2.2)$$

berdasarkan persamaan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa untuk menambah kesempatan kerja, output (PDRB) harus bertumbuh, sebab setiap unit pertambahan output akan menambah kesempatan kerja (N) sebanyak (C) unit. Makin besar nilai C, maka jumlah kesempatan kerja yang tersedia akibat bertambahnya satu unit output akan makin besar. Namun besar kecilnya nilai C sangat tergantung pada teknik produksi (tingkat teknologi) yang digunakan dan tingkat efisiensinya. Bilamana teknik produksi yang padat karya cenderung memperbesar nilai C. Sebaiknya dengan teknik produksi yang padat modal.

Besarnya tingkat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesempatan kerja dapat diketahui dengan melihat kebesarannya tingkat elastisitasnya. Dimana angka pada elastisitas kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan berapa persen kesempatan kerja akan bertambah, untuk setiap 1 % pertumbuhan ekonomi.

Masalah kesempatan kerja, merupakan masalah yang timbul karena terdapat berbagai ketidakseimbangan perekonomian nasional. Masalah kesempatan kerja muncul sebagai akibat laju pertumbuhan angkatan kerja yang belum mampu diimbangi oleh kemajuan laju pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja.

2.2.2 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi.

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut dibawah ini.

1. Sumber daya Alam

Di Negara Sedang Berkembang (NSB) sumberdaya alam sering terbengkalai kurang atau salah pemanfaatan. Inilah salah satu penyebab keterbelakangan itu. Tersedianya sumberdaya alam secara melimpah saja belumlah cukup bagi pertumbuhan ekonomi. Apa yang diperlukan ialah pemanfaatannya secara tepat. Jika sumberdaya alam yang ada tidak dipergunakan secara tepat, negara itu tidak mungkin mengalami kemajuan.

Jadi dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup, yang penting adalah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi di pertinggi dan sumberdaya alam dapat

dipergunakan dalam jangka waktu lebih lama.

2. Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal. Pembentukan modal dalam ungkapan Prof. Nurkse "makna pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian dari padanya. Untuk pembuatan barang modal, alat-alat perlengkapan dan perlengkapan mesin-mesin fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya".

3. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal dan membantu meningkatkan produktifitasnya. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis, fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik dari penelitian baru perubahan pada teknologi telah menaikkan produktifitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain.

5. Pembagian kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari pada sebelumnya, ia menghemat waktu, akhirnya produksi meningkatkan berbagai hak. Akan tetapi, pembagian kerja tergantung dari luas pasar. Luas pasar sebaliknya tergantung pada kemajuan ekonomi yaitu seberapa jauh perkembangan permintaan, tingkat produksi pada umumnya, sarana transportasi dan sebagainya. Jika skala produksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan meluas pula. Alhasil, jika produksi naik, laju pertumbuhan ekonomi akan melesat.

b. Faktor Non Ekonomi.

Faktor non ekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Dalam pernyataan, faktor non ekonomi pada umumnya seperti organisasi sosial, budaya, dan politik mempengaruhi faktor ekonomi yang dibicarakan diatas. Oleh karena itu faktor non ekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor non ekonomi tersebut adalah antara lain:

1. Faktor Sosial

Kalau perkembangan ekonomi diinginkan berjalan mulus, pandangan nilai dan lembaga-lembaga sosial harus diubah. Perubahan hanya mungkin terjadi hanya melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, apabila tatanan sosial dipengaruhi oleh sistem kasta yang ketat dan sistem famili

bersama, kebebasan individu dan mobilitas profesi akan sangat rendah. Sebagai akibatnya, orang tidak terdorong untuk bekerja lebih keras, mendapat lebih banyak, dan menabung lebih gencar. Oleh karena itu, bagi pembangunan harus ada masyarakat yang bebas dengan kelas menengah yang kuat yang mampu meningkatkan pendapatan melalui perdagangan dan perniagaan. Kedua faktor inilah yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi modern di negara maju.

2. Faktor Manusia

Persyaratan yang paling penting bagi laju pertumbuhan industri ialah manusia. Manusia yang bersedia menyambut baik tantangan perubahan ekonomi dan menerima kesempatan yang ada di dalamnya. Manusia diatas segalanya yang berdedikasi terhadap pembangunan ekonomi negerinya, dan terhadap kejujuran, kewibawaan, pengetahuan, dan prestasi kerja.

3. Faktor Politik dan Administratif.

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Lewis, dengan tepat melihat "tindakan pemerintah memainkan peranan penting dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi". Keterlibatan stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan semakin besar kebebasan itu, semakin berhasil pula kewiraswastaan tersebut. Kemajuan teknologi mobilitas faktor dan pasar yang luas membantu merangsang usaha dan inisiatif.



2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian adalah dengan melihat nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu (BPS, 2005).

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu:

- Segi produksi, PDRB merupakan jumlah neto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta *non-profit*, investasi serta ekspor neto (ekspor dikurangi impor) biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Dalam penyajiannya PDRB selalu dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. Adapun definisi dari pembagian PDRB ini adalah sebagai berikut:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- b. PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena nilai PDRB atas dasar harga konstan ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besarnya perekonomian suatu daerah.

Dalam perhitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air Minum
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Angkutan dan Komunikasi
8. Bank dan Lembaga Non Bank
9. Jasa-jasa

2.4. Kesempatan Kerja

Masalah kesempatan kerja merupakan salah satu masalah pokok yang di hadapi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan dan lowongan kerja yang tercipta untuk diisi melalui suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan kerja yang sudah diisi dengan semua lowongan pekerjaan yang belum diisi.

Kesempatan kerja, merupakan terjemahan dari kata *employment*, oleh kementrian perburuhan tahun 1975 di terjemahkan dalam pengertian yang memiliki dua unsur yaitu *employment* dan *employment opportunity*.

Employment yaitu lapangan kerja yang sudah diduduki atau orang-orang yang sedang mempunyai pekerjaan. Sedangkan *employment opportunity* yaitu lapangan kerja yang sudah diduduki (penggunaan tenaga kerja) dan yang masih lowongan kerja yang belum diduduki (Suroto,1986).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja itu adalah banyaknya orang yang bekerja pada suatu lapangan kerja atau dengan kata lain sama dengan jumlah orang yang terserap pada berbagai sektor ekonomi.

Menurut Said (1986) gambaran mengenai kesempatan kerja adalah sebagai berikut:

“Dengan menggunakan data sensus penduduk, jumlah penduduk yang bekerja biasanya dipandang mencerminkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Dalam pengertian ini, kesempatan kerja bukanlah lapangan kerja yang masih terbuka. Walaupun komponen terakhir ini akan menambah kesempatan kerja yang ada dalam waktu yang akan datang. Memang mungkin pada suatu waktu lapangan pekerjaan

yang masih terbuka cukup banyak, sementara jumlah pencari kerja (penganggur) banyak pula”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja ditunjukkan oleh jumlah orang-orang yang bekerja. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dalam asumsi bahwa dalam situasi perekonomian yang mengalami surplus tenaga kerja, maka kesempatan kerja akan tercermin dalam jumlah orang yang terserap dalam proses kegiatan ekonomi.

Tingginya kesempatan kerja akan berpengaruh terhadap pencapaian ekonomi dari suatu Negara. Alasannya, kegiatan ekonomi masyarakat ditunjukkan dengan kinerja produksi masyarakat yang biasanya dicerminkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan untuk daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara makro laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang tinggi atau yang lebih luas.

Selanjutnya, yang menjadi faktor dominan dalam pengawasan kesempatan kerja, yaitu sebagai salah satu sasaran pemerataan pembangunan sekaligus berfungsi untuk menciptakan ketahanan nasional serta partisipasi aktif masyarakat umumnya, khususnya generasi muda dan wanita dalam memikul beban, tanggung jawab serta hak untuk menikmati kembali hasil pembangunan. Tidak terlepas dari faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya, seperti kondisi ekonomi sosial budaya, politik dan lain-lain.

Masalah lapangan pekerjaan memang merupakan masalah yang berat dan kompleks, bukan hanya saja di Indonesia tetapi juga di banyak Negara lain, termasuk Negara maju yang dewasa ini bergulat dengan problema serupa, tidak sedikit sektor swasta maupun pemerintah yang telah tidak mampu lagi menerima tenaga kerja baru. Malah tidak sedikit sektor swasta yang mengurangi tenaga kerjanya (PHK) keadaan memprihatinkan ini terutama tidak terlepas akibat resesi yang berkempanjangan tetapi suatu kenyataan pula jenis lapangan kerja baru juga semakin bertambah, praktek perkembangan teknologi, spesialisasi maupun globalisasi. Dilain pihak, ada pula bidang-bidang pekerjaan yang tahap demi tahap dan akan terhapus dari peta lapangan kerja.

Walaupun demikian, bertambahnya jenis dan jumlah lapangan kerja tersebut sering kalah cepat dengan laju pertumbuhan tersebut, inilah yang menjadi penyebab pengangguran, sebab lainnya, jenis serta jumlah lapangan kerja yang sebenarnya masih terbuka, tidak diisi oleh pencari kerja yang ada, akibatnya kurang kemampuan pihak pencari kerja yang mengisi lowongan tersebut.

Pemecahan masalah kesempatan kerja dapat ditempuh antara lain dengan cara penciptaan lapangan kerja produktif dan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi di berbagai sektor yang di sertai dengan usaha peningkatan produktifitas tenaga kerja yang ada. Salah satu strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja produktif adalah dengan membina perusahaan kecil dan menengah untuk menerapkan teknik produksi yang sifatnya padat karya sehingga dapat membantu proses distribusi pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Persoalan kesempatan kerja berawal dari tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkatan pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah usia kerja (tenaga Kerja) dan angkatan kerja.

Definisi yang digunakan oleh BPS untuk tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang sudah mencapai usia kerja (sepuluh tahun keatas) atau mereka yang mempunyai potensi untuk memproduksi barang dan jasa bila ada permintaan terhadap mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sedangkan menurut Djojohadikusumo (1994) golongan yang dianggap sebagai angkatan kerja dalam masyarakat negara berkembang ialah mereka yang termasuk tingkatan usia 15-65 tahun.

Suroto mendefinisikan angkatan kerja adalah bagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai pekerjaan tetapi secara aktif dan pasif mencari pekerjaan.

Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Kata mampu disini dapat dijelaskan melalui tiga hal: Pertama, mampu fisik, yaitu cukup umur dan jasmani cukup kuat dan tidak mempunyai cacat badan yang menghilangkan untuk melakukan pekerjaan. Kedua, mampu mental, yaitu mempunyai mental sehat. Ketiga, mampu secara yuridis, yaitu cukup mampu dan tidak kehilangan kebebasan pribadi untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya.

Dengan demikian angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dari kegiatan produktif. Karena itu yang sudah bekerja dan belum bekerja tetap berusaha mencari pekerjaan dinamakan

angkatan kerja. Angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan dan sedang mencari kerja dinamakan pengangguran.

2.5. Teori Tentang Hubungan Antara Investasi, Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam upaya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), dimana investasi mempunyai dua peranan penting dalam permintaan agregat, yaitu: pertama, investasi merupakan komponen yang cukup besar dan berubah-ubah sehingga fluktuasi dapat menyebabkan terjadinya "resesi dan boom". Dengan demikian, perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya berakibat juga kepada output dan penggunaan tenaga kerja. Kedua, investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah (stock) modal, sedangkan investasi menghimpun akumulasi modal. Dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna, output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Sejalan dengan itu, Kaum Klasik berpendapat bahwa investasi atau pembentuk modal akan mempertinggi alat-alat modal dalam masyarakat, apabila itu bertambah berarti produksi dan pendapatan nasional akan meningkat sehingga perkembangan ekonomi akan terjadi. Sementara itu, Harrod-Domar (Jhingan, 1994) memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi, yaitu: pertama, ia

menciptakan pendapatan (dampak permintaan). Kedua, ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stock modal (dampak penawaran). Karena itu, selama investasi neto tetap berlangsung pendapatan riil dan output akan senantiasa meningkat. Jadi apabila kesempatan kerja hendak dipertahankan dalam jangka panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar.

Sedangkan menurut Keynes bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat pengeluaran seluruh masyarakat. Oleh karena itu, jika volume investasi yang diperlukan tidak terpenuhi maka permintaan agregat akan turun lebih rendah dari pada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut terjembatani. Jadi perubahan antara pekerjaan dan pendapatan sebagian besar akan tergantung pada investasi, sedangkan volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Kenaikkan investasi akan menyebabkan kenaikan pekerjaan, akan tetapi ini akan bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan mengkonsumsi turun. Tetapi sebaliknya kesempatan kerja tanpa kenaikan investasi (Jhingan, 1994).

Kenaikkan investasi akan menyebabkan peningkatan pendapatan, dan karena pendapatan meningkat muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan pendapatan dan pekerjaan. Jika kecenderungan mengkonsumsi menurun berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis tinggi guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian.

Uraian di atas memberikan indikasi bahwa investasi merupakan pegerak dalam pembangunan ekonomi sebab dengan adanya investasi maka usaha produksi dapat dilakukan secara teknis sehingga dapat meningkatkan output (PDRB) dan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan investasi perlu untuk digalakkan baik oleh pemerintah, melalui penyertaan modalnya dan melalui penciptaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi peningkatan investasi, maupun oleh pihak swasta.

2.6. Penelitian Terdahulu/Studi Empiris

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel yang diteliti oleh penulis sekarang, yaitu:

1. Abdul Rasyid (2002) melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan dan pengaruh secara positif dan signifikan, secara parsial jumlah tenaga kerja mempunyai pengaruh dan hubungan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi dalam membentuk PDRB Kalimantan Timur. Investasi mempunyai hubungan yaitu sebesar 51,8% dengan asumsi variabel tenaga kerja tidak mengalami perubahan, secara menyeluruh hubungan antara investasi dan jumlah tenaga kerja yaitu sebesar 84,5% dalam menentukan PDRB Kalimantan Timur. Begitu pula halnya dengan uji statistik baik melalui uji t maupun uji f, menunjukkan angka yang signifikan dengan tingkat korelasi sebesar 84,5%.

2. Hasriani (2004) melakukan suatu penelitian yang berjudul "pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di propinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitiannya berdasarkan hasil uji regresi sederhana 2SLS. Maka diperoleh bahwa investasi swasta melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan setiap kenaikan investasi swasta melalui pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% dan jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 0,103% penyerapan masih terlalu kecil dibandingkan lapangan kerja yang ada. Sedangkan pengeluaran pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dalam rangka penyerapan tenaga kerja yaitu meningkat sebesar 1% maka jumlah kesempatan kerja meningkat 0,173%. Tingkat pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun berpengaruh secara nyata terhadap perluasan kesempatan kerja. Perkembangan kesempatan kerja tahun 1993-2002 sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, hal ini masih bersifat agraris namun dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

2.7 kerangka konseptual

Pembangunan ekonomi merupakan penentu maju mundurnya tingkat kegiatan masyarakat dalam produksi barang dan jasa. Selain itu jumlah penduduk yang meningkat sebagai salah satu faktor produksi yang turut berperan dalam pembangunan dapat menjadi sumberdaya yang bermanfaat untuk meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi disisi lain bila pertumbuhan penduduk

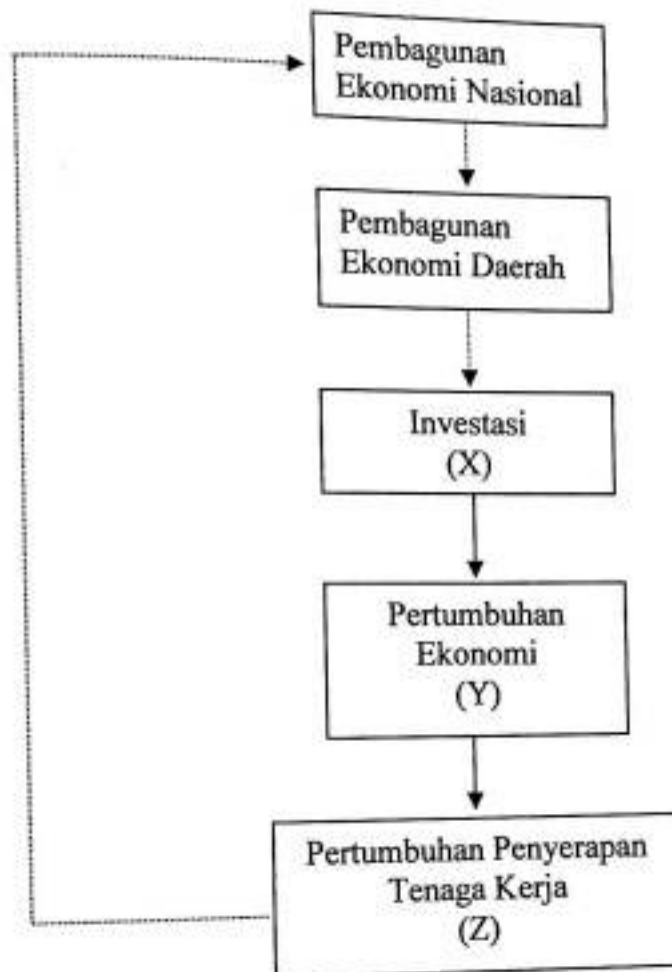
yang cepat tanpa diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja, maka akan meningkatkan jumlah pengangguran yang dapat menciptakan ketimpangan sosial.

Tercapainya tujuan pembangunan di suatu negara secara umum ditentukan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Salah satu prasyarat ekonomi yang harus dipenuhi dalam pembangunan nasional yaitu dengan melakukan pengembangan modal (investasi) yang dapat dipenuhi melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Pentingnya investasi dalam suatu perekonomian negara berkembang dikarenakan kegiatan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja melalui pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses produksi. Keynes menyatakan bahwa investasi atau pembentukan modal akan mempertinggi alat-alat modal dalam masyarakat, apabila itu bertambah berarti produksi dan pendapatan nasional akan meningkat sehingga perkembangan ekonomi akan terjadi.

Dari uraian di atas yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar : 2.2
Bagan kerangka pikir:



Dari kerangka pikir tersebut, terlihat bahwa baik variabel (X, Y) akan berpengaruh terhadap variabel (Z).

2.8 Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalahan di atas yang telah dikemukakan:

“Diduga, bahwa Investasi, melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Makassar” periode 1995-2005.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini lokasi penelitian dilakukan di Makassar yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar dan Propinsi Sulawesi Selatan maupun instansi lain yang terkait.

3.2. Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam pembahasan ini, digunakan data sekunder yang terdiri dari data-data: investasi (PMDN & PMA), data PDRB, data pertumbuhan ekonomi dan data kesempatan kerja serta data-data luas wilayah, jumlah pertumbuhan dan kepadatan penduduk kota Makassar. Dan data-data tersebut bersumber atau yang diperoleh dari: BPS Propinsi Sulawesi Selatan, BPS Kota Makassar.

3.3. Metode Analisis

Model regresi yang digunakan adalah model analisis regresi sederhana 2SLS (Two Stage Least Square) atau metode dua tahap. Model analisis ini digunakan karena investasi tidak berpengaruh langsung terhadap kesempatan kerja, tetapi harus melalui peningkatan atau pertumbuhan PDRB yang dapat dilihat melalui persamaan sebagai berikut:

$$Y = f(X) \dots\dots\dots(3.1)$$

$$Z = f(Y) \dots\dots\dots(3.2)$$

Dimana: Z = Kesempatan kerja diukur dengan jumlah orang yang bekerja

X = Nilai Investasi

Y = Nilai PDRB estimasi atas dasar harga konstan tahun 1993

Untuk menunjukkan pengaruh investasi terhadap PDRB, maka digunakan

Persamaan sebagai berikut:

$$Y = f(X)$$

$$Y = \alpha_0 X^{\alpha_1} \cdot e^{\mu} \dots\dots\dots(3.3)$$

Untuk menduga besarnya pengaruh investasi terhadap PDRB maka model tersebut dilinearakan dengan menggunakan logaritma natural, sehingga menjadi:

$$\ln Y = \ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X + \mu_1 \dots\dots\dots(3.4)$$

Kemudian model fungsi kedua yang menunjukkan pengaruh PDRB terhadap kesempatan kerja, adalah sebagai berikut:

$$Z = f(Y)$$

$$Z = \beta_0 \cdot Y^{\beta_1} \cdot e^{\mu_2} \dots\dots\dots(3.5)$$

Selanjutnya model fungsi tersebut dilinearakan secara sederhana, yaitu:

$$\ln Z = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln Y + \mu_2 \dots\dots\dots(3.6)$$

Melalui model fungsi (3.6) ini dapat dilihat besarnya pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja di Makassar melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh besarnya PDRB.

Untuk kepentingan tersebut, dilakukan dengan cara mensubstitusikan persamaan (3.4) ke dalam persamaan (3.6) sehingga menjadi persamaan:

$$\ln Z = \ln \beta_0 + \beta_1 (\ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X) + \mu_2 \dots\dots\dots(3.7)$$

$$\ln Z = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln \alpha_0 + \beta_1 \alpha_1 \ln X + \mu_2$$

$$\ln Z = \ln \lambda_0 + \lambda_1 \ln X + \mu_2 \dots\dots\dots(3.8)$$

Dimana: $\ln \lambda_0 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln \alpha_0$ adalah konstan

$$\lambda_1 = \beta_1 \alpha_1$$

$$\mu = \text{Error Term}$$

Berdasarkan model di atas maka untuk menguji tingkat signifikannya dilakukan pengujian nilai statistik sebagai berikut:

- Uji statistik "t" untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat pada tingkat signifikan tertentu
- Uji statistik F adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan pada tingkat signifikan tertentu.

3.4. Batasan Variabel

Dalam pembuktian hipotesis ada beberapa variabel yang digunakan yaitu:

- a. Produk domestik regional bruto adalah merupakan nilai dari seluruh tambahan barang dan jasa yang diproduksi/dihasilkan di Makassar pada periode tertentu yang berdasarkan harga konstan.
- b. Investasi adalah jumlah atau berdasarkan nilai investasi (PMDN dan PMA) yang disetujui oleh pemerintah Makassar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dari tahun 1995-2005.
- c. Penyerapan kesempatan kerja, yaitu jumlah tenaga kerja yang terserap oleh kegiatan ekonomi.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Demografi Sosial

Penduduk kota Makassar pada tahun 2000, berdasarkan hasil sensus penduduk 2000 sekitar 1.100.019 jiwa. Dari estimasi hasil Survei Sosial Ekonomi di tahun 2005, penduduk kota Makassar meningkat menjadi sekitar 1.193.434 jiwa. Dan pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2000-2005 terhitung rata-rata mencapai 1,54% per tahun.

Keadaan geografis yang tercermin dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kota Makassar makin memasuki kondisi sebagai kota metropolitan. seiring dengan pertumbuhan penduduk, merujuk pada luas wilayah kota Makassar, kepadatan penduduk di tahun 2005 telah mencapai 6.790 jiwa per kilometer persegi. Nampak beberapa wilayah menunjukkan telah memasuki kondisi jenuh untuk dapat menambah jumlah penduduknya. Pola sebaran penduduk semakin berkembang melebar, menjauhi pusat kota, mengarah ke arah timur dan utara kota Makassar, seiring dengan pengembangan wilayah.

Disamping mengalami pertumbuhan, komposisi dan struktur penduduk juga mengalami perubahan. Jumlah perempuan cenderung meningkat dibanding laki-laki. Rasio jenis kelamin di tahun 2000 sebesar 97,16 berubah menjadi 95,37 di tahun 2005. kemudian dilihat menurut kelompok umur produktif, nampak terjadi peningkatan proporsi usia belum produktif (0-14) dan usia tidak produktif lagi (65+) yang mengakibatkan meningkatnya angka beban tanggungan dari 45 jiwa pada tahun 2000 menjadi 48 jiwa di tahun 2005.

Tabel 4.1
Penduduk Kota Makassar Menurut Umur
Tahun 2000-2005



Kelompok Umur	2000		2005	
	Jumlah penduduk	Rasio jenis kelamin	Jumlah penduduk	Rasio jenis kelamin
0-14	314.756	103,52	348.263	111,45
15-64	755.464	95,39	805.258	89,94
65+	29.799	79,25	39.913	79,76
Jumlah	1.100.019	97,16	1.193.434	95,37

Sumber: BPS Kota Makassar

4.2. Ekonomi

Potret potensi ekonomi Kota Makassar secara keseluruhan sedikitnya dapat dirujuk dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB kota Makassar pada tahun 2000 terhitung sebesar 7.114 trilyun rupiah. Dan berdasarkan harga konstan tahun 2000, untuk tahun 2005 PDRB terhitung meningkat menjadi 10.493 trilyun rupiah, atau tumbuh dengan rata-rata 8,08 persen pertahun selama periode tersebut.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB), pendapatan per kapita sebagai salah satu indikator kesejahteraan juga mengalami peningkatan pada tahun 2000 pendapatan per kapita penduduk kota Makassar mencapai 5,413 juta rupiah per tahun, dan di tahun 2005 meningkat menjadi 7,597 juta rupiah atau meningkat 7,01 persen per tahun.

Tabel 4.2
PDRB atas harga berlaku dan harga konstan, pertumbuhan ekonomi,
dan penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha
kota Makassar 2000-2005

Lapangan Usaha	PDRB 2005		Penduduk Yang Bekerja 2005	
	ADHB (Milyar)	ADHK (Milyar)	Jiwa	(%)
1. Pertanian	177,43	99,58	9.731	2,50
2. Pertambangan & Penggalian	2,09	1,29	383	0,10
3. Industri Pengolahan	3.756,08	2.472,23	42.179	10,84
4. Listrik, Gas & Air Minum	36,56	209,92	3.830	0,98
5. Bangunan	1.194,44	815,83	33.085	8,50
6. Perdagangan, Rest & Hotel	4.531,62	2.983,76	149.762	38,48
7. Angkutan & Komunikasi	2.519,88	1.361,32	40.598	10,44
8. Bank & Lembaga Keuangan	1.515,96	1.032,94	9.958	2,56
9. Jasa-Jasa	1.710,14	1.200,17	99.629	25,60
Jumlah	15.744,19	10.492,54	389.155	10,00

Sumber: BPS Kota Makassar

Struktur ekonomi Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2000-2005 masih didominasi oleh sektor perdagangan dan sektor industri, masing-masing memiliki kontribusi di tahun 2005 sebesar 28,78 persen dan 23,86 persen. Sektor lainnya yang memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB adalah sektor angkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa, masing-masing dengan 16,01 persen dan 10,86 persen.

Selaras pada struktur ekonominya, penduduk Kota Makassar sebagian besar juga memiliki mata pencaharian atau bekerja pada sektor-sektor andalan tersebut. Penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan mencapai 38,48 persen, kemudian sektor industri 10,84 persen, sektor angkutan dan komunikasi 10,44 persen serta sektor jasa sebanyak 25,60 persen.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Perkembangan Investasi (PMDN dan PMA)

Pembentukan modal adalah mutlak diperlukan dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, karena sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan agar produksi (output) nasional dapat ditingkatkan maupun untuk perluasan kesempatan kerja. Investasi merupakan dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan diharapkan akan memberikan hasil berupa balas jasa dan modal dimasa yang akan datang, investasi merupakan variabel yang sangat tidak stabil, yang dalam hal ini selalu berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena investasi tidak saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti politik, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Untuk melihat perkembangan total investasi di Makassar yang nampak pada tabel 5.1 nilai investasi pada tahun 1995-1998 mengalami terus kenaikan, pada tahun 1995 total investasi sebesar Rp 280.089,00 juta. Pada tahun 1996 investasi meningkat menjadi Rp 497.606,00 juta, dan pada tahun 1997 investasi sekitar Rp 518.641,65 juta, sampai pada tahun 1998 investasi terus meningkat yaitu sebesar Rp 2.238.960,00 juta. Namun peningkatan tersebut terjadi pada PMA sedangkan pada PMDN hanya terjadi sampai pada tahun 1997, peningkatan tersebut lebih banyak disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan pihak investor sebagai akibat pergantian rezim pemerintahan. Setelah mengalami peningkatan beberapa tahun secara berturut-turut, pada tahun 1999 total nilai investasi menurun menjadi Rp 719.909,50 juta dan pada tahun 2000 investasi turun drastis yaitu sebesar Rp 549.444,90 juta, dan

penurunan ini terjadi pada kedua investasi yaitu PMDN dan PMA. Penurunan investasi tersebut disebabkan oleh terjadinya krisis yang pada akhirnya kurang para investor yang mau menanamkan modalnya baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel.5.1
Investasi (PMDN dan PMA) yang disetujui di Kota Makassar
tahun 1995-2005

Investasi	Investasi			Pertumbuhan (%)	
	1995	2000	2005	1995-2000	2000-2005
PMDN	229.807,00	499.842,90	679.987,00	5,35	1,39
PMA	50.282,00	49.602,00	609.030,00	12,42	16,44
Jumlah	280.089,00	549.444,90	1.289.017,00	17,77	17,83

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kota Makassar
Badan Pusat Statistik (indikator ekonomi beberapa edisi)

Pada tahun berikutnya yaitu 2001 mengalami peningkatan yang relatif tinggi yaitu total investasi sebesar Rp 1.688.713,90 juta dimana kedua sektor yakni PMDN dan PMA mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2002 total investasi meningkat sebesar Rp 17.481,1 juta. Hal yang sama terjadi pada tahun 2003 dimana total investasi meningkat sebesar Rp 236.583 juta. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang mendorong bank-bank untuk melakukan konsolidasi dalam kegiatan operasional dan ekspansi pemberian kredit serta tingkat bunga yang relatif tinggi.

Pada tahun 2004 hingga 2005 investasi PMDN masih terus menurun, namun investasi pada sektor PMA mengalami peningkatan pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 174.586.591 juta. Dimana PMDN maupun PMA ini yang paling banyak atau dominan menggunakan dana adalah sektor industri dibandingkan sektor-sektor lain, hal ini menunjukkan bahwa sektor industri terus dipacu untuk menghasilkan devisa

yang lebih banyak, sehingga ketergantungan terhadap devisa yang bersumber dari minyak sedikit demi sedikit akan berkurang.

Rata-rata pertumbuhan investasi PMDN pada tahun atau periode 1995-2000 sekitar 5,35 persen, dan pada periode 2000-2005 sekitar 12,42 persen berarti pertumbuhan investasi PMDN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan investasi PMA pada tahun 1995-2000 sekitar 1,39 persen, dan pada tahun 2000-2005 naik yaitu sekitar 16,44 persen artinya pertumbuhan investasi (PMA) mengalami peningkatan atau adanya perubahan. Namun selama periode 2000-2005 ini, investasi (PMDN & PMA) mengalami peningkatan yang disebabkan oleh banyaknya para investor yang menanamkan modalnya dan hal ini merupakan pembangkit untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam periode berikutnya dengan tenggang waktu yang berbeda-beda sesuai dengan sifat investasi apa yang dilakukan.

5.2. Perkembangan PDRB Kota Makassar 1995-2005

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 1993. Perkembangan PDRB Kota Makassar atas dasar harga konstan pada tahun 1993 mengalami peningkatan dari tahun 1995-2005. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. PDRB Kota Makassar pada tahun 1995 sebesar 2.728.084,00 dimana PDRB Makassar ini terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 1998 turun drastis tetapi pada tahun 1999 mulai pulih kembali dan pada tahun 2004 bahkan naik sebesar 10,24% yang disebabkan oleh subsektor perbankan.

Pada tabel 5.2 diperlihatkan sektor-sektor ekonomi Kota Makassar yang mengalami pertumbuhan positif. Akibat dari pertumbuhan yang positif ini, maka kontribusinya terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sektor ekonomi yang kontribusi terhadap PDRB terbesar pertama adalah sektor angkutan dan komunikasi dimana kontribusinya rata-rata sebesar 9,75 persen tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2004 kontribusinya sebesar Rp 1.557.102,84 juta. Dimana bahwa sektor angkutan dan komunikasi ini tiap tahun kontribusinya terhadap PDRB mengalami peningkatan karena pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Hal ini sangat didukung oleh distribusi yang sudah lancar, dan sarana pendukung lainnya seperti Bandar Udara Hasanuddin (walaupun sarana tersebut termasuk wilayah Kabupaten Maros) dan Pelabuhan Laut Makassar.

Sektor ekonomi yang kontribusinya terhadap PDRB terbesar kedua adalah sektor perdagangan dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,94 persen dari tahun 1995-2005. Dimana sektor ini kontribusinya terhadap PDRB tiap tahun mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 1998 kontribusinya terhadap PDRB mengalami peningkatan dibandingkan sektor-sektor lain dimana selama tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang disebabkan oleh ambruknya sektor perbankan dan hal ini membawa dampak buruk terhadap perekonomian Kota Makassar pada tahun 1998.

Sektor ekonomi yang kontribusinya terhadap PDRB terbesar ketiga adalah sektor bank dan lembaga keuangan dimana rata-ratanya pertumbuhan sebesar 6,94 persen setiap tahunnya selama periode 1995-2005. Dimana hal ini sangat didorong

oleh meningkatnya sewa bangunan dan jasa perusahaan di Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Sektor ekonomi yang kontribusinya terhadap PDRB terbesar keempat adalah sektor industri dimana rata-rata pertumbuhannya selama periode 1995-2005 sebesar 6,64 persen. Hal ini disebabkan oleh industri non migas baik besar maupun kecil yang setiap tahunnya terus naik. Dan sektor ekonomi yang kontribusinya terhadap PDRB terkecil selama periode 1995-2005 yaitu sektor pertambangan dan penggalan.

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang dicapai oleh kota Makassar selama periode 1995-2005 berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar -7,82 % yang disebabkan oleh krisis ekonomi sehingga membawa dampak buruk terhadap perekonomian. Dan pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar kembali mengalami kenaikan sebesar 4,17 persen, dan pada tahun 2000 perekonomian Makassar mengalami peningkatan atau adanya perubahan yang positif yakni sebesar 5,08 persen dan kenaikan ini terjadi pada setiap sektor walaupun naiknya belum merata.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Makassar selama periode tahun 2001-2005 mencapai rata-rata 8,09 persen per tahun. Namun demikian rata-rata pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan yang cukup signifikan periode tahun 2004 sebesar 10,24% yang disebabkan oleh besarnya andil sub-sektor perbankan. Pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya relatif stabil, yaitu 7,30% pada tahun 2001, kemudian menurun menjadi 7,14% pada tahun 2002, dan selanjutnya pada tahun 2003 tumbuh sebesar 8,60%. Sementara di tahun 2005 pertumbuhannya hanya

7,16%, atau lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan tahun 2004. meski demikian kondisi tersebut merupakan suatu hal penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi stabilnya perekonomian kota Makassar untuk masa yang akan datang.

Tabel 5.2
 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar
 Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995-2005 (Juta Rp)

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar ADH Konstan 1993 (Juta Rp)			
	1995	2000	2005	Rata-rata Pertumbuhan (%) 1995-2005
1. Pertanian	51319,83 (4,86)	60197,86 (2,27)	99582,25 (1,55)	4,86
2. Pertambangan & Penggalian	703,66 (3,50)	481,95 (1,05)	1294,24 (-0,68)	3,51
3. Industri Pengolahan	677169,91 (6,64)	696159,08 (7,54)	2472220,14 (4,82)	6,64
4. Listrik, Gas & Air Minum	62507,86 (5,75)	86470,39 (4,31)	209915,08 (6,21)	5,75
5. Bangunan	217319,33 (6,58)	214091,29 (11,96)	815833,23 (6,44)	6,58
6. Perdagangan, Rest & Hotel	800313,94 (8,94)	825239,85 (1,83)	2983764,20 (6,90)	8,94
7. Angkutan & Komunikasi	270502,74 (9,75)	377131,71 (6,08)	1676823,86 (9,75)	9,75
8. Bank & Lembaga Keuangan	265783,54 (6,94)	198361,43 (7,32)	1032937,06 (6,66)	6,94
9. Jasa-Jasa	382463,19 (4,36)	376297,71 (2,89)	1200170,60 (3,40)	4,36
Jumlah	2728084,00	2834431,27	10492540,67	6,37

Sumber: BPS Kota Makassar

Salah satu implikasi dari pertumbuhan ekonomi yang besar adalah terbukanya peluang investasi, sehingga diharapkan bisa memberikan perluasan kesempatan kerja. Untuk itu dalam proyeksi kedepan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila daerah ini mampu memanfaatkan peluang untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal, maka upaya nyata untuk meningkatkan

pendapatan serta memperluas kesempatan kerja tetap memungkinkan untuk dipadukan.



5.3. Kesempatan Kerja Kota Makassar

Peningkatan penduduk yang begitu cepat merupakan hal yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi oleh penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menambah tingkat pengangguran di satu sisi dan hal ini tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi tetapi akan berdampak pula pada dimensi-dimensi yang lain seperti dimensi sosial dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk di Kota Makassar dalam menyediakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum terserap dalam dunia usaha. Problem ini bukan hanya masalah bagi pemerintah dalam mengupayakan penyelesaiannya tetapi kita pun harus mengupayakan jalan keluarnya.

Keberhasilan dalam mengatasi pengangguran atau kemampuan pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja ini tentunya membutuhkan perencanaan yang matang dalam merancang strategi yang tepat.

Pertumbuhan penduduk pesat akan berdampak pada peningkatan angkatan kerja yang tentunya akan menjadi pengangguran-pengangguran baru apabila tidak dapat ditampung dalam dunia usaha. Kurangnya penyediaan kesempatan kerja merupakan masalah yang serius bagi pemerintah. Adapun kesempatan kerja dari tahun 1995-2005 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 5.3).

Berdasarkan data dari Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa kesempatan kerja mengalami peningkatan yang berfluktuasi setiap tahun. Penyerapan tenaga kerja pada

sektor pertanian mengalami pasang surut setiap tahun. Jika dilihat dari rata-rata pertahun lebih kecil dari laju pertumbuhan tenaga kerja pertahun di sektor sekunder dan tersier. Mulai tahun 1995 sampai tahun 2005 penyerapan tenaga kerja dalam bidang pertanian nampak mengalami pasang surut, sementara kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap penyerapan tenaga kerja terus meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan struktur kesempatan kerja. Dimana pemerintah berusaha meningkatkan peran sektor perdagangan dan jasa sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.3
Pertumbuhan Kesempatan Kerja Menurut Sektor Di Kota Makassar
1995-2005 (Ribuan Orang)

Lapangan Usaha	Kesempatan Kerja Menurut Sektor Di Kota Makassar (Ribuan Orang)		
	1995	2000	2005
1. Pertanian	933842 (2,91)	9622 (2,61)	9729 (2,50)
2. Industri	19511 (6,08)	38894 (10,55)	42184 (10,84)
3. Listrik//Gas/Air/Pertambangan	3177 (0,99)	3502 (0,95)	4203 (1,08)
4. Bangunan/Konstruksi	9659 (3,01)	24479 (6,64)	33078 (8,50)
5. Perdagangan	93961 (29,28)	126230 (34,24)	149747 (38,48)
6. Angkutan & Komunikasi	19896 (6,20)	28829 (7,82)	40589 (10,43)
7. Bank & Lembaga Keuangan	3338 (1,04)	3945 (1,07)	9962 (2,56)
8. Jasa	134653 (41,96)	133235 (36,14)	99624 (0,01)
9. Lainnya	27373 (8,54)	1217 (0,00)	39 (0,01)
Jumlah	320908	369953	389155

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar
(data diolah)

Kesempatan kerja disektor perdagangan setiap tahunnya mengalami peningkatan, sementara di sektor jasa mengalami penurunan pada tahun 1998 yaitu

dari 104.264 orang pada tahun 1997, turun menjadi 95.452 orang. Kondisi tersebut disebabkan oleh krisis ekonomi yang berdampak pada banyaknya perusahaan jasa yang gulung tikar sehingga banyak terjadi pengurangan tenaga kerja. Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri, komunikasi/angkutan dan bangunan/konstruksi yang diharapkan akan menjadi tulang punggung perekonomian Kota Makassar. Kesempatan kerja merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan pembangunan.

5.4. Pengaruh Investasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Makassar

Pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi yang positif terhadap kesempatan kerja, hal ini diakibatkan dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, di dalam peningkatannya di barengi oleh investasi yang besar untuk memicu peningkatan PDRB, hal ini membawa konsekwensi terhadap penyerapan kesempatan kerja di satu sisi, karena investasi yang besar tentunya membutuhkan angkatan kerja atau terciptanya peluang-peluang kesempatan kerja. Analisis pengaruh investasi (eksplanatori) melalui pertumbuhan ekonomi (instrumental) terhadap variabel dependen kesempatan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Hasil Estimasi Model Pengaruh Investasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja

Variabel	B	S.E	t	Sig
Constant	12,212	0,276	44.206	0,000
X	0,041	0,019	2,115	0,0635
$R^2 = 0,332$		$R = 0,576$		
Uji F = 4,473		Sig = 0,0635		
X = investasi				

Sumber: Pengolahan Data Sekunder

Untuk mengetahui kuatnya pengaruh investasi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar, maka digunakan rumus determinasi, yaitu: $R^2 = 0,332$. Ini membuktikan bahwa pengaruh investasi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja mempunyai pengaruh yang cukup besar yaitu 33,2 persen dipengaruhi oleh investasi melalui pertumbuhan ekonomi dan selebihnya 66,8 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

Demikian pula jika dilihat nilai koefisien korelasi model ini yaitu 0,576. Hal ini dapat berarti bahwa hubungan antara pengaruh investasi melalui pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja adalah cukup kuat.

Untuk menguji pengaruh investasi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja, maka dilakukan uji t. Apabila dengan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , berdasarkan hasil analisis di dapat nilai t sebesar 2,115 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,833 pada level signifikan 5 persen, $df = 9$. Demikian hal tersebut memberi indikasi bahwa pengaruh investasi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap perluasan kesempatan kerja adalah signifikan. Maka regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,041, artinya pengaruh investasi melalui pertumbuhan ekonomi

terhadap kesempatan kerja adalah positif dengan kata lain jika regresi pertumbuhan investasi sebesar 1 persen, maka akan mendorong perluasan kesempatan kerja sebesar 0,041 persen. Hal yang sama juga ditemukan oleh Hasriani (2004), dalam mengamati pengaruh investasi dan pengeluaran pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja.

Jika dibandingkan dengan nilai t_{hitung} investasi melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 2,115 dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikan 5 persen dan $df = 9$ sebesar 1,833 tampak bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,115 > 1,833$). Dengan demikian investasi melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesempatan kerja.

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh investasi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja, digunakan uji F yaitu dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Nilai F_{hitung} berdasarkan hasil perhitungan adalah 4,473. Sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikan 5 persen adalah 4,26. Jika membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} tampak bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($4,473 > 4,26$). Hal ini berarti bahwa investasi melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap kesempatan kerja.

Nilai konstanta adalah 12,212. Nilai ini berarti bahwa apabila investasi melalui pertumbuhan ekonomi tetap, maka persentase jumlah kesempatan kerja akan tetap sebesar 12,212 persen. Sedangkan nilai koefisien regresi investasi adalah 0,041. Hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap kenaikan investasi sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0,041 persen. Dimana hal tersebut diakibatkan karena adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya

meningkat hampir disemua sektor terutama di empat sektor besar yaitu perdagangan, industri, angkutan dan komunikasi serta bank dan lembaga keuangan.

BAB VI PENUTUP

6.1. kesimpulan

1. Dilihat dari perkembangan kesempatan kerja di Makassar dari tahun 1995-2005 sebagian besar penduduk bekerja pada sektor perdagangan dan sektor jasa, hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Makassar merupakan Kota Niaga yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
2. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode regresi linear sederhana 2SLS yang telah dilakukan ternyata antara investasi melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Makassar. Setiap kenaikan investasi melalui pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka jumlah kesempatan kerja juga meningkat sebesar 0,041%. Dan dari hasil pengujian ternyata nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa peningkatan investasi melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja di Makassar. Selanjutnya hasil pengujian menunjukkan bahwa f hitung lebih besar dari pada f tabel. Hal ini berarti bahwa peningkatan investasi yang diawali peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) secara keseluruhan berpengaruh nyata (signifikan) terhadap kesempatan kerja sehingga model regresi ini layak dipakai.

6.2. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan pertumbuhan pendapatan regional (PDRB) di Makassar, maka investasi perlu terus digalakkan (PMDN dan PMA). Segala

bentuk kendala yang menghambat aliran masuk modal di Makassar perlu penanganan intensif.

2. Melihat pengaruh peningkatan investasi melalui pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu besar terhadap kesempatan kerja tentunya diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemegang otoritas kebijakan (pemerintah) di Makassar untuk merancang strategi kesempatan kerja di daerah ini atau paling tidak menjadi studi kelembagaan buat instansi terkait yang mengkaji masalah dan topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA



- Badan pusat statistik: *Indikator Ekonomi Makassar*, beberapa edisi.
- Badan pusat statistik: *Indikator Kesejahteraan Rakyat Makassar*, beberapa edisi.
- Badan pusat statistik: *Makassar Dalam Angka*, beberap edisi.
- Boediono, 1986 : *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BP-FE UGM.
- Dernburg, Mc. Dounall. 1994: *Ekonomi Makro*: Perhitungan ekonomi dan kebijaksanaan perekonomian, Erlangga Jakarta.
- Deliarnov. 1995: *Pengantar Ekonomi Makro*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- DJojohadikusumo, S. 1994: *Indonesia Dalam Perkembangan Dunia: Kini Dalam Masa datang*. LP3ES, Jakarta.
- Hasriani. 2004: *Dalam Tesis (Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Di Propinsi Sulawesi Selatan*, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Jhingan, M.L. 1994: *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Rajawali Press.
- Nanga, Muana. 2001 : *Makro Ekonomi*. LPPT Raja Grafindo Persaja, Jakarta.
- Panetto, A Rahman. 2001: *Moneter Internasional, Beberapa Kasus Krisis Moneter Diasia Tenggara Dan Timur*, LP UH Makassar.
- Raharja, Pratama dan Manurung, Mandala. 2001: *Teori Ekonomi Makro*, LPPE UI Jakarta.
- Rasyid, Abdul. 2002: *Dalam Tesis (Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur*, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rusli, Said. 1986: *Pengantar Ekonomi Kependudukan*, LP3ES, Jakarta.
- Sobri. 1987: *Ekonomi Makro, Cetakan Kedua*, BPFE-UI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1996: *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sukirno, Sadono. 1999: *Makroekonomi Modern*, P.T. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suprpto, J. 1984: *Ekonometrika*. Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Suroto. 1986: *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Gajah Mada, Universiti Press.

LAMPIRAN

Tabel. 5.1
Investasi (PMDN & PMA) yang disetujui oleh pemerintah Kota Makassar
tahun 1995-2005

Investasi	Nilai Investasi					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
PMDN	229.807,00 (3,07)	327.669,00 (4,38)	434.850,00 (5,80)	204.647,00 (2,73)	709.430,00 (9,48)	499.842,90 (6,67)
PMA	50.282,00 (0,03)	169.937,00 (0,09)	83.791,36 (0,05)	2.034.313,00 (1,13)	10.479,50 (0,06)	49.602,00 (0,03)
Total	280.089,90	497.606,00	518.641,65	2.238.960,00	719.909,50	549.444,90

Lanjutan Tabel 5.1

Investasi	Nilai Investasi				
	2001	2002	2003	2004	2005
PMDN	1.178.732,90 (15,74)	700.943,90 (9,36)	1.665.156,00 (22,24)	855.849,00 (11,43)	679.987,00 (9,08)
PMA	509.981,00 (0,28)	1.005.251,00 (0,56)	277.622,00 (0,16)	174.586.591,00 (97,29)	609.030,00 (0,34)
Total	1.688.713,90	1.706.195,00	1.942.778,00	175.442.440,00	1.289.017,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kota Makassar
BPS Kota Makassar (indikator ekonomi beberapa edisi)

Lampiran II

Tabel 5.2
 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar
 Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995-2005 (Juta Rp)

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar ADH Konstan 1993 (Juta Rp)					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	51319,83	55979,54	44922,49	55168,90	58862,69	60197,86
2. Pertambangan & Penggalian	703,66	757,03	632,48	468,52	479,94	481,95
3. Industri Pengolahan	677169,91	796018,71	682408,46	621344,39	647337,96	696159,08
4. Listrik, Gas & Air Minum	62507,86	76864,41	69226,85	78378,48	82900,88	86470,39
5. Bangunan	217319,33	271554,58	238221,23	190458,41	191221,23	214091,29
6. Perdagangan, Restoran & Hotel	800313,94	898850,18	752998,79	771173,66	810381,18	825239,85
7. Angkutan & Komunikasi	270502,74	339915,09	320626,59	348797,89	355515,35	377131,71
8. Bank & Lembaga Keuangan	265783,54	332516,27	310128,50	171337,51	184839,79	198361,43
9. Jasa-Jasa	382463,19	452250,51	390531,15	352379,13	365910,49	376297,71
Jumlah	2728084,00	3224751,36	2809696,54	2589506,89	2697446,51	2834431,27

Lanjutan Tabel 5.2

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar ADH Konstan 1993 (Juta Rp)				
	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	103305,60	104419,53	95781,84	98057,52	99582,25
2. Pertambangan & Penggalian	1186,19	1201,60	1231,27	1269,16	1294,24
3. Industri Pengolahan	1982574,02	2105032,17	2183877,30	2306355,30	2472220,14
4. Listrik, Gas & Air Minum	179321,76	185543,51	186090,57	196734,17	209915,08
5. Bangunan	563747,70	614257,44	678489,31	751320,04	815833,23
6. Perdagangan, Rest & Hotel	2099351,28	2335431,48	2570464,67	2758933,63	2983764,20
7. Angkutan & Komunikasi	1140913,79	1173.708,43	1358140,55	1557102,84	1676823,66
8. Bank & Lembaga Keuangan	541943,83	578717,09	703040,64	984264,88	1032937,06
9. Jasa-Jasa	1021560,98	1080568,88	1100138,55	1137665,93	1200170,60
Jumlah	7633905,12	8178880,13	8882254,69	9791709,47	10492540,66

Sumber: BPS Kota Makassar

Lampiran III

Tabel 5.3
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar
Tahun 1995-2005 (%)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar (%)					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	4,86	2.40	3.42	22.81	6.70	2.27
2. Pertambangan & Penggalian	3,50	3.11	3.23	-25.92	1.80	1.05
3. Industri Pengolahan	6,64	12.03	6.48	-8.95	4.19	7.54
4. Listrik, Gas & Air Minum	5,75	3.38	1.31	13.22	5.77	4.31
5. Bangunan	6,58	17.18	12.00	-20.05	0.40	11.96
6. Perdagangan, Rest & Hotel	8,94	10.80	5.41	2.41	5.08	1.83
7. Angkutan & Komunikasi	9,75	15.50	9.25	8.79	1.93	6.08
8. Bank & Lembaga Keuangan	6,94	5.31	11.60	-44.66	7.88	7.32
9. Jasa-Jasa	4,36	7.63	4.69	-9.77	3.84	2.89
Jumlah	6,36	10.78	6.92	-7.82	4.17	5.08

Lanjutan Tabel 5.3

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar (%)					
	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-Rata
1. Pertanian	0.70	1.08	8.27	2.38	1.55	5.16
2. Pertambangan & Penggalian	1.06	1.30	2.47	3.08	1.98	-0.68
3. Industri Pengolahan	4.21	6.18	3.75	5.61	7.19	4.82
4. Listrik, Gas & Air Minum	17.92	3.47	0.29	5.72	6.70	6.21
5. Bangunan	4.19	8.96	10.46	10.74	8.59	6.44
6. Perdagangan, Rest & Hotel	6.72	11.25	10.06	7.33	8.15	6.90
7. Angkutan & Komunikasi	14.91	2.87	15.71	14.65	7.69	9.74
8. Bank & Lembaga Keuangan	6.01	6.79	22.35	39.01	4.95	6.66
9. Jasa-Jasa	8.26	5.78	1.81	3.41	5.49	3.40
Jumlah	7.30	7.14	8.60	10.24	7.16	48.65

Sumber: BPS Kota Makassar

Lampiran IV

Tabel 5.4
Kesempatan Kerja Menurut Sektor Di Kota Makassar
1995-2005 (Ribuan Orang)

Lapangan Usaha	Kesempatan Kerja Menurut Sektor Di Kota Makassar (Ribuan Orang)					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	9338	3495	12865	9742	9114	9622
2. Industri	19511	21598	23433	29814	34746	38894
3. Listrik/Gas/Air/Pertambangan	3177	3935	3711	3524	3757	3502
4. Bangunan/Konstruksi	9659	18733	30184	25184	27901	24479
5. Perdagangan	93961	102637	136639	145579	132436	126230
6. Angkutan & Komunikasi	19896	23046	30325	28224	29352	28829
7. Bank & Lembaga Keuangan	3338	3935	11451	7946	9672	3945
8. Jasa	134653	137426	104264	95452	125033	133235
9. Lainnya	27373	3935	4241	3524	3757	1217
Jumlah	320908	318740	357114	348988	375768	369953

Lanjutan Tabel 5.4

Lapangan Usaha	Kesempatan Kerja Menurut Sektor Di Kota Makassar (Ribuan Orang)				
	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	14943	5250	11185	6351	9729
2. Industri	32552	42035	39345	38108	42184
3. Listrik/Gas/Air/Pertambangan	2594	7205	6551	3843	4203
4. Bangunan/Konstruksi	26049	30015	25265	40293	33078
5. Perdagangan	146540	134179	134577	161576	149747
6. Angkutan & Komunikasi	33685	39319	44413	38311	40589
7. Bank & Lembaga Keuangan	6320	5721	7891	8860	9962
8. Jasa	102406	98154	92698	86694	99624
9. Lainnya	256	36	36	20510	39
Jumlah	365346	361913	361961	404546	389155

Sumber: BPS Kota Makassar

Lampiran V

LABEL: Regresi dengan ln

Z	Ln Z	Y	Ln Y	X	Ln X
320908	12.67890976	2728084	14.8191101	280089	12.54286269
318740	12.672131	3224751.35	14.9863664	497606.00	13.11756388
357114	12.78581034	2809696.54	14.848587	518641.65	13.15896846
348988	12.76279282	2589506.89	14.766978	2238960.00	14.62152203
375768	12.83672721	2697446.51	14.8078161	719909.50	13.48688079
369953	12.82113125	2834431.27	14.8573519	549444.90	13.21666377
365346	12.80860013	7633905.12	15.8481101	1688713.90	14.33947779
361913	12.79915913	8178880.13	15.9170658	1706195	14.34977624
361961	12.79929175	8882254.69	15.999566	1942778	14.47962947
404546	12.91052073	9785333.90	16.0963953	175442440	18.98282157
389155	12.871733	10492540.67	16.1661752	1289017	14.06939047

Lampiran VI

Two-stage Least Squares Analysis

[DataSet0]

Model Description

		Type of Variable
Equation 1	Kesempatan Kerja	dependent
	investasi	predictor
	PDRB	instrumental

MOD_1

Model Summary

Equation 1	Multiple R	.57623
	R Square	.33205
	Adjusted R Square	.25783
	Std. Error of the Estimate	.06223

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Equation 1	Regression	.01732729	1	.01732729	4,47397	.0635
	Residual	.03485622	9	.00387291		
	Total	.05218351	10			

Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
Equation 1	(Constant)	12.212187	.276255		44.206	.000
	investasi	.041011	.019389	.983587	2.115	.0635

**IDENTIFIKASI SEKTOR EKONOMI UNGGULAN
KABUPATEN WAJO
SULAWESI SELATAN**



UNIVERSITAS HASANUDDIN	28-12-2006
Fakultas Ekonomi	
1 (satu) ds	
H	
194/28-12-6	
35564	

OLEH :

ANDI THAMRIN SYAM

A 111 00 065

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

**IDENTIFIKASI SEKTOR EKONOMI UNGGULAN
KABUPATEN WAJO
SULAWESI SELATAN**



Oleh :

ANDI THAMRIN SYAM


A 111 00 065

SKRIPSI

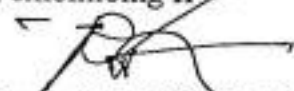
Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Makassar

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. I Made Benyamin, M.Ec.

Pembimbing II


Hamrullah, SE., M. Si

KATA PENGANTAR

BismillahirRahmaanirRahim,

Assalaamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini memakan waktu lebih kurang lima bulan dan tidak lepas dari berbagai kendala, terutama karena banyaknya aktivitas lain di luar kampus. Namun berkat dorongan dan bantuan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat merampungkan meskipun masih banyak kekurangan di dalamnya. Ucapan terima kasih yang tulus anakda haturkan kepada kedua orang tua tercinta atas segala perhatian dan do'a restu yang diberikan selama ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Bapak Dr. I Made Benyamin, M. Ec.**, selaku pembimbing I dan **Bapak Hamrullah, SE, M.Si.**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan bimbingan dan arahnya. Demikian pula halnya kepada seluruh dosen yang telah membagi ilmunya dan mengantar penulis sampai di gerbang sarjana, terima kasih tak terhingga tentunya. Tak lupa pula penulis berterima kasih kepada seluruh instansi yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada seluruh teman-temanku, baik teman di fakultas, teman organisasi, teman sekampung, teman biasa, teman "spesial", serta teman tapi mesra, *tanks* buat kalian semua atas segala bantuan dan dukungannya.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka para pembacalah yang diharapkan untuk menyempurnakanya. Semoga segala bantuan dan dukungan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat pada masa yang akan datang.

Amien... ,

Wassalam,

Makassar, 21 Mei 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	5
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	5
2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah	8
2.3 Komponen Sektor Dalam Struktur Ekonomi	12
2.4 Teori Basis Ekonomi	14
2.5 Analisis Sektor Basis	16
2.6 Perubahan Struktur Ekonomi	17
2.7 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	19
2.8 Hipotesis	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Kerangka Konseptual	20
3.2 Metode Pengumpulan Data	21
3.3 Jenis dan Sumber Data	21
3.4 Alat Analisis	22
3.4.1 Analisis Location Quotient	22
3.4.2 Analisis Shift-Share	22
3.5 Definisi Operasional	24

BAB IV KONDISI UMUM PEREKONOMIAN KABUPATEN WAJO...	26
4.1 Harga Sembako.....	26
4.2 Laju Inflasi	27
4.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	30
4.4 Sumber Pendapatan.....	32
4.5 Pendapatan Perkapita.....	34
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	36
5.1 Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Unggulan.....	36
5.1.1 Analisis Location Quotient (LQ).....	36
5.1.2 Analisis Shift-Share (S-S).....	39
5.2 Sektor-Sektor Ekonomi yang Potensial.....	48
5.3 Analisis Sektor dan Sub Sektor Potensial.....	50
5.3.1 Sektor Pertanian.....	50
5.3.2 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	51
5.3.3 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.....	52
5.3.4 Sektor Listrik dan Air Bersih.....	53
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
6.1 Kesimpulan	55
6.2 Saran-Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai fungsi utama yaitu mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di daerah tersebut secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya serta semakin kecilnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses kenaikan pendapatan perkapita daerah tersebut dalam jangka panjang. Teori ekonomi menyatakan bahwa faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah tersebut, sehingga sumberdaya lokal dapat menghasilkan kekayaan daerah yang sekaligus dapat menciptakan peluang

kerja di daerah itu. Hal ini berarti bahwa sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia memegang kunci yang sangat strategis dalam perekonomian suatu daerah. Sumberdaya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penyelenggaraan pembangunan ekonomi di seluruh tanah air yang merupakan kegiatan integral dari pembangunan nasional hendaknya berlangsung dengan menitikberatkan pada penggalan potensi sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah secara optimal.

Untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam dan potensi yang dimiliki tersebut, maka perhatian utama ditujukan untuk melihat komposisi ekonomi yakni dengan mengetahui sumbangan atau peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau sektor dalam perekonomian. Di samping itu, proses perubahan komposisi ekonomi tersebut tidak terpisahkan dengan pertumbuhan ekonomi yakni dengan penekanan pada kenaikan output perkapita dalam jangka panjang melalui peningkatan PDRB pertahun yang harus berlangsung secara optimal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 (yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, tentunya hal ini merupakan perubahan kebijakan yang dapat memberikan peluang bagi daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga ketimpangan antar sektor ekonomi,

ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat secara bertahap dapat diperkecil. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif suatu daerah, spesialisasi wilayah serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Adanya potensi ekonomi di suatu daerah tidaklah mempunyai arti bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut bila tidak ada upaya memanfaatkan dan mengembangkan seluruh potensi ekonomi secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan seluruh potensi ekonomi yang optimal harus menjadi prioritas utama untuk digali dan dikembangkan dalam rangka melaksanakan pengembangan ekonomi daerah secara utuh.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo yang terlihat dari perkembangan sektor-sektor ekonomi dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB terhitung masih lamban, sehingga perlu mengkaji sektor-sektor ekonomi unggulan yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Wajo. Dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan, maka sektor-sektor ekonomi yang memiliki prospek dapat dijadikan tulang punggung atau andalan sebagai modal dasar pembangunan daerah Kabupaten Wajo di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul untuk penulisan skripsi yaitu: **"Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan"**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yaitu: sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi sektor unggulan yang dapat dikembangkan dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Wajo.

1.3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan ekonomi, khususnya pemerintah Kabupaten Wajo yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah pada masa yang akan datang.
- b. Sebagai informasi bagi para pelaku ekonomi, khususnya investor yang ingin menanamkan modalnya pada berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Wajo.
- c. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian serupa.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB atau PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dikatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang meningkat (Arsyad, 1999:7).

Kuznet (dalam Jhingan, 1999:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan. Definisi ini memiliki 3 komponen yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang dan jasa.
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang penduduk.
3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang

dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.



Menurut Sukirno (1985:19), pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru tercipta apabila jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun berikutnya.

Fredrich List (dalam Hasibuan, 1987:67-68) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi-organisasi swasta, entrepreneur (wiraswasta), dan kebudayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam politik dan kebebasan perorangan. Fredrich List berpendapat bahwa hanya negara-negara yang *berhawa sedang* yang cocok untuk *industri*, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang dan ini merupakan dasar yang cukup, di samping itu pertanian sudah efisien, sehingga sebagian penduduk dapat dipindahkan ke sektor pertanian. Sedangkan di *daerah tropis* paling cocok untuk *pertanian*, karena pada umumnya jumlah penduduk sangat padat, pertanian belum begitu efisien dan persediaan sumber-sumber alam yang sangat sedikit. Namun yang terpenting menurut Fredrich List adalah industri/pabrik untuk perkembangan ekonomi, meskipun pada permulaannya diperlukan perlindungan (proteksi).

Karl Bucher (dalam Hasibuan, 1987:68) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui 3 tingkat yaitu:

1. Produksi untuk kebutuhan sendiri.
2. Perekonomian kota, yang pertukarannya sudah meluas.
3. Perekonomian nasional, yang pedagang-pedagangnya tampak makin penting. Jadi barang-barang diproduksi untuk pasar.

Sedangkan Rostow dalam bukunya: "*The Stages of Economic Growth*" mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam 5 tahap yaitu:

1. Masyarakat tradisional atau *the traditional society*.
2. Prasyarat untuk lepas landas atau *the precondition for take off*.
3. Lepas landas atau *the take off*.
4. Gerakan ke arah kedewasaan atau *the drive to maturity*.
5. Masa konsumsi tinggi atau *the age of high mass consumption*.

Menurut Adam Smith (dalam Arsyad, 1999:55), sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari suatu kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan *batas maksimum* bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sollow – Swan (dalam Arsyad, 1999:62) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk,

tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap digunakan sepenuhnya sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian dapat berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter adalah peningkatan output masyarakat disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan *teknologi* produksi itu sendiri (Arsyad, 1999:70).

2.2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya, inti dari teori-teori pembangunan ekonomi daerah berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:298).

Masalah pokok dalam pembangunan adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*Endogenous Development*) dengan menggunakan potensi

sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk-produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar - pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pembangunan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Kalau analisis pembangunan nasional dibandingkan dengan analisis pembangunan daerah, maka akan tampak bahwa analisis pembangunan ekonomi daerah sangat ketinggalan baik ditinjau dari cakupan analisis maupun kedalamannya. Di samping itu, analisis regional yang bertitik tolak dari analisis permasalahan dan kebijaksanaan pembangunan daerah di negara maju, padahal struktur perekonomian negara-negara maju sangat berbeda dengan struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang, demikian juga dengan struktur perekonomian daerahnya.

Perbedaan struktur ini mengakibatkan perlunya analisis dan cara pendekatan yang berbeda pula.

Jika kita buat suatu ringkasan, teori-teori tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Pembangunan daerah = f (sumberdaya alam, tenaga kerja, investasi, entrepreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan).

Teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, digunakan suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Pendekatan tersebut dapat disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 : Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan semakin banyak peluang kerja.	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan "kondisi" penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Asset-asset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada asset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya Pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber : Arsyad, 1999 hal. 302

2.3. Komponen Sektor dalam Struktur Ekonomi

Menurut Azis (1994:229-230), pengamatan tentang proses pembangunan daerah dengan pendekatan sektoral dan regional tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi politik negara yang bersangkutan. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan tujuan tentang sektor-sektor yang perlu dikembangkan untuk mencapai suatu tujuan pembangunan nasional, jumlah produk yang dihasilkan, teknologi, dan waktu kapan produksi dimulai. Dalam pendekatan regional, tujuan di tetapkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas dan perlu dikembangkan sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan dan sektor apa saja yang sesuai untuk dikembangkan di tiap-tiap daerah.

Menurut Kunarjo (1999:55), sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini selain mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor.

Menurut Partadireja (1996 : 45) bahwa sebagaimana dikemukakan oleh PBB dan Negara lain, semua kegiatan produksi dan jasa di kelompokkan dalam 11 (sebelas) kelompok yang masing-masing dinamakan lapangan usaha (industrial origin). Hal ini berlaku di Indonesia baik ditingkat nasional maupun regional yang dikelompokkan kedalam 9 sektor (sembilan) atau 11 (sebelas) sektor. Kalau diikuti pembagian sektor ekonomi sesuai yang dianut oleh perhitungan pendapatan regional maupun nasional, maka perekonomian dilihat dari kegiatannya dapat dibagi menjadi

11 sektor (menurut harga konstan 1983), sebagai berikut : (1) pertanian, meliputi pertanian bahan makanan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik dan air bersih; (5) bangunan; (6) hotel dan restoran; (7) angkutan dan komunikasi; (8) keuangan; (9) persewaan dan jasa perusahaan; (10) pemerintahan, dan (11) jasa-jasa.

Sedangkan menurut harga konstan 2000, sektor ekonomi dibagi menjadi 9 (sembilan) sektor, yaitu : (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri dan pengolahan; (4) listrik dan air bersih; (5) bangunan dan konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) angkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan perusahaan; dan (9) sektor jasa-jasa. Namun dalam penelitian ini, yang dipakai adalah pembagian sektor menurut harga konstan 2000 (9 sektor).

Pembangunan semua sektor ditempuh berdasarkan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, yang tujuan fungsionalnya menyajikan prioritas pembangunan, mengidentifikasi sasaran masing-masing sektor, pengalokasian dana sesuai dengan penekanan pada sektor tertentu, penentuan biaya serta menentukan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian diharapkan terciptanya perekonomian daerah yang kokoh dan mandiri sebagai usaha bersama sesuai dengan asas kekeluargaan, memperkuat struktur ekonomi daerah yang seimbang antar sektor sehingga mampu tumbuh atas kekuatan sendiri, dengan ciri industri yang kuat dan maju serta pertanian yang tangguh, menciptakan nilai tambah (value added) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, suatu pola perdagangan yang mantap sehingga mampu menjamin kestabilan perekonomian daerah, berkembangnya kegiatan dunia usaha, kemitraan

dalam bidang ekonomi serta semangat kewirausahaan, terjaminnya pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian alam dan lingkungan.

2.4. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (Arsyad, 1999 : 116). Teori basis ekonomi sering disebut Analisis Basis yang digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan basis. Menurut teori ini, daerah dapat dibedakan ke dalam daerah basis dan non basis.

Termasuk dalam metode ini adalah metode **Location Quotient**. Pertama kali harus ditentukan satu sektor yang mempunyai LQ yang lebih dari satu. Hal ini berarti sektor-sektor tersebut termasuk dalam kategori ekspor, misalnya ekspor pertanian dan ekspor pengolahan, atau dalam kelompok lokal non basis (distribusi, perbankan dan keuangan, pemerintah daerah). Sering juga metode ini dipakai dengan cara mengakui adanya kelompok sektor campuran, kemudian menaksir komponen basis-basisnya dengan cara lain.

Sektor-sektor basis tidak hanya sektor ekspor (sektor surplus) saja, tetapi juga mencakup semua kegiatan yang tidak terkait pada tingkat kegiatan ekonomi di daerah bersangkutan. Jadi sektor-sektor basis meliputi semua aktifitas yang didukung secara ekstern terutama oleh pemerintah.

Menurut Richardson (1991 :16) asumsi yang di pakai adalah spesialisasi lokal dalam produksi yang mempunyai makna ekspor dari produksi surplus, asumsi- asumsi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pola permintaan setiap daerah sama dengan pola permintaan secara nasional.
2. Produktivitas tiap pekerja sektor regional sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional.
3. Perekonomian nasional merupakan tertutup.

Meskipun asumsi-asumsi tersebut mengandung kelemahan namun paling tidak metode ini mempunyai keunggulan sebagai berikut :

1. Memperhitungkan ekspor yang secara langsung maupun tidak langsung.
2. Tidak mahal dan tidak di terapkan pada historis untuk mengetahui trend.

Dasar pemikiran dari penggunaan teknik LQ adalah teori *Economic Basic* yang intinya adalah bahwa *industry basic* menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar daerah maupun untuk pasar luar daerah tersebut, maka penjualan dari luar daerah ini akan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi didaerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru (Arsyad, 1997 : 315). Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap *industry basic*, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri *non-basic* (lokal). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal merupakan investasi yang didorong (induced) sebagai akibat dari kenaikan *industry basic*.

Oleh karena itu *industry-basic*lah yang patut dikembangkan disuatu daerah. Tugas pertama yang harus kita lakukan adalah menggolongkan setiap industri, apakah termasuk *industry basic* atau *non basic*. Untuk keperluan ini dipakai Location Quotient (LQ), yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian regional atau nasional (Arsyad, 1993 : 316).

Menurut Kadaria (1985 : 70), kenaikan pendapatan tidak hanya menaikkan permintaan hasil industri basis, namun juga akan menaikkan permintaan hasil industri lokal non basis.

2.5. Analisis Sektor Basis

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis yang dapat di kembangkan dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Wajo akan langsung meningkat kenaikannya bila sektor basis mengalami ekspansi. Untuk mengetahui sektor yang termasuk dalam kategori basis atau bukan basis di gunakan analisis *Location Quotient* (LQ) dengan cara membandingkan setiap sektor perekonomian Kabupaten Wajo dengan peranan sektor perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat diketahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis atau sektor yang potensial di daerah.

Secara matematis LQ dirumuskan sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{y_i/Y}{Y_i/Y}$$

Dimana :

- LQ_i : angka atau koefisien LQ sektor i Kabupaten Wajo
 y_i : PDRB sektor i Kabupaten Wajo
 y : PDRB Kabupaten Wajo
 Y_i : PDRB sektor i Propinsi Sulawesi Selatan
 Y : PDRB Propinsi Sulawesi Selatan

Setelah LQ dihitung, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa bila nilai LQ suatu sektor > 1 , maka sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi pada sektor yang sama di tingkat regional, sehingga sektor tersebut merupakan sektor yang potensial bagi daerah. Bila nilai LQ < 1 , maka sektor yang bersangkutan kurang terspesialisasi daripada sektor yang sama di tingkat regional, sehingga sektor yang bersangkutan bukan merupakan sektor basis atau sektor yang tidak potensial bagi daerah. Bila nilai LQ = 1, maka sektor yang bersangkutan sama tingkat spesialisasinya dengan tingkat regional.

2.6. Perubahan Struktur Ekonomi

Metode Analisis *Shift-Share* (S-S) digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu wilayah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor-sektor "unggul" pada suatu wilayah.

Metode analisis ini pada hakekatnya merupakan teknik yang relatif sederhana untuk menganalisis perubahan struktur perekonomian lokal dalam kaitannya dengan perekonomian acuan yang lebih besar. Perekonomian lokal dapat berupa kota, kabupaten atau propinsi, sedangkan perekonomian acuan dapat berupa propinsi atau negara.

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo apakah lebih cepat atau lebih lambat dari daerah yang lain, perlu dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih luas yaitu Propinsi Sulawesi Selatan. Perbandingan ini atas dasar bahwa perekonomian Kabupaten Wajo dapat memberikan sumbangan terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan, karena perbandingan pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan perubahan struktur perekonomian daerah dan perubahan-perubahan dengan menekankan pada bagian-bagian pertumbuhan sektor-sektor dengan data PDRB. Dalam penggunaannya, teknik *Shift-Share* dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo ditentukan tiga hal yaitu:

$$D_{ij} = N_{ij} + C_{ij}$$

Dimana;

D_{ij} = Perubahan struktur ekonomi

$N_{ij} = Y_{ij} \cdot r_{ij}$. Untuk mengukur struktur atau posisi relatif Kabupaten Wajo dalam kaitanya dengan Propinsi Sulawesi Selatan (kontribusi Kabupaten Wajo dalam pembentukan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan).

$M_{ij} = Y_{ij}(r_{in} - r_n)$, untuk mengukur sejauh mana laju pertumbuhan PDRB sektor i di Kabupaten Wajo berbeda dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan pada sektor yang sama.

$C_{ij} = Y_{ij}(r_{ij} - r_{in})$, *differensial shift* terjadi apabila output sektor i di Kabupaten Wajo memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDRB Propinsi Sulawesi Selatan pada sektor yang sama.

2.7. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan gabungan dari sektor yang menjadi sumber-sumber pendapatan. Oleh sebab itu, dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah diupayakan peningkatan-peningkatan pada berbagai sektor kegiatan pertumbuhan ekonomi, seperti: pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan jasa serta sektor-sektor lainnya yang secara keseluruhan dapat meningkatkan pendapatan nasional secara umum dan daerah pada khususnya.

Untuk menghitung PDRB pada skala nasional maupun daerah didasarkan pada dua pendekatan yaitu perhitungan melalui harga konstan dan harga yang berlaku. Pendekatan melalui harga konstan yaitu perhitungan terhadap jumlah pendapatan nasional maupun daerah dalam nilai rupiah sedangkan perhitungan berdasarkan harga berlaku adalah perhitungan jumlah pendapatan nasional atau daerah melalui persentase masing-masing sumber pendapatan.

2.8. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Diduga bahwa sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa, merupakan sektor ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Konsepsional

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah diperlukan sistem perekonomian yang baik untuk menunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Wajo.

Pembangunan ekonomi daerah dapat didorong melalui kekuatan-kekuatan sosial ekonomi yang berasal dari dalam dan luar daerah atau wilayah. Kekuatan-kekuatan itu dalam bentuk faktor-faktor produksi dan permintaan terhadap output dari perkembangan sektor ekonomi unggulan.

Pembangunan ekonomi daerah diharapkan akan menyebabkan berkembangnya sistem perekonomian dikarenakan potensi ekonomi daerah yakni sektor-sektor ekonomi tumbuh dan berkembang serta mengalami perubahan struktural ekonomi yang mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktifitas pertanian ke arah sektor non-pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa.

Pergeseran kegiatan perekonomian bergerak cepat apabila sektor-sektor yang menjadi unggulan dapat teridentifikasi dan dikembangkan dengan mengetahui pertumbuhan dan struktur ekonomi. Untuk mengetahuinya diperlukan suatu metode analisis yang dapat membedakan sektor unggulan dan bukan unggulan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis ekonomi basis. Metode yang dimaksud adalah *Location Quotient* (LQ) untuk menentukan sektor basis dan bukan

basis. Selain itu, digunakan juga metode analisis *Shift Share* (S-S) untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan landasan teori yang dapat mendukung penulisan, melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku literatur, maupun dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu pengamatan langsung dengan mendatangi objek penelitian dengan menggunakan data sekunder dari instansi atau kantor yang sesuai dengan masalah penelitian di Kabupaten Wajo.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian, berupa data kualitatif.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan penelitian ini, berupa data kuantitatif.

3.4. Metode Analisis

3.4.1. Analisis Location Quotient

Untuk menentukan sektor ekonomi unggulan digunakan alat analisis yaitu Location Quotient.

Analisis basis ekonomi yang biasanya disebut sebagai teori basis ekonomi digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan dari sektor andalan (basis). Analisis Location Quotient (LQ) digunakan dengan tujuan untuk melihat keunggulan komperatif "self-sufficiency" suatu daerah. LQ ini dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dengan membandingkan sektor yang sama di daerah lainnya. Secara matematis Location Quotient dirumuskan sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{y_i / y}{Y_i / Y}$$

Dimana :

LQ_i : Angka LQ sektor i Kabupaten Wajo

y_i : PDRB-sector i Kabupaten Wajo

y : PDRB Kabupaten Wajo

Y_i : PDRB sektor i Propinsi Sulawesi Selatan

Y : PDRB Propinsi Sulawesi Selatan

3.4.2. Analisis Shift-Share

Model ini mengasumsikan bahwa perubahan atau pergeseran pendapatan sektor i di wilayah j antara tahun dasar dengan tahun akhir ditentukan oleh tiga

komponen pertumbuhan, yaitu : komponen pertumbuhan nasional, komponen pertumbuhan proporsional, dan komponen daya saing wilayah.

Untuk menganalisis sektor i di wilayah j digunakan persamaan :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Selanjutnya, apabila analisis ini diterapkan pada pertumbuhan ekonomi Y , maka :

$$D_{ij} = y_{ij} + M_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

$$N_{ij} = N_{ij} \cdot r_n \dots\dots\dots (3)$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_m - r_n) \dots\dots\dots (4)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (5)$$

dimana :

r_{ij} : laju pertumbuhan sektor wilayah i di wilayah j

r_{in} : laju pertumbuhan sektor wilayah i di wilayah n

r_n : laju pertumbuhan regional

masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = (Y_{ij}^* - Y_{ij}) / Y_{ij} \dots\dots\dots (6)$$

$$r_m = (Y_{in}^* - Y_{in}) / Y_{in} \dots\dots\dots (7)$$

$$r_n = (Y_n^* - Y_n) / Y_n \dots\dots\dots (8)$$

semua diukur pada suatu tahun dasar. Untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional (3) bauran industri, (4) dan keunggulan kompetitif (5) dapat ditentukan bagi suatu sektor i atau dijumlah untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Persamaan Shift-share untuk sektor i di wilayah j adalah :

$$D_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n + Y_{ij} (Y_{ij} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (9)$$

Analisis Shift-Share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan ekonomi nasional (Arsyad, 1999 ; 290). Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar.

Kelemahan-kelemahan analisis Shift-Share, antara lain :

1. Analisis Shift-Share tidak dapat menjelaskan secara lengkap mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah lebih cepat atau lebih lambat.
2. Seluruh produksi dan tenaga kerja pada suatu sektor di anggap homogen.
3. Tidak secara lengkap dapat memberikan implikasi-implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari hasil analisis.

3.5. Defenisi Operasional

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu peningkatan kapasitas dan volume produksi yang dihasilkan daerah.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah barang

dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan menurut periode tertentu.



4. Lapangan Usaha

Lapangan Usaha adalah lapangan usaha yang meliputi sembilan sektor ekonomi Kabupaten Wajo, yaitu : Sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

5. Sektor Basis

Sektor Basis adalah sektor yang mampu memenuhi produksi atau tenaga kerja di daerah sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan.

6. Sektor Non-Basis

Sektor Non-Basis adalah sektor yang hanya dapat memenuhi kebutuhan produksi atau tenaga kerja di daerah sendiri.

7. Kontribusi Sektor

Kontribusi Sektor adalah sumbangan atau peranan (Share) yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB.

BAB IV

KONDISI UMUM PEREKONOMIAN KABUPATEN WAJO

Perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat dilihat pada berbagai sisi antara lain: perkembangan harga atau inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan perkapita, serta dengan melihat lebih detail sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap total pendapatan wilayah (PDRB).

4.1. Harga sembako

Perkembangan harga kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dianggap dapat mewakili perkembangan harga dari berbagai jenis kebutuhan konsumsi masyarakat yang paling utama. Perkembangan harga Sembako selama tahun 2004 di Kabupaten Wajo mengalami kenaikan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga-harga pada tahun 2003. dari sembilan jenis kebutuhan pokok itu sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 rata-rata mengalami penurunan harga sebesar -0,21%.

Jenis Sembako yang mengalami peningkatan harga tertinggi adalah garam, yaitu dari Rp. 750 per kg pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp. 1000 per kg pada tahun 2004 atau mengalami kenaikan sebesar 33,33%. Namun, kenaikan harga garam tersebut tidak terlalu merisaukan masyarakat, dibanding kenaikan harga beras sebagai bahan makanan pokok yang mengalami kenaikan harga dari Rp. 2.755 per kg pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp.2.949 per kg pada tahun 2004 atau meningkat sekitar 7,04%. Jenis beras yang dimaksud adalah jenis beras kepala. Selanjutnya

perubahan harga untuk jenis Sembako lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Perkembangan Harga Sembilan Bahan Pokok
di Kabupaten Wajo Tahun 2003-2004

Jenis Komoditas	Satuan	2003	2004	Perubahan (%)
Beras	Rp/Kg	2.755	2.949	7,04
Ikan Asing	Rp/Kg	21.261	27.406	28,90
Minyak Goreng	Rp/Ltr	4.950	6.082	22,87
Gula Pasir	Rp/Kg	4.684	4.497	-3,99
Garam	Rp/Kg	750	1.000	33,33
Minyak Tanah	Rp/Ltr	1.500	1.200	-20,00
Sabun Cuci	Rp/Btg	2.300	2.300	0,00
Tekstil	Rp/M	5.500	5.500	0,00
Batik	Rp/M	47.333	25.000	-47,18

Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2004.

4.2. Laju Inflasi

Gambaran mengenai perubahan dan kestabilan harga pada suatu wilayah dari berbagai komoditas (barang dan jasa) dapat ditunjukkan oleh laju inflasi. Semakin rendah laju inflasi, maka berarti semakin rendah atau semakin stabil gejolak perkembangan harga dalam kurun waktu dan dalam suatu wilayah, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pengendalian tingkat harga sering diukur dengan tingkat laju inflasi.

Laju inflasi merupakan tingkat kecepatan peningkatan harga yang dihitung secara tertimbang dari berbagai kelompok komoditas. Dalam kepentingan tertentu (yang terkendali), inflasi dibutuhkan pada tingkat tertentu demi untuk merangsang peningkatan produksi di berbagai sektor usaha. Berkaitan dengan hal itu, laju inflasi yang dihitung disini menyangkut kecepatan perubahan harga dari tahun ke tahun pada

tingkat produsen. Artinya, perubahan harga yang diukur berada pada level produsen, bukan pada level konsumen. Konsekwensinya, maka laju inflasi rata-rata seluruh komoditas barang dan jasa tersebut akan sangat tergantung pada perubahan harga pada komoditas yang dominan diproduksi di Kabupaten Wajo. Dalam hal ini, sangat tergantung pada komoditas yang diproduksi di sektor pertanian.

Laju inflasi pada tingkat produsen dari seluruh komponen produksi pada sektor-sektor usaha seperti dalam rincian PDRB, disajikan pada Tabel 4.2 dan Grafik 4.1 berikut ini:

Tabel 4.2
Laju Inflasi Komoditas Barang dan Jasa Menurut Sektor Produksi
di Kabupaten Wajo Tahun 2001-2004

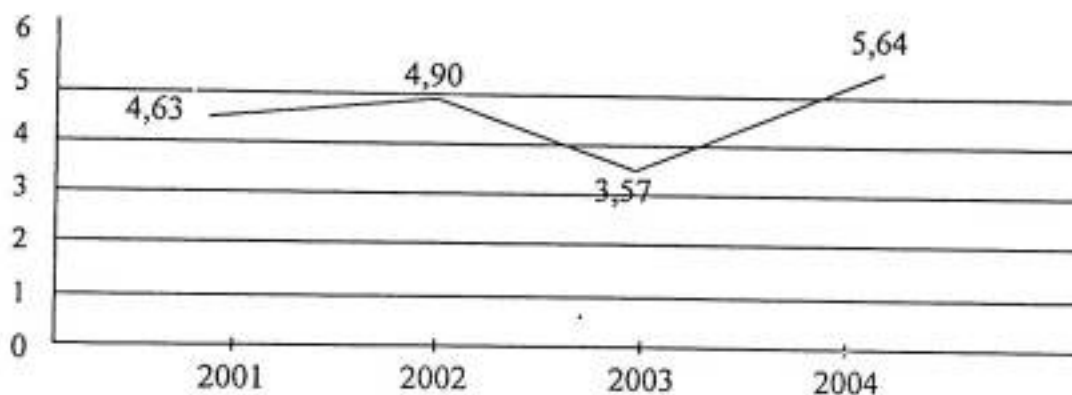
Sektor Produksi	2001	2002	2003	2004
Pertanian	3,18	5,58	2,39	6,04
Pertambangan dan Penggalian	0,99	1,37	0,93	0,93
Industri Pengolahan	3,68	1,90	2,95	8,29
Listrik dan Air Bersih	7,02	18,74	18,89	3,64
Bangunan	2,79	2,63	4,81	5,73
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,97	4,63	6,10	5,10
Angkutan dan komunikasi	8,44	6,13	3,16	2,66
Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	4,73	3,53	4,49	8,77
Jasa-jasa	10,30	4,75	4,34	7,17
Total	4,63	4,90	3,57	5,64

Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2004

Laju inflasi rata-rata di Kabupaten Wajo selama periode 2001-2004 tergolong rendah dan perkembangannya tergolong relatif stabil selama periode tersebut, yaitu 4,63% pada tahun 2001, 4,90% pada tahun 2002, 3,57% pada tahun 2003, namun pada tahun 2004 meningkat menjadi 5,64%.

Tingkat inflasi menurut sektor produksi tampak sangat bervariasi. Pada tahun 2003, terlihat produksi di sektor pertambangan mengalami inflasi rendah sebesar 0,93%, sementara jenis komoditas lainnya semuanya mengalami inflasi di atas 2 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh sektor listrik dan air bersih sebesar 18,89%, urutan kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,10%. Tingkat inflasi dari tahun ke tahun dapat juga dilihat pada Grafik 4.1 berikut ini:

Grafik 4.1
Tingkat Inflasi Kabupaten Wajo Tahun 2001-2004 (%)



Selama tahun 2004 laju inflasi dari seluruh sektor tampak relatif lebih stabil, seluruh sektor mempunyai tingkat inflasi di bawah dua digit(kurang dari 10 persen). Sektor yang mempunyai inflasi yang lebih tinggi adalah sektor keuangan yakni sebesar 8,77%, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 8,29%, disusul oleh sektor jasa-jasa sebesar 7,17%, dan sektor pertanian mempunyai tingkat inflasi sebesar 6,04%, sedangkan sektor dengan tingkat inflasi terendah adalah sektor pertambangan sebesar 0,93%.

Tampaknya situasi perubahan harga-harga di Kabupaten Wajo sejak 4 tahun terakhir, yakni dari tahun 2001 sampai dengan 2004 sudah mulai menunjukkan

keseimbangan baru karena tingkat keseragaman laju inflasi yang dialami oleh seluruh sektor produksi sudah semakin rendah. Hal seperti ini merupakan gambaran nyata dari ketimpangan perubahan harga produsen di antara sektor-sektor produksi yang semakin mengecil. Tentunya hal tersebut diharapkan agar perekonomian bisa lebih stabil dan berkembang.

4.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo selama periode 2001-2004 rata-rata mencapai 3.02% per tahun. Angka sebesar itu merupakan peningkatan PDRB secara riil atau penilaian PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2000). Dalam periode itu, pertumbuhan ekonomi setiap tahun di Kabupaten Wajo sebesar 7,36% pada tahun 2001, -0,24% pada tahun 2002, 4,24% pada tahun 2003. Memasuki tahun 2004, perekonomian Kabupaten Wajo tampak kembali mengalami pertumbuhan positif, meskipun pertumbuhannya melambat hanya 3,13%.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo disebabkan oleh penurunan produksi hasil pertanian tanaman pangan karena ketidakmampuan mengatasi gejala alam yang tidak menentu. Pada tahun 2004 terjadi kekeringan, walaupun pada awalnya hujan juga turun, namun setelah itu tingkat curah hujan mulai menurun hingga terjadi musim kemarau, sehingga mengakibatkan tanaman padi banyak mengalami kekeringan. Kondisi seperti itu sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, karena sektor pertanian masih mendominasi sekitar 42,99% dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wajo. Akibatnya, sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,52% pada tahun 2004.

Tabel 4.3
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Wajo Tahun 2001-2004

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2000	1.503.890,44	1.503.890,44	-
2001	1.689.315,61	1.614.538,10	7,36
2002	1.767.847,85	1.610.684,02	-0,24
2003	1.908.595,54	1.678.917,14	4,24
2004	2.079.375,87	1.731.527,71	3,13
Rata-rata Periode 2001-2004			3,02

Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2004

Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertanian secara umum masih tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Wajo dampaknya tidak terlalu merisaukan masyarakat karena secara relatif pendapatan mereka masih lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan dalam beberapa tahun yang lalu. Artinya, perekonomian di Kabupaten Wajo masih relatif stabil.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2002 sektor pertanian yang tumbuh negatif -6,70%, akan tetapi pada tahun 2003 sektor ini telah tumbuh sebesar 2,47%. Sedangkan pada tahun 2004, sektor pertanian kembali tumbuh negatif -2,52%. Selain itu, sektor keuangan sebagai sektor yang paling besar tingkat pertumbuhannya, yakni dari 14,62% pada tahun 2003 meningkat menjadi 30,56% pada tahun 2004. Demikian juga sektor industri pengolahan, perdagangan, listrik dan air bersih, bangunan, pertambangan, jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan pada tahun 2004.

Sebaliknya, sektor angkutan dan komunikasi mengalami penurunan pada pertumbuhannya. Gejolak turunnya tingkat pertumbuhan sektor ini dari 5,83% pada

tahun 2003 menjadi 3,60% pada tahun 2004 disebabkan oleh menurunnya jumlah armada angkutan jalan raya. Hal itu berarti bahwa perekonomian Kabupaten Wajo di luar sektor pertanian secara umum telah mengalami pertumbuhan secara konsisten di saat masih belum stabilnya perekonomian tanah air. Pertumbuhan masing-masing sektor secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Wajo Tahun 2001-2004

Sektor	2001	2002	2003	2004
Pertanian	8,52	-6,70	2,47	-2,52
Pertambangan dan Penggalian	7,69	5,37	2,10	3,17
Industri Pengolahan	-1,69	2,53	2,90	13,04
Listrik dan Air Bersih	16,57	1,12	2,68	8,88
Bangunan	1,26	2,60	4,01	6,47
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,62	9,51	9,67	12,17
Angkutan dan Komunikasi	2,57	5,14	5,83	3,60
Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	11,31	3,56	14,62	30,56
Jasa-jasa	8,27	5,76	1,14	2,99
Produk Domestik Regional Bruto	7,36	-0,24	4,24	3,13

Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2004

4.4. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan masyarakat atau sumber mata pencaharian penduduk sebagai pelaku ekonomi di Kabupaten Wajo dapat digambarkan oleh distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha (sektor-sektor ekonomi). Selain itu, dapat juga digambarkan oleh struktur perekonomian atau kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan total PDRB di Kabupaten Wajo.

Perkonomian di Kabupaten Wajo sangat tergantung pada sektor pertanian. Hal tersebut digambarkan oleh peranan masing-masing sektor kegiatan ekonomi

dalam menciptakan total PDRB di Kabupaten Wajo, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Tenaga Kerja dan PDRB Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Wajo Tahun 2003 dan 2004

Sektor Produksi	Distribusi Tenaga Kerja (%)		Distribusi PDRB (%)	
	2003	2004	2003	2004
Pertanian	71,37	54,75	45,31	42,99
Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,31	8,25	7,89
Industri Pengolahan	3,37	10,40	3,85	4,33
Listrik dan Air Bersih	0,52	1,04	1,11	1,15
Bangunan	1,17	1,26	2,28	2,48
Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,07	18,50	20,32	21,18
Angkutan dan Komunikasi	2,47	3,67	4,86	4,74
Kuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	0,13	3,21	3,56	4,65
Jasa-jasa	6,62	6,86	10,45	10,59
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2004

Pada tahun 2004, kontribusi sektor pertanian mencapai 42,99% terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Kontribusi sebesar itu menyerap tenaga kerja sebesar 54,75% dari total tenaga kerja di Kabupaten Wajo. Besarnya porsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian yang melebihi besarnya kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian masih relatif rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Selain sektor pertanian, tampak tiga sektor ekonomi yang mempunyai daya serap tenaga kerja yang dominan, yaitu sektor perdagangan sebesar 18,50% dengan kontribusi 21,18% terhadap PDRB, sektor industri pengolahan sebesar 10,40%

dengan kontribusi 4,33% terhadap PDRB, dan sektor jasa-jasa sebesar 6,86% dengan kontribusi 10,59% terhadap PDRB.

Sementara itu, penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor lainnya masih sangat kecil, namun memiliki kontribusi terhadap PDRB melebihi besarnya daya serap tenaga kerja pada sektor yang sama. Sebagai contoh, sektor keuangan hanya menyerap tenaga kerja sebesar 3,21%, namun mempunyai kontribusi terhadap PDRB sebesar 4,65%. Sebaliknya, sektor industri pengolahan yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 10,40%, akan tetapi hanya mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 4,33%.

Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wajo dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerjanya menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja yang ada pada sektor tersebut relatif masih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Namun hal itu dapat dimengerti karena industri pengolahan yang ada di Kabupaten Wajo masih berbasis pada Industri Rumah Tangga dan Kerajinan yang melakukan pertenenan sarung sutera secara tradisional.

4.5. Pendapatan Perkapita

Gambaran kemakmuran penduduk suatu wilayah sering dikaitkan dengan perolehan PDRB per kapita yang ada di wilayah itu. Perlu diketahui bahwa PDRB per kapita dalam uraian berikut masih mengandung nilai pajak. Sebagaimana telah diketahui bahwa PDRB per kapita bukanlah merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk yang siap dibelanjakan (*disposable income*) di wilayah itu,

karena adanya beberapa jenis barang maupun jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah tidak diminati oleh penduduk di wilayah itu sendiri. Akan tetapi hal itu dilakukan karena sulitnya diperoleh data penghasilan per kapita yang benar-benar dapat dinikmati oleh masing-masing penduduk.

Besaran PDRB per kapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk. Setiap tahun, besaran PDRB per kapita Kabupaten Wajo mengalami peningkatan. Pada tahun 2004, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Wajo telah mencapai Rp. 5.587.557, atau setara dengan nilai harga konstan 2000 sebesar Rp. 4.652.843. Sedangkan di tahun 2000 PDRB per kapita Kabupaten Wajo hanya sebesar 4.192.461, atas dasar harga berlaku, selanjutnya meningkat menjadi Rp. 4.696.679, pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 naik menjadi Rp. 4.896.014, dan meningkat lagi menjadi Rp. 5.231.609, pada tahun 2003. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
Kabupaten Wajo Tahun

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Perkembangan (%)	Atas Dasar Harga Konstan 2000	Perkembangan (%)
2000	4.192.461	-	4.192.461	-
2001	4.696.679	12,03	4.488.781	7,08
2002	4.896.014	4,24	4.460.752	-0,62
2003	5.231.609	6,85	4.602.042	3,17
2004	5.587.557	6,80	4.652.843	1,10

Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2004.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Wajo, maka digunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ) dengan periode pengukuran tahun 2000-2004. Sedangkan untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi dipergunakan alat analisis *Shift-Share* (S-S) dengan periode pengamatan tahun 2000-2004.

5.1. Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Unggulan

Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi unggulan dan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Wajo, maka digunakan alat-alat analisis dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan. Alat-alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.1.1. Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk mengetahui posisi relatif dari masing-masing sektor apakah masuk ke dalam kategori basis atau bukan basis, maka dapat dijelaskan dengan metode analisis LQ sebagaimana pembahasan berikut ini:

Tabel 5.1
Angka Location Quotient (LQ) Menurut Sektor Ekonomi
Kabupaten Wajo Periode Tahun 2000 – 2004



No	SEKTOR	2000	2001	2002	2003	2004
1	Pertanian	1,311	1,348	1,240	1,259	1,281
2	Pertambangan dan Penggalian	0,949	1,091	1,390	1,171	0,961
3	Industri Pengolahan	0,336	0,295	0,297	0,287	0,321
4	Listrik dan Air Bersih	0,895	0,914	0,890	1,009	1,127
5	Bangunan	0,603	0,518	0,515	0,515	0,534
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,243	1,190	1,273	1,360	1,414
7	Angkutan dan Komunikasi	0,763	0,715	0,760	0,728	0,684
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,766	0,767	0,746	0,723	0,776
9	Jasa-Jasa	0,830	0,835	0,882	0,907	0,940

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Wajo (Data diolah kembali)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, sektor ekonomi yang masih konstan dari awal pengamatan tahun 2000 sampai dengan 2004 yang berkoefisien $LQ > 1$ adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian pada awal pengamatan berkoefisien $LQ < 1$, namun pada periode tahun 2001 -2003 berkoefisien $LQ > 1$, tapi pada akhir periode pengamatan sektor ini kembali berkoefisien $LQ < 1$. Kemudian pada sektor listrik dan air bersih, di awal periode pengamatan sampai dengan tahun 2002 berkoefisien $LQ < 1$, tapi pada periode 2003-2004 sektor ini berkoefisien $LQ > 1$. Secara lengkap hasil perhitungan LQ persektor selama periode pengamatan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Berdasarkan kriteria analisis Location Quotient, bahwa sektor yang berkoefisien $LQ > 1$ disebut sebagai sektor yang potensial, dengan demikian sektor yang berpotensi untuk dikembangkan karena mempunyai kemampuan yang mantap

terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Wajo secara keseluruhan adalah **sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran**. Begitu juga dengan sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik dan air bersih, juga mempunyai potensi untuk dikembangkan meskipun tidak konstan berkoefisien $LQ > 1$. Kemampuan sektor yang potensial dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, sektor-sektor yang sejak awal hingga akhir periode pengamatan hasil analisisnya berkoefisien $LQ > 1$ dapat dikatakan sebagai sektor yang mempunyai kemampuan terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Wajo serta dapat mendukung pertumbuhan perekonomian Sulawesi Selatan, meskipun dengan proporsi yang berbeda. Sebaliknya, sektor yang berkoefisien $LQ < 1$, dianggap sebagai sektor yang kurang atau tidak potensial, sektor-sektor itu belum berpotensi memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan karena hanya bersifat lokal atau hanya mampu menyumbang bagi PDRB Kabupaten Wajo.

Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang potensial dengan menggunakan analisis LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang dapat dikembangkan atau perlu mendapat perhatian lebih dalam perekonomian Kabupaten Wajo karena kedua sektor ini tetap berkoefisien $LQ > 1$ dari awal hingga akhir periode pengamatan. Sektor yang juga perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik dan air bersih, meskipun sektor ini tidak konstan berkoefisien $LQ > 1$ dari awal hingga akhir periode pengamatan.

5.1.2. Analisis Shift-Share (S-S)

Analisis S-S ini digunakan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi yang terlihat dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terjadi di Kabupaten Wajo dan Propinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2000-2004 yang dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan 5.3 berikut:

Tabel 5.2
Perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993
Kabupaten Wajo Periode Tahun 2000-2004

No	Sektor	PDRB Kab. Wajo (Juta Rp)		Perubahan PDRB (Juta Rp)	
		2000	2004	Absolut	%
1	Pertanian	747.278	755.694	8.416	0,011
2	Pertambangan dan Penggalian	131.581	157.283	25.712	0,19
3	Industri Pengolahan	65.195	76.442	11.247	0,17
4	Listrik dan Air Bersih	11.586	15.253	3.667	0,31
5	Bangunan	36.434	44.162	7.728	0,21
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	255.044	352.967	97.923	0,38
7	Angkatan dan Komunikasi	68.41	880.881	12.471	0,18
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	45.443	78.386	32.943	0,72
9	Jasa-Jasa	142.917	170.455	27.538	0,19
Jumlah		1.503.888	1.731.523	227.635	0,15

Sumber: BPS, PDRB Kab. Wajo (data diolah kembali)

Pada tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Wajo pada periode tahun 2000-2004, meningkat sebesar Rp. 227.635, juta atau mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Sektor yang mengalami kenaikan tertinggi adalah sektor **keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan**, yaitu dengan kenaikan 0,72%, dari Rp. 45.443 juta menjadi Rp. 78.386 juta. Urutan kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni sebesar 0,38%. Urutan ketiga yaitu sektor listrik dan air

bersih sebesar 0,31%, selanjutnya sektor bangunan sebesar 0,21%. Sektor berikutnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa masing-masing sebesar 0,19%, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 0,18%, sektor industri pengolahan sebesar 0,17%, sedangkan sektor yang paling rendah tingkat kenaikannya adalah sektor pertanian yakni dari Rp. 747.278 juta menjadi Rp. 755.694 juta atau hanya sebesar 0,011%.

Tabel 5.3
Perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993
Propinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2000-2004

No	Sektor	PDRB Prop. Sul-Sel (Juta Rp)		Perubahan PDRB (Juta Rp)	
		2000	2004	Absolut	%
1	Pertanian	11.661.151	12.313.064	651.913	0,06
2	Pertambangan dan Penggalian	2.837.102	3.498.308	661.206	0,23
3	Industri Pengolahan	3.990.794	4.980.594	989.800	0,24
4	Listrik dan Air Bersih	265.582	330.143	64.561	0,24
5	Bangunan	1.233.904	1.684.331	450.427	0,36
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4.206.616	5.420.041	1.213.425	0,28
7	Angkutan dan Komunikasi	1.834.276	2.634.374	800.089	0,43
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.213.347	2.198.255	984.908	0,81
9	Jasa-Jasa	3.520.556	4.207.855	687.299	0,19
	Jumlah	30.763.328	37.266.965	6.503.637	0,21

Sumber: BPS, PDRB Propinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)

Selama periode tahun 2000-2004, PDRB Propinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 6.503.637 juta rupiah, meningkat dari 30.763.328 juta rupiah menjadi 37.266.965 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 0,21%. Sektor yang paling tinggi kenaikannya adalah sektor **keuangan, persewaan dan jasa perusahaan** yaitu sebesar 0,81%. Kemudian disusul oleh sektor angkutan dan komunikasi sebesar 0,43%, sektor bangunan 0,36%, sektor perdagangan, hotel dan

restoran 0,28%, kemudian sektor industri pengolahan dan sektor listrik dan air bersih masing-masing sebesar 0,24%, selanjutnya sektor pertambangan dan penggalian 0,23%, sektor jasa-jasa 0,19%, dan sektor yang paling rendah kenaikannya yaitu sektor pertanian hanya sebesar 0,06%. PDRB Propinsi Sulawesi Selatan secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5.3 diatas.

Berikut ini Tabel 5.4 memperlihatkan lebih rinci PDRB Kabupaten Wajo dan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan dengan laju pertumbuhannya yaitu sebesar 0,21%.

Tabel 5.4
Analisis Shift - Share PDRB Dan Laju Pertumbuhan
Kabupaten Wajo Dan Propinsi Sul-Sel
Atas Dasar Hanya Konstan Menurut Lapangan Usaha

No	Sektor	PDRB Kab. Wajo (Juta Rp)		PDRB Prop. Sul-Sel (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)		
		2000 (Yij)	2004 (Yij)	2000 (Yin)	2004 (Yin)	Wajo (rij)	Sul-Sel (rin)	Regional (rn)
1	Pertanian	747.278	755.694	11.661.151	12.313.064	0,01	0,06	0,21
2	Pertambangan dan Penggalian	131.581	157.283	2.837.102	3.498.308	0,19	0,23	0,21
3	Industri Pengolahan	65.195	76.442	3.990.794	4.980.594	0,17	0,24	0,21
4	Listrik dan Air Bersih	11.586	15.253	265.582	330.143	0,31	0,24	0,21
5	Bangunan	36.434	44.162	1.233.904	1.684.331	0,21	0,36	0,21
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	255.044	352.967	4.206.616	5.420.041	0,38	0,28	0,21
7	Angkatan dan Komunikasi	68.410	80.881	1.834.276	2.634.374	0,18	0,43	0,21
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	45.443	78.386	1.213.347	2.198.255	0,72	0,81	0,21
9	Jasa-Jasa	142.917	170.455	3.520.556	4.207.855	0,19	0,19	0,21
	Jumlah	1.503.888	1.731.523	30.763.328	37.266.965	0,15	0,21	

Sumber: BPS, PDRB Kab. Wajo dan PDRB Prop. Sul-Sel (data diolah kembali)

Rumus:

$$\begin{aligned} r_{ij} \text{ Kabupaten Wajo} &= (Y^*_{ij} - Y_{ij})/Y_{ij} \\ r_{in} \text{ Propinsi Sulawesi Selatan} &= (Y^*_{in} - Y_{in})/Y_{in} \\ r_n \text{ Regional} &= (Y^*_n - Y_n)/Y_n \end{aligned}$$

Pada tabel 5.4 di atas dapat dilihat dengan jelas pertumbuhan atau perubahan PDRB sektor ekonomi menurut lapangan usaha selama periode 2000-2004 dan perbandingan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Wajo terhadap Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo (r_{ij}) rata-rata di bawah nilai pertumbuhan regional PDRB (r_n). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo mempunyai daya saing yang lemah, kecuali pada sektor keuangan, persewaan dan jasa komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor listrik dan air bersih, hanya ketiga sektor ini yang mempunyai laju pertumbuhan yang lebih besar. Kemudian bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan (r_{in}) dengan pertumbuhan regional PDRB juga memiliki pertumbuhan yang lambat.

Kekuatan masing-masing sektor dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB sangat tergantung pada pengaruh-pengaruh pertumbuhan wilayah (N), komponen bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif (C). Untuk menentukan perubahan PDRB dengan analisis *Shift-Share* klasik perlu mengetahui terlebih dahulu besaran dari pengaruh-pengaruh komponen pertumbuhan wilayah,

Komponen bauran industri, dan Komponen keunggulan kompetitif. Berikut ini disajikan analisis S-S klasik sektor-sektor ekonomi Kabupaten Wajo pada Tabel 5.5

Tabel 5.5
Analisis Shift - Share Klasik Sektor-Sektor Ekonomi
Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2000
Periode 2000-2004 (Juta Rp)

No	Sektor	Komponen Pertumbuhan Wilayah (Nij)	Komponen Bauran Industri (Mij)	Komponen Keunggulan Kompetatif (Cij)	Perubahan Bersih	PDRB Nyata (Dij)
1	Pertanian	156.928	-115.828	-32.880	-148.708	8.220
2	Pertambangan Dan Penggalian	27.632	2.632	-5.263	-2.631	25.001
3	Industri Pengolahan	13.691	1.956	-4.564	-2.608	11.083
4	Listrik Dan Air Bersih	2.433	348	811	1.159	3.592
5	Bangunan	7.651	5.465	-5.465	0	7.651
6	Perdagangan, Hotel, Dan Restauran	53.559	17.853	25.504	43.357	96.916
7	Angkatan Dan Komunikasi	14.366	15.050	-17.103	-2.053	12.313
8	Keuangan, Persewaan, Dan Jasa Perusahaan	9.543	27.266	-4.090	23.176	32.719
9	Jasa-Jasa	30.012	-2.858	0	-2.858	27.154
	Jumlah	315.815	-48.116	-43.050	-91.166	224.649

Sumber: Tabel 5.4 (diolah kembali)

Rumus:

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = Y_{ij}(r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = Y_{ij}(r_{ij} - r_{in})$$

$$D_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n + Y_{ij}(r_{in} - r_n) + Y_{ij}(r_{ij} - r_{in})$$

Hasil perhitungan Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Wajo merupakan sumbangan dari pertumbuhan wilayah (Nij), dalam hal ini pengaruh

pertumbuhan regional tersebut memberikan efek yang positif terhadap seluruh sektor. Sektor yang besar peranannya yaitu berasal dari sektor pertanian yakni sebesar 156.928 juta rupiah, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 53.559 juta rupiah, sektor jasa-jasa sebesar 30.012 juta rupiah, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 27.632 juta rupiah. Sektor yang paling sedikit peranannya adalah sektor listrik dan air bersih yang hanya menyumbang sebesar 2.433 juta rupiah. Adanya peranan sektor-sektor tersebut pada tingkat lokal dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan ekonomi di tingkat regional. Dengan demikian pemahaman terhadap sektor yang dominan harus dilengkapi dengan melihat beban Komponen bauran industri (proportional shift) dan keunggulan kompetitif (regional share).

Komponen bauran industri (M_{ij}) juga rata-rata memberikan efek yang positif terhadap PDRB Kabupaten Wajo, kecuali sektor pertanian dan sektor jasa-jasa.

Komponen keunggulan kompetitif (C_{ij}) dapat menentukan bagaimana sektor ekonomi suatu daerah kompetitif dalam perbandingannya dengan sektor yang sama di tingkat regional. Tabel diatas menunjukkan bahwa hampir semua sektor mempunyai efek yang negatif sehingga menyebabkan berkurangnya PDRB Kabupaten Wajo, hanya dua sektor saja yang mempunyai pengaruh positif, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25.504 , dan sektor listrik dan air bersih sebesar 811 juta rupiah, sedangkan sektor bangunan tidak memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif karena sektor ini mempunyai keunggulan kompetitif sama dengan nol. Hal ini berarti sektor yang berpengaruh positif mempunyai keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dibanding sektor-sektor lainnya pada tingkat regional. Sedangkan sektor ekonomi yang mempunyai pengaruh negatif memiliki keunggulan

kompetitif yang rendah. Sektor yang memberikan pengaruh negatif yaitu sektor pertanian sebesar -32.708 juta rupiah, sektor pertambangan dan penggalian sebesar -5.263 juta rupiah, sektor industri pengolahan sebesar -4.564 juta rupiah, sektor bangunan sebesar -5.465, sektor angkutan dan komunikasi sebesar -17.103 juta rupiah, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar -4.090 juta rupiah.

Tabel 5.6
Analisis Shift-Share Klasik Sektor-sektor Ekonomi
Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2000
Periode 2000-2004 (Persentase)

No	Sektor	Nij	Mij	Cij	Perubahan Bersih	Dij	Rangking
1	Pertanian	21,14	-73,81	-20,95	-94,76	-73,52	IX
2	Pertambangan dan Penggalian	21,14	9,52	-19,05	-9,53	11,61	VII
3	Industri Pengolahan	21,14	14,92	-33,33	-19,04	2,10	VIII
4	Listrik dan Air Bersih	21,14	14,30	33,33	47,63	68,77	IV
5	Bangunan	21,14	71,43	71,43	0	21,14	V
6	Pedagangan, Hotel dan Restoran	21,14	33,33	47,62	80,95	10209	III
7	Angkutan dan Komunikasi	21,14	104,76	-19,05	85,71	106,85	II
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	21,14	285,72	-42,86	242,86	264,00	I
9	Jasa-jasa	21,14	-9,52	0	-9,52	11,62	VI

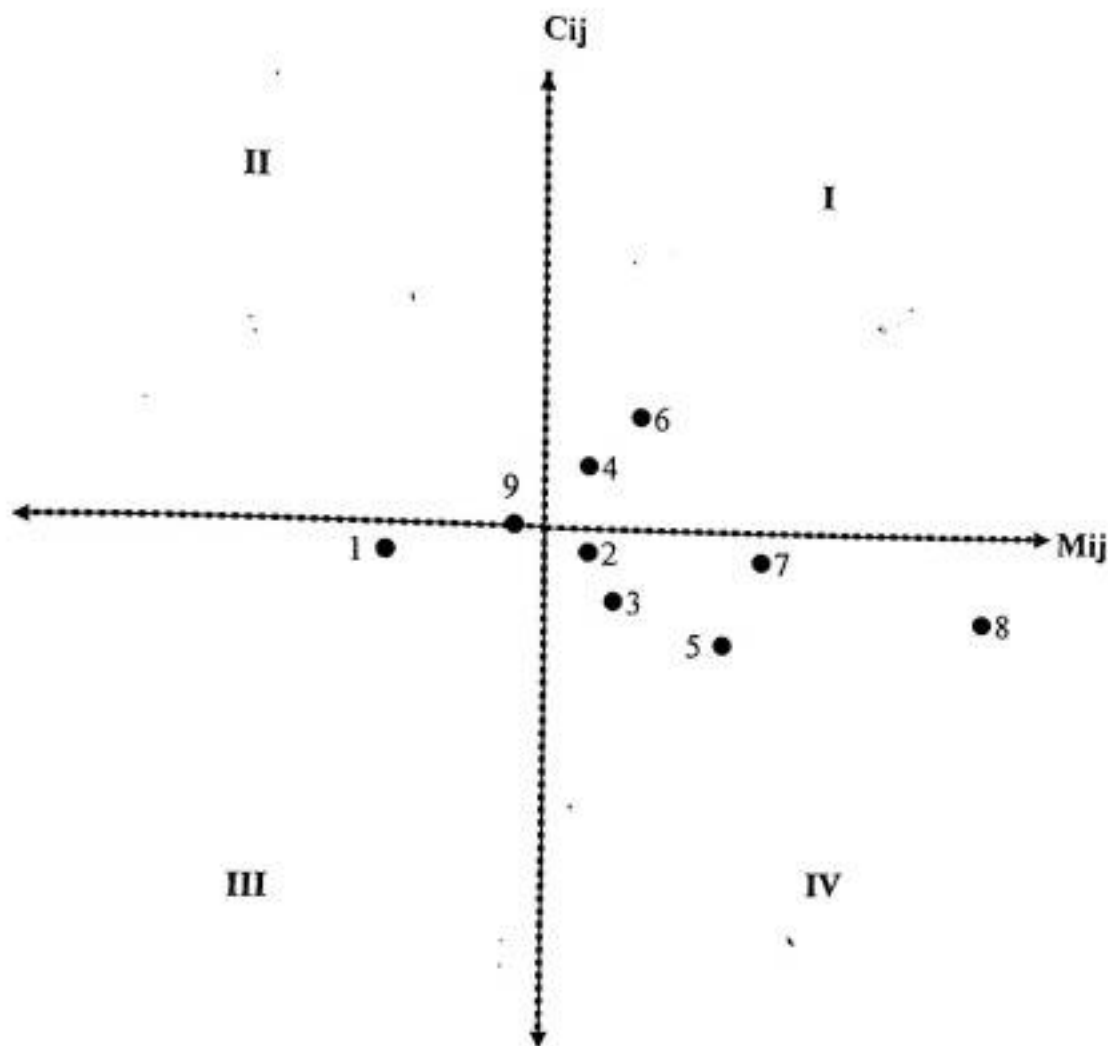
Sumber: Hasil Perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.6 di atas, menunjukkan bahwa persentase perubahan bersih dan PDRB nyata sektor pertanian Kabupaten Wajo yaitu sebesar -94,76%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan pengurang

PDRB Sulawesi Selatan sebesar 94,76%. Sektor yang juga memberikan efek negatif yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar -9,53, sektor industri pengolahan -19,04%, dan sektor jasa-jasa sebesar -9,52%. Kemudian sektor lainnya masing-masing memberikan efek positif. Hanya sektor bangunan saja yang tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya, komposisi relatif sektor ekonomi dapat dilihat melalui gambar 1, yang menunjukkan bahwa sektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan mempunyai daya saing yang kuat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor listrik dan air bersih. Kemudian sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor yang mempunyai pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki daya saing yang lemah. Sedangkan sektor pertanian dan sektor jasa-jasa yang merupakan sektor basis, akan tetapi pertumbuhannya lambat serta memiliki daya saing yang masih lemah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut:

Gambar 1
 Komposisi Relatif PDRB Menurut Lapangan Usaha
 Kabupaten Wajo 2000-2004



Keterangan:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Angkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

5.2. Sektor-sektor Ekonomi yang Potensial

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient dan analisis Shift-Share, maka diperoleh sektor-sektor ekonomi yang potensial. Sektor-sektor ekonomi yang potensial yang diperoleh dari analisis LQ adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Begitu juga dengan sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor listrik dan air bersih masih terhitung potensial untuk dikembangkan meskipun sektor ini tidak konstan berkoeffisien >1 . Sedangkan dari hasil analisis S-S terlihat bahwa sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor listrik dan air bersih. Maka sektor-sektor inilah yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo.

Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran terbukti sebagai sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Wajo. Sedangkan sektor jasa-jasa tidak terbukti sebagai sektor ekonomi unggulan.

Sektor pertanian merupakan sektor basis, tetapi memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang lemah. Hal ini disebabkan terutama karena mayoritas petani masih mengandalkan air hujan karena masih kurangnya proyek pengairan, disamping itu petani masih menggunakan cara dan alat tradisional dalam mengelola lahannya, sehingga pertumbuhan sektor ini lambat dan produk yang dihasilkan kurang mampu bersaing. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, juga merupakan sektor basis yang memiliki daya saing yang kuat, namun pertumbuhannya belum begitu cepat sehingga sektor ini perlu perhatian, terutama untuk hotel-hotel dan

restoran perlu menyiapkan fasilitas yang memadai kepada konsumen agar permintaannya dapat meningkat. Begitu juga dengan sektor listrik dan air bersih, merupakan sektor basis yang juga memiliki daya saing yang kuat, tapi pertumbuhannya masih agak lambat sehingga sektor ini perlu perhatian khusus dari pemerintah. Pada dasarnya sektor pertambangan dan penggalan juga merupakan sektor basis, tapi sektor ini memiliki daya saing yang lemah dan pertumbuhannya pun lambat, sehingga sektor ini butuh banyak perhatian agar bisa tumbuh dengan cepat dan memiliki daya saing yang kuat.

Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial dari hasil analisis Location Quotient dan Shift-Share perlu dioptimalkan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi di daerah. Orientasi ekspor merupakan salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Wajo, hal ini tidak hanya disebabkan karena kondisi pasar domestik yang tidak memadai, namun juga karena perekonomian Kabupaten Wajo masih memiliki sektor-sektor ekonomi yang dapat diunggulkan.

Dalam pengembangan investasi daerah, pemerintah daerah harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam kebijakan ekonomi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal ini, kebijakan yang mendorong masuknya investasi dari luar maupun dari dalam Kabupaten Wajo sendiri pun perlu dilakukan, namun dalam kebijakan investasi ini, pemerintah daerah harus berhati-hati agar investasi yang ditanam di Kabupaten Wajo tidak mengganggu kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat dan keuntungan investor harus juga dapat menguntungkan masyarakat Kabupaten Wajo secara keseluruhan.

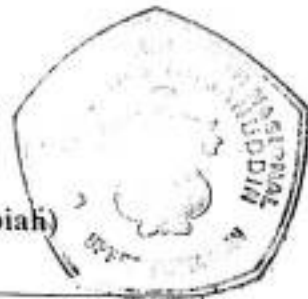
Sektor-sektor ekonomi potensial yang akan dikembangkan dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo antara lain: sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik dan air bersih.

5.3. Analisis Sektor dan Sub-sektor Potensial

5.3.1. Sektor Pertanian

Peningkatan produksi pertanian yang mencakup sub-sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan, baik untuk peningkatan ekspor, untuk pasar regional, maupun untuk kebutuhan pangan masyarakat dan bahan baku industri terus ditingkatkan melalui upaya intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi, dan penganekaragaman komoditi (diversifikasi), pemanfaatan lahan kering, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan efisiensi, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan informasi pasar pasca panen.

Tabel 5.7
Kontribusi Sub-Sektor untuk Sektor Pertanian
dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Wajo (Jutaan Rupiah)



No	Sub-Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	Laju Pertumbuhan Rata-rata
1	Tanaman Bahan Makanan	503.377	552.275	438.811	490.488	451.262	-2,07
2	Tanaman Perkebunan	51.245	56.007	59.267	59.628	55.338	1,59
3	Peternakan	21.815	24.391	26.862	26.327	29.890	7,40
4	Kehutanan	956	1.024	1.050	1.116	660	-6,19
5	Perikanan	169.705	174.236	185.579	197.697	218.544	5,75
	PDRB	747.278	810.933	756.568	775.256	755.694	0,22

Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2004

Sub-sektor unggulan yang perlu dikembangkan pada sektor pertanian berdasarkan sumbangan pertahunnya terhadap PDRB Kabupaten Wajo, seperti yang terlihat pada tabel di atas adalah sub-sektor tanaman bahan makanan dan sub-sektor perikanan. Kedua sub-sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wajo, terutama sub-sektor perikanan yang memiliki pertumbuhan rata-rata positif sebesar 5,75%.

5.3.2. Sektor Perdagangan, hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran mencakup sub-sektor perdagangan, sub-sektor hotel, dan sub-sektor restoran. Sub-sektor perdagangan dihitung dengan pendekatan arus barang. Sub-sektor hotel mencakup semua jenis hotel dan berbagai jenis penginapan yang ada di Kabupaten Wajo. Sub-sektor restoran mencakup

kegiatan penyediaan makanan dan minuman yang langsung dikonsumsi/dihidangkan pada tempat penjualan, baik dengan tempat tetap maupun yang berpindah-pindah.

Tabel 5.8
Kontribusi Sub-Sektor untuk Sektor Perdagangan, Hotel,
dan Restoran dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Wajo
(Juta Rupiah)

No	Sub Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	Laju Pertumbuhan Rata-rata
1	Perdagangan Besar dan Eceran	250.333	266.955	292.449	320.612	346.519	7,68
2	Hotel	366	381	440	606	659	16,01
3	Restoran	4.346	4.599	4.899	5.367	5.790	6,65
	PDRB	255.044	271.936	297.789	326.586	352.968	7,68

Sumber : BPS Kabupaten Wajo, 2004

Sub-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB pada sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sub-sektor perdagangan. Oleh karena itu, yang merupakan sub-sektor unggulan yang perlu dikembangkan adalah sub-sektor perdagangan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 7,68%.

5.3.3. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mencakup sub-sektor bank, sub-sektor lembaga keuangan tanpa bank, sub-sektor sewa bangunan, dan sub sektor jasa perusahaan.

Tabel 5.9
Kontribusi Sub-Sektor untuk Sektor Keuangan, Persewaan,
dan Jasa Perusahaan dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Wajo
(Juta Rupiah)

No	Sub Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	Laju Pertumbuhan Rata-rata
1	BANK	3.739	7.031	7.742	14.766	31.693	149,5
2	Lembaga Keuangan Tanpa Bank	2.215	2.762	2.797	2.858	2.918	6,35
3	Sewa Bangunan	38.481	39.535	40.555	41.086	42.427	2,05
4	Jasa Perusahaan	1.009	1.255	1.287	1.329	1.349	6,74
	PDRB	45.444	50.583	52.382	1.287	78.387	14,50

Sumber : BPS Kabupaten Wajo, 2004

Sub-sektor yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDRB pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah sub-sektor lembaga keuangan bank dengan laju pertumbuhan yang sangat cepat yaitu sebesar 149,5%. Sub-sektor ini merupakan sub-sektor unggulan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut. Begitu pula dengan sub-sektor sewa bangunan yang juga memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Wajo.

5.3.4. Sektor Listrik dan Air Bersih

Sektor listrik dan air bersih mencakup sub-sektor listrik, dan sub-sektor air bersih. Kedua sub-sektor ini perlu mendapat perhatian lebih untuk dikembangkan karena merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Sub-sektor yang memberikan sumbangan yang lebih besar yaitu sub-sektor listrik dengan laju pertumbuhan sebesar 6,46%, sedangkan laju pertumbuhan sub-sektor air bersih adalah sebesar 3,87%, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.10 berikut ini:

Tabel 5.10
Kontribusi Sub Sektor untuk Sektor Listrik dan Air Bersih
Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Wajo
(juta rupiah)

No	Sub Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	Laju Pertumbuhan Rata-rata
1	Listrik	11.028	12.903	13.040	13.398	14.588	6,46
2	Air Bersih	558	603	618	626	666	3,87
PDRB		11.586	13.506	13.658	14.024	15.254	6,33

Sumber : BPS Kabupaten Wajo, 2004

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) untuk periode pengamatan tahun 2000-2004, maka diperoleh empat sektor ekonomi yang menjadi unggulan yang merupakan sektor potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Wajo yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, sektor listrik dan air bersih, dan sektor pertambangan dan penggalian. Namun, sektor listrik dan air bersih dan sektor pertambangan dan penggalian tidak konsisten berkoefisien $LQ > 1$ dari awal sampai akhir periode pengamatan.
2. Berdasarkan hasil analisis *Shift-Share* (S-S) untuk mempertajam hasil analisis LQ, diperoleh sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif yang positif yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor listrik dan air bersih.
3. Sub-sektor yang perlu dikembangkan untuk sektor pertanian adalah sub-sektor tanaman bahan makanan dan sub-sektor perikanan. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sub-sektor perdagangan. Kemudian untuk sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yaitu sub-sektor sewa bangunan dan sub-sektor bank. Sedangkan pada sektor listrik dan air bersih, yang perlu terus dikembangkan adalah sektor listrik.

6.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran yang bisa menjadi masukan dan sekiranya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam rangka memajukan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya, antara lain:

1. Peningkatan produktivitas pertanian terutama sub-sektor tanaman bahan makanan dengan cara membantu petani dalam hal penyediaan bibit unggul yang berkualitas. Begitu pula dengan petani yang selama ini hanya mengandalkan air hujan, mereka perlu dibantu dalam hal pengadaan irigasi atau pengairan, terutama para petani yang berada di dataran tinggi.
2. Sub-sektor perikanan juga berpotensi untuk lebih dikembangkan dengan jalan penyediaan informasi kepada para petani maupun pedagang mengenai informasi pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional.
3. Pemerintah harus memperhatikan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sektor unggulan yang perlu lebih dikembangkan lagi, terutama sub-sektor perdagangan. Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran kegiatan perdagangan di Kabupaten Wajo.
4. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan juga terlihat agak cepat pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sektor ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah terutama sub-sektor bank dan sub-sektor sewa bangunan. Sektor ini bisa menjadi partner bagi sektor perdagangan dalam hal investasi.

5. Sektor ekonomi unggulan kedua setelah pertanian (perdagangan, hotel, dan restoran) perlu digenjot atau diprioritaskan supaya bisa bergeser menjadi unggulan pertama, karena sektor ini mempunyai pertumbuhan dan daya saing yang kuat.
6. Sektor pertanian yang pertumbuhannya lambat, perlu perhatian agar bisa bersaing dengan daerah lain dengan jalan peningkatan kualitas produksi.
7. Tanggung jawab pembangunan bukan hanya beban pemerintah, tetapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak demi kesuksesan pembangunan secara menyeluruh, adil dan merata di Kabupaten Wajo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-4, cetakan ke-1. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN, Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Boediono, 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi 1 BPFE, Yogyakarta.
- BPS dan Bappeda, 2004. *Wajo dalam Angka Wajo*. Wajo.
- _____, 2004. *Indikator Ekonomi Kabupaten Wajo*. Wajo.
- _____, 2004. *PDRB Kabupaten Wajo*. Wajo.
- _____, 2004. *PDRB Propinsi Sulawesi Selatan*. Makassar.
- Hasibuan, Malayu S.P, 1987. *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*. Penerbit PT. Armiko, Bandung.
- Jhingan, ML, 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Terjemahan D. Guritno ed. 3, cet. 7). PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilyas, Baharuddin, 2002. *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*, Cet. 1. Andira Publisher, Makassar.
- Kadaria, 1985. *Ekonomi Ferencanaan*. LPFE – UI, Jakarta.
- Kunarjo, 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Penerbit UI, Jakarta.
- Partadiredja, Ace, 1996. *Perhitungan Pendapatan Nasional*. LP3ES, Jakarta.
- Richardson, Harry W, 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional* (terjemahan paul Sihotang). LPFE- UI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Lembaga Penerbit FE UI dengan Bina Grafika, Jakarta.
- Widodo, Hg. Suseno Triyanto, 1990. *Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Lampiran:

- Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2004 (Juta Rupiah)
- Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wajo atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2004 (Juta Rupiah)
- Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2004 (%)
- Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000-2004 (%)
- Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wajo Tahun 2000-2004 (%)
- Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi-Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2004 (Juta Rupiah)
- Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi-Selatan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2004 (Juta Rupiah)
- Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi-Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2004 (%)
- Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi-Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000-2004 (%)

Tabel lampiran selengkapnya sebagai berikut:

Tabel Lampiran

TABEL 1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN WAJO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2000-2004 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 ¹⁾ (6)
PERTANIAN	747.278,00	820.759,47	824.738,10	864.782,41	853.502,97
a. Tanaman Pangan dan Hortikultura	507.374,84	597.578,16	545.770,90	567.733,89	564.899,31
- Perikanan	21.814,74	27.774,07	24.332,16	30.730,01	45.013,26
- Perikanan	556,49	1.174,75	1.715,51	1.349,89	854,91
- Perikanan	119.701,15	119.749,85	120.015,10	114.690,23	222.479,79
b. KULTIVASI dan PELOMPOKAN Miyak dan Gas Bumi	131.161,19	143.089,46	152.871,34	157.500,42	164.014,29
- Pertambangan Lempung Migas	-	-	-	-	-
- Pertambangan	5.971,11	6.344,70	6.694,04	6.901,57	7.466,28
c. INDUSTRI PERTAMBAHAN	65.190,21	65.452,97	66.471,16	72.551,53	98.001,47
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pertambangan Migas	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	65.190,21	65.452,97	66.471,16	72.551,53	98.001,47
1. Besar Sebangun	11.586,57	10.512,65	11.401,42	12.015,50	14.081,43
2. Kecil dan Kerajinan RI	53.603,64	55.539,85	55.026,54	61.535,03	75.950,04
2. INDUSTRI GAS & AIR BERSIH	11.587,04	14.454,43	17.356,70	21.187,85	23.854,73
- Listrik	11.028,02	12.778,89	15.548,41	20.341,29	20.935,29
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	558,01	675,54	807,87	846,57	919,24
3. BANGUNAN	36.434,04	37.622,43	39.651,70	43.522,70	51.625,84
4. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	255.044,31	290.658,67	333.291,97	387.858,49	440.497,22
- Perdagangan Besar & Eceran	250.232,87	285.575,42	327.202,45	380.549,95	432.210,72
- Hotel	355,85	1401,91	544,53	750,38	851,49
- Restoran	4.345,59	4.921,33	5.487,02	6.508,14	7.419,10
5. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	68.410,32	70.089,26	84.933,89	97.092,48	98.561,54
a. Pengangkutan	65.293,35	72.654,33	80.780,70	87.496,57	97.063,42
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan raya	16.132,40	62.653,57	70.094,07	70.236,61	80.893,32
3. Angkutan laut	8.329,57	6.032,95	6.670,07	10.129,75	10.952,32
4. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
5. Jasa Perantara Angkutan	871,99	997,75	1.781,57	1.147,21	1.247,87
b. Komunikasi	3.116,95	2.424,95	4.157,11	5.203,91	5.517,72
6. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERSEWAAN	45.443,94	52.975,20	55.784,85	65.020,08	65.597,53
a. Bank	3.739,00	7.855,00	9.261,09	18.403,00	42.055,00
1. Lembaga Keuangan tanpa Bank	2.714,70	3.082,09	2.707,09	3.281,40	3.623,60
- Simpanan Berjangka	1.480,58	40.596,44	47.757,31	44.826,94	48.060,70
- Simpanan	1.009,66	1.435,77	1.517,75	1.510,16	1.818,59
2. Jasa Perusahaan	142.917,37	170.674,00	185.055,14	199.521,08	220.234,70
3. Jasa - Jasa	136.274,93	162.205,95	181.102,13	189.649,45	210.772,13
a. Persewaan dan Sewa	6.642,44	7.457,01	7.901,83	8.071,63	9.451,43
1. Sisa	2.289,87	2.428,64	2.711,72	3.132,55	3.427,14
2. Sosial Masyarakat	1.095,89	1.795,23	1.482,70	1.618,82	1.789,42
3. Hiburan dan Rekreasi	3.275,68	3.643,14	3.772,61	3.925,15	4.237,78
3. Perumahan dan Rumah Tangga	1.503.850,44	1.689.215,61	1.757.847,75	1.908.595,54	2.079.375,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.503.850,44	1.689.215,61	1.757.847,75	1.908.595,54	2.079.375,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo
1) Angka Sementara

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wajo

Tabel Lampiran

TABEL 1.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN WAJO
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2000-2004 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 *) (6)
PERTANIAN	747.278,02	812.837,30	756.527,55	778.226,00	750.654,00
1 Tanaman Pangan Makanan	573.375,84	558.274,89	483.811,10	480.487,69	451.269,37
2 Tanaman Perkebunan	51.474,76	50.000,71	59.100,17	39.677,80	50.337,58
3 Perikanan	21.814,74	24.351,05	25.850,52	25.227,32	29.090,44
4 Kehutanan	506,49	1.024,02	1.049,77	1.116,06	659,79
5 Pertambangan dan Pengalihan	159.705,18	174.236,30	185.779,10	197.097,47	218.544,10
- Minyak dan Gas Bumi	131.561,15	141.653,60	145.211,22	150.446,51	157.283,37
- Pertambangan Tanah Migas Pengalihan	28.144,03	32.582,70	40.567,88	46.650,96	61.260,73
INDUSTRI PENGOLAHAN	5.871,11	6.107,72	6.074,21	6.215,21	6.522,82
A. INDUSTRI SDA	55.195,21	64.094,92	65.778,18	57.624,78	70.442,42
- Pengalihan Migas	55.195,21	64.094,92	65.778,18	57.624,78	70.442,42
B. INDUSTRI TANPA SDA	65.136,71	64.264,83	65.716,11	67.024,78	70.442,42
1 Beras/ Singkong	11.546,17	10.448,31	10.611,18	9.171,15	12.150,85
2 Kelepatan/Kelepatan B1	52.678,84	53.646,17	55.261,41	58.754,62	64.291,54
PERIK GAS & AIR BERSEKUTUHAN	11.586,04	12.006,12	12.061,12	14.017,85	15.253,88
1 Gas	11.078,00	12.000,80	12.051,85	13.216,11	14.017,79
2 Listrik	508,04	605,32	609,27	801,74	896,09
PERUMAHAN	30.474,04	30.850,11	31.812,37	30.370,21	44.182,84
PERINDUSTRIAN HOTEL & RESTORAN	555.044,31	571.326,34	577.788,71	570.581,02	559.507,84
1 Restoran/Bar/Hotel/Bar/Hotel	150.240,87	149.284,97	150.641,17	150.542,03	144.516,09
2 Hotel	365,45	360,95	367,11	376,48	659,72
3 Restoran	4.245,59	4.285,81	4.439,77	4.517,16	5.759,02
PERdagangan & KEMERDASARAN	64.411,22	71.190,54	71.111,11	70.411,22	81.891,02
1 Perdagangan/Wholesale	65.273,25	71.820,82	70.211,11	74.211,22	81.892,67
2 Perdagangan	59.132,40	67.158,16	65.442,17	64.011,22	69.410,24
3 Perdagangan	6.038,85	4.662,66	5.768,94	7.023,25	6.478,41
4 Perdagangan	671,97	671,97	671,97	671,97	1.003,92
5 Perdagangan	3.115,95	3.225,72	3.437,11	3.624,77	3.958,16
PERAWAAN, PERSEKUTUAN DAN JASA PERSEKUTUAN	45.443,94	50.580,00	50.240,11	46.020,41	78.386,67
1 Awak	3.739,00	7.031,30	7.161,11	14.701,11	31.082,07
2 Awak/Keuangan/Umum/Baru	1.214,70	2.781,70	2.791,12	2.817,78	2.917,64
3 Awak/Perumahan	30.480,08	29.534,90	29.564,90	29.564,90	3.348,83
4 Awak/Perumahan	1.009,16	1.254,60	1.281,11	1.315,00	170.455,38
JASA JAJA	142.917,47	154.722,34	153.036,11	140.922,45	172.559,71
1 Perumahan/Struktur	126.224,83	147.013,22	146.207,41	147.621,42	172.559,71
2 Jasa/Struktur	6.542,44	7.059,12	7.071,11	7.071,11	7.664,83
3 Jasa/Struktur	2.285,17	1.385,30	1.491,11	2.021,44	2.725,05
4 Jasa/Struktur	1.085,19	1.245,52	1.245,52	1.245,52	1.412,87
5 Perumahan/Struktur	3.775,58	3.447,05	3.437,11	3.437,11	3.725,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.503.892,44	1.614.638,10	1.610.684,12	1.674.912,54	1.731.527,71

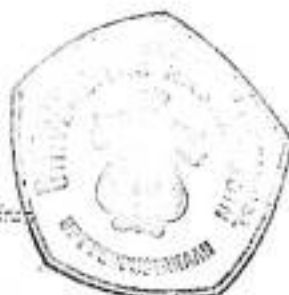
*) Berdasarkan Statistik Kabupaten Wajo
 *) Berdasarkan

Tabel Lampiran

TABEL 2.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN WAJO ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2000-2004 (%)

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 *) (6)
1 PERTANIAN	49,69	49,53	49,92	49,31	43,69
a Tanaman Bahan Makanan	22,47	35,10	31,10	29,75	26,68
b Tanaman Perkebunan	2,42	3,59	3,80	2,70	3,41
c Peternakan	1,45	1,58	1,94	2,02	2,16
d Kehutanan	0,05	0,07	0,17	0,07	0,04
e Perikanan	11,28	9,15	9,92	9,65	10,70
2 PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	8,75	8,47	8,85	8,25	7,89
- Minyak dan Gas Bumi	8,36	8,09	8,27	7,89	7,53
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
- Penggalian	0,39	0,38	0,28	0,37	0,36
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	4,34	3,93	3,53	3,49	4,23
a INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengalangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b INDUSTRI TANPA MIGAS	4,34	3,93	3,53	3,49	4,23
1) Besar/ Sedang	0,77	0,65	0,61	0,62	0,69
2) Kecil dan Kerajinan RT	3,56	3,28	2,92	2,87	3,54
4 LISTRIK GAS & AIR BERSIH	0,77	0,85	0,95	1,11	1,15
- Listrik	0,73	0,82	0,94	1,07	1,10
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05
5 BANGUNAN	2,42	2,24	2,75	2,28	2,48
6 PERDAGANGAN HOTEL & RESTORAN	16,65	17,22	18,85	20,32	21,18
- Perdagangan Besar & Eceran	16,65	16,90	18,51	19,94	20,79
- Hotel	0,07	0,32	0,31	0,38	0,39
- Restoran	0,29	0,29	0,31	0,34	0,39
7 ANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,55	4,50	4,80	4,88	4,48
a Pengangkutan	4,34	4,20	4,57	4,58	4,48
1) Angkutan Rel	-	-	-	-	3,89
2) Angkutan Jalan Raya	3,73	3,71	3,95	3,91	3,93
3) Angkutan Laut	0,15	0,53	0,07	0,52	0,52
4) Angkutan Udara	-	-	-	-	0,08
5) Jasa Penyumpang Angkutan	1,05	0,09	0,05	1,09	0,27
b Komunikasi	0,21	0,30	2,23	0,27	4,01
c Komunikasi Jasa	3,02	3,14	3,71	3,97	2,00
8 KESEWAJIAN, PERSEWAJIAN DAN JASA PERSEWAJIAN	0,25	0,47	0,51	0,50	0,17
a Bank	0,15	0,18	0,18	0,18	0,17
b Lembaga Keuangan tanpa Bank	2,96	2,40	2,42	2,34	2,36
c Sewa Bangunan	0,07	0,08	0,09	0,08	0,08
d Jasa Perusahaan	9,50	10,10	10,66	10,02	10,14
9 JASA - JASA	9,00	9,69	10,24	10,00	10,14
a Pemerintahan Lain-lain	1,44	0,44	0,45	0,45	0,16
b Swasta	0,15	0,14	0,15	0,16	0,09
1) Sosial Kemasyarakatan	0,07	0,08	0,16	0,21	0,20
2) Hiburan dan Rekreasi	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20
3) Perbaikan dan Pemeliharaan	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo
*) Angka Sementara



Tabel Lampiran

TABEL 2.2. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN WAJO ATAS DASAR NARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2000-2004 (%)

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004 ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 PERTANIAN	49,69	50,23	49,07	46,18	42,64
a Tanaman Pangan Makanan	33,47	34,39	30,74	29,21	26,09
b Tanaman Perkebunan	3,42	3,47	3,66	3,55	3,22
c Perikanan	1,45	1,51	1,67	1,57	1,73
d Kerdaman	0,05	0,05	0,07	0,07	0,04
e Perikanan	11,28	10,79	11,52	11,78	17,57
2 PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	8,75	8,78	9,27	5,08	9,01
- Minyak dan Gas Bumi	8,36	8,43	8,88	0,71	8,71
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	0,00	0,00
- Penggalian	0,39	0,35	0,39	0,37	0,30
3 INDUSTRI PENGILAHAN	4,34	3,97	4,08	4,03	4,41
a INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Peningkatan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b INDUSTRI TANPA MIGAS	4,34	3,97	4,08	4,03	4,41
1) Besar/ Sedang	0,77	0,85	0,69	0,66	0,77
2) Kecil dan Kerdaman RT	3,56	3,12	3,42	3,37	3,71
c LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,77	0,84	0,85	0,84	0,93
- Listrik	0,73	0,80	0,81	0,80	0,84
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Gas Kota	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Air Bersih	2,42	2,29	2,35	2,34	2,88
d BANGUNAN	16,95	16,84	16,69	16,10	20,01
e PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	16,65	16,53	16,03	16,04	16,04
- Perdagangan Besar & Eceran	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
- Hotel	0,29	0,28	0,30	0,32	0,33
- Restoran	4,55	4,35	4,58	4,65	4,68
f ANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,34	4,15	4,35	4,42	4,44
a Pengangkutan	-	-	-	-	-
1) Angkutan Laut	3,73	3,96	3,76	3,81	3,84
2) Angkutan Jalan raya	0,55	0,53	0,50	0,55	0,54
3) Angkutan laut	-	-	-	-	-
4) Angkutan Udara	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5) Jasa Penunjang Angkutan	0,21	0,20	0,27	0,23	0,23
b Komunikasi	3,02	3,13	3,25	3,58	4,60
g KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERSH	0,21	0,44	0,48	0,68	1,13
1) Bank	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17
2) Lembaga Keuangan tanpa Bank	2,95	2,45	2,57	2,45	2,45
3) Sewa Bangunan	0,07	0,08	0,07	0,09	0,09
4) Jasa Perumahan	9,50	9,58	10,16	9,85	9,84
h JASA - JASA	9,06	9,15	9,71	9,41	9,29
a Pemecatan Umum	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45
b Swasta	0,10	0,15	0,15	0,16	0,16
1) Sosial Kemasyarakatan	0,07	0,08	0,09	0,08	0,08
2) Hiburan dan Rekreasi	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22
3) Perumahan dan Rumah Tangga	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo
 1) Angka Sementara

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wajo

TABEL 5.6. INFLASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN WAJO TAHUN 2000-2004 (%)

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 ¹⁾ (6)
1 PERTANIAN	-	3,19	5,58	2,39	6,04
a Tanaman Bahan Makanan	-	6,79	6,41	1,86	6,20
b Tanaman Perkebunan	-	6,18	7,04	4,39	5,65
c Peternakan	-	9,77	12,57	14,99	2,35
d Kehutanan	-	14,72	1,01	4,14	7,37
e Perikanan	-	(10,92)	2,04	1,99	6,57
2 PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	-	0,89	1,37	2,93	0,92
- Minyak dan Gas Bumi	-	0,85	1,27	0,84	0,82
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
- Penggalian	-	3,89	7,59	3,05	3,25
3 INDUSTRI, PENGOLAHAN	-	3,66	1,93	2,55	8,29
a INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b INDUSTRI TANPA MIGAS	-	3,66	1,93	2,55	8,29
1) Sesaat Sedang	-	4,44	2,40	1,44	6,77
2) Keras dan Kerajinan RT	-	3,57	1,79	3,25	9,87
c LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	-	7,57	14,74	11,89	3,04
- Listrik	-	6,75	18,81	16,63	3,87
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	-	11,97	15,97	3,97	4,99
4 BANGUNAN	-	2,79	2,63	4,81	9,73
5 PERDAGANGAN HOTEL & RESTORAN	-	6,97	4,53	9,10	9,12
- Perdagangan Besar & Eceran	-	6,98	4,61	9,07	9,04
- Hotel	-	9,53	7,28	(0,00)	9,69
- Restoran	-	6,96	4,67	9,78	9,67
6 ANGKUTAN & KOMUNIKASI	-	8,44	6,73	2,16	2,66
a Pengangkutan	-	8,57	9,85	2,55	2,69
1) Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2) Angkutan Jalan raya	-	6,87	6,45	2,73	2,26
3) Angkutan laut	-	6,24	2,08	1,22	9,35
4) Angkutan Udara	-	-	-	-	-
5) Jasa Penunjang Angkutan	-	11,21	1,95	1,92	7,63
b Komunikasi	-	5,85	12,20	14,47	1,88
7 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA LAIN-LAIN	-	4,73	7,11	4,49	8,77
a Bank	-	11,77	9,75	2,01	6,49
b Lembaga Keuangan lainnya	-	11,60	1,34	2,37	1,78
c Sewa Bangunan	-	2,59	2,13	3,13	6,91
d Jasa Persewaan	-	14,44	7,12	1,08	11,71
e Jasa Lainnya	-	10,33	4,75	4,34	7,21
8 JASA LAIN-LAIN	-	10,52	4,73	4,53	6,04
a Pemeliharaan Umum	-	5,76	3,49	4,53	6,47
b Sesiwa	-	7,69	6,14	5,27	6,07
1) Sosial Masyarakat	-	12,07	1,31	2,73	6,07
2) Hiburan dan Rekreasi	-	3,67	7,12	1,53	4,24
3) Pengajaran dan Rumah	-	-	-	-	-
977 JAR. DEK. DEK. DEK. DEK. DEK. DEK.	-	4,63	3,93	2,17	5,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo
1) Angka Sementara

Tabel Lampiran

TABEL 1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SULAWESI SELATAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2000-2004 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 *) (6)
1. PERTANIAN	11.661.151,82	12.771.670,82	14.472.458,50	15.415.225,19	16.288.572,73
a. Tanaman Bahan Makanan	5.662.805,50	6.029.575,25	6.744.897,63	7.258.650,02	7.350.616,19
b. Tanaman Perkebunan	3.026.461,37	3.561.049,22	4.132.929,73	4.229.569,02	4.748.328,13
c. Perikanan	376.415,59	454.371,41	515.548,33	600.318,18	685.517,80
d. Kehutanan	73.050,49	79.528,17	85.037,04	84.515,73	101.261,77
e. Perikanan	2.452.318,67	2.840.748,67	2.934.267,85	3.121.740,64	3.284.829,04
2. PERTAMBANGAN dan PENGALIAN	7.837.102,23	2.099.244,66	2.264.446,20	3.019.179,67	2.621.283,24
- Minyak dan Gas Bumi	125.710,06	136.744,76	146.128,20	151.521,85	155.658,02
- Pertambangan Tanpa Migas	2.524.333,03	2.347.791,04	2.012.911,67	2.552.274,05	3.463.031,17
- Pengalihan	187.058,12	214.828,85	234.099,03	264.973,16	231.699,07
3. INDUSTRI, PENGOLAHAN	3.990.394,38	4.624.510,37	5.045.557,85	5.741.293,51	6.527.538,81
a. INDUSTRI MIGAS					
- Pengalihan Minyak					
- Gas Alam Cair					
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	3.990.394,38	4.624.510,37	5.045.557,85	5.741.293,51	6.527.538,81
1) Makanan, Minuman, dan Tembakau	1.828.904,52	2.032.018,88	2.244.226,97	2.277.401,03	2.650.968,21
2) Tekstil, Barang dan Kulit, dan Alas Kaki	60.056,93	65.868,88	62.599,34	62.877,75	69.387,49
3) Barang dan Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	403.851,75	547.969,85	611.503,09	641.493,30	727.531,19
4) Kimia dan Barang Corakan	92.099,07	72.326,52	65.959,74	62.718,82	68.288,10
5) Pupuk, Kimia, dan Barang dan Karet	20.214,52	22.804,03	23.236,01	24.308,01	20.299,09
6) Semen dan Barang Galian bukan Logam	1.351.124,48	1.648.896,01	1.825.782,46	2.224.711,73	2.573.871,67
7) Logam Dasar Besi dan Baja	48.112,43	51.308,15	57.439,41	61.041,80	64.145,32
8) Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya	86.679,01	111.908,88	119.678,50	127.507,48	133.453,32
9) Barang Lainnya	9.109,64	9.836,34	9.721,29	10.166,90	10.972,20
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	232.485,76	265.836,51	273.682,98	413.996,75	428.197,53
- Listrik					
- Gas Kota	33.093,65	41.400,93	51.464,87	65.558,88	68.606,80
- Air Bersih	1.235.904,46	1.901.965,92	1.698.053,11	2.114.096,79	2.251.111,79
5. BANGUNAN	4.206.616,80	5.032.843,20	5.703.590,49	6.423.928,12	7.260.339,35
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	3.838.231,46	4.573.102,50	5.175.329,63	5.169.075,84	6.538.443,20
- Perdagangan Besar & Eceran	70.116,53	78.127,67	82.589,88	82.985,08	102.121,14
- Hotel	295.795,41	383.613,03	461.610,37	541.695,20	618.774,97
- Restorasi	1.034.276,39	2.186.490,91	2.407.878,54	2.457.208,00	2.397.451,68
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.400.264,46	1.740.651,90	1.925.327,34	2.211.000,02	2.052.282,57
a. Pengangkutan					
1) Angkutan Rel	723.548,59	854.342,72	645.814,25	1.143.139,07	1.206.131,97
2) Angkutan Jalan Raya	364.562,43	428.453,30	481.129,09	523.680,91	599.257,76
3) Angkutan Laut	272.045,34	338.807,41	363.858,60	415.003,82	468.093,61
4) Angkutan Udara	100.208,05	116.016,53	126.529,31	129.372,32	152.809,60
5) Jasa Penunjang Angkutan	373.911,93	443.808,95	450.961,79	504.262,91	605.169,00
b. Komunikasi	1.213.347,90	1.423.439,28	1.457.037,72	2.109.272,22	2.907.727,70
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	186.494,00	274.224,00	253.420,02	25.781,22	176.489,71
a. Bank	101.367,24	116.872,90	1.023.019,38	1.175.297,29	1.390.679,95
b. Lembaga Keuangan lain-lain Bank	835.177,01	936.721,20	106.497,47	11.317,70	135.990,04
c. Sewa Bangunan	60.219,65	95.821,58	106.497,47	4.126.572,95	5.481.299,57
d. Jasa Perusahaan	2.620.598,81	4.204.301,18	4.990.773,08	4.514.963,98	5.985.650,00
9. JASA - JASA	3.208.147,57	3.937.885,14	4.390.773,08	4.323.608,94	375.591,54
a. Persewaan Umum	232.409,74	290.316,05	217.015,73	70.124,26	188.079,95
b. Swasata	118.772,36	126.210,49	149.618,31	28.640,36	32.981,39
1) Sosial Komunitas	19.808,25	22.732,42	25.295,65	34.835,34	153.530,20
2) Hiburan dan Rekreasi	93.830,63	107.267,14	121.901,37		
3) Perorangan dan Rumah tangga					
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	30.763.332,71	34.770.982,81	38.522.673,02	42.155.870,13	42.909.525,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan
*) Angka Sementara

Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan 2004

Tabel Lampiran

TABEL 1.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SULAWESI SELATAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2000-2004 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 *) (6)
1. PERTANJIAN	11.051.161,02	11.785.184,16	12.328.037,73	12.437.541,11	12.313.064,59
a. Tanaman Bahan Makanan	5.602.805,50	5.615.835,61	5.792.712,84	5.940.852,75	5.800.054,24
b. Tanaman Perkebunan	3.090.481,37	3.183.438,33	3.328.699,66	3.358.895,86	3.510.182,51
c. Perikanan	276.415,99	435.657,39	454.452,05	481.473,78	510.834,33
d. Kehutanan	73.050,49	75.792,55	76.712,28	77.687,09	79.517,98
e. Perikanan	2.452.318,67	2.495.020,38	2.677.460,90	2.575.831,62	2.612.465,93
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	2.837.102,73	3.002.793,57	2.880.813,57	3.205.949,52	3.498.308,93
- Minyak dan Gas Bumi	125.710,08	135.565,90	143.061,01	140.159,56	150.756,55
- Pertambangan Tanpa Migas	2.524.330,00	2.669.311,62	2.538.155,50	2.844.884,43	3.124.848,75
- Penggalian	187.069,12	197.895,05	205.577,06	214.905,51	222.699,73
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2.820.794,38	4.219.282,84	4.344.077,01	4.608.360,62	4.680.594,62
a. INDUSTRI LOGAS					
- Pengilangan Minyak					
- Gas Alam Cair					
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	2.820.794,38	4.219.282,84	4.344.077,01	4.608.360,62	4.680.594,62
1) Makanan, Minuman, dan Tembakau	1.828.904,52	1.891.505,88	1.884.701,88	1.911.985,02	2.006.802,90
2) Tekstil, Hanyut dan Kulit, dan Alas Kaki	60.669,93	61.350,80	56.208,54	54.571,02	56.012,51
3) Barang dan Kayu dan Hasil Hasil Lainnya	493.851,75	502.956,57	522.801,75	539.872,00	576.651,14
4) Kertas dan Barang Cetak	92.069,07	66.884,56	74.004,75	77.981,10	77.523,40
5) Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet	20.214,52	21.787,37	21.556,72	22.249,87	27.030,12
6) Semen dan Barang Galvan bukan Logam	1.251.124,40	1.515.803,95	1.619.313,20	1.901.486,25	2.040.928,30
7) Logam Dasar Besi dan Baja	48.112,40	46.336,43	47.796,99	45.569,25	45.221,57
8) Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya	86.679,07	103.618,57	110.044,77	126.048,43	141.533,10
9) Barang Lainnya	9.109,64	9.187,87	11.550,41	8.637,70	8.793,17
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	265.582,12	297.694,63	318.285,79	333.414,57	339.143,41
- Listrik	232.485,76	260.253,49	276.757,04	292.852,27	287.751,51
- Gas Kota	33.096,36	37.391,14	30.529,73	40.562,04	47.391,90
- Air Bersih	1.235.004,46	1.347.402,92	1.432.600,24	1.516.456,42	1.564.331,10
5. HANYUTAN	4.200.810,80	4.556.761,41	4.770.826,14	5.094.173,42	5.420.041,49
6. PERINGKARAN, HOTEL & RESTORAN	3.838.231,46	4.154.781,20	4.390.854,55	4.628.527,84	4.915.123,67
- Perdagangan Besar & Eceran	70.116,93	68.657,51	71.625,08	75.993,16	78.656,87
- Hotel	298.208,41	332.322,70	353.040,51	389.652,60	426.052,02
- Restoran	1.834.276,30	2.020.431,81	2.130.275,21	2.365.974,53	2.634.374,22
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.400.204,46	1.024.403,57	1.714.844,82	1.918.357,60	2.141.175,23
a. Pengangkutan					
1) Angkutan Rel	723.548,59	807.149,16	850.256,50	913.218,51	924.388,38
2) Angkutan Jalan Raya	394.562,40	393.395,27	416.424,42	441.704,67	464.405,11
3) Angkutan Laut	272.045,34	312.757,58	331.076,55	431.204,22	505.353,22
4) Angkutan Udara	100.205,00	111.125,95	117.080,09	132.147,22	140.027,29
5) Jasa Penunjang Angkutan	373.911,53	390.027,04	423.430,70	447.416,77	493.199,77
b. Komunikasi	1.213.347,90	1.298.562,57	1.600.487,35	1.705.137,21	2.156.259,32
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	198.484,00	245.343,71	292.107,18	326.247,74	398.124,65
a. Bank	101.367,24	109.537,49	110.057,07	130.302,22	139.261,87
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	855.177,01	852.950,59	801.542,83	943.133,21	1.000.769,45
c. Sewa Bangunan	80.319,65	90.711,78	96.779,00	105.447,31	113.479,57
d. Jasa Perusahaan	3.530.556,81	3.806.731,52	4.027.433,10	4.081.048,50	4.207.855,37
9. JASA - JASA	3.286.147,57	3.563.174,42	3.772.835,40	3.810.710,40	3.923.116,12
a. Pemerintahan Umum	232.400,24	243.557,10	254.597,38	270.331,54	284.739,23
b. Swasta	110.772,36	122.821,06	126.082,70	134.908,47	139.555,27
1) Sosial Kemasyarakatan	19.806,25	20.817,48	21.874,54	23.204,82	23.970,17
2) Hiburan dan Rekreasi	93.820,65	100.118,56	100.641,04	112.126,87	120.813,62
3) Perumahan dan Rumah tangga	30.763.317,71	32.334.905,43	33.650.125,25	35.426.050,00	37.290.948,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO					

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan

*) Angka Sementara

Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan 2004

Tabel Lampiran

TABEL 2.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SULAWESI SELATAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2000-2004 (%)

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004 ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	37,91	36,73	37,57	35,97	33,54
a. Tanaman Bahan Makanan	18,41	17,34	17,51	17,17	15,15
b. Tanaman Perkebunan	10,07	10,24	10,73	9,87	9,78
c. Peremajaan	1,22	1,31	1,34	1,40	1,41
d. Kehutanan	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21
e. Perikanan	7,97	7,61	7,77	7,31	6,58
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	9,22	7,76	6,22	7,04	8,21
- Minyak dan Gas Bumi	0,41	0,39	0,30	0,30	0,32
- Pertambangan Tanpa Migas	8,21	6,75	5,23	6,03	7,20
- Penggalan	0,61	0,52	0,61	0,66	0,61
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	12,97	13,30	13,31	13,41	13,42
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	12,97	13,30	13,21	13,41	13,42
1) Makanan, Minuman, dan Tembakau	5,95	6,02	5,83	5,53	5,55
2) Tekstil, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	0,20	0,19	0,16	0,15	0,14
3) Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	1,61	1,58	1,57	1,49	1,57
4) Kertas dan Barang Cetakan	0,30	0,21	0,22	0,22	0,20
5) Pulpur, Kimia, dan Barang dari Karet	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05
6) Semen dan Barang Galian bukan Logam	4,39	4,75	4,90	5,45	5,51
7) Logam Dasar Besi dan Baja	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13
8) Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya	0,28	0,32	0,31	0,34	0,35
9) Barang Lainnya	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,86	0,94	1,10	1,10	1,02
- Listrik	0,76	0,82	0,98	0,97	0,85
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14
5. BANGUNAN	4,01	4,32	4,38	4,42	4,04
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	13,67	14,47	14,80	14,94	14,97
- Perdagangan Besar & Eceran	12,48	13,15	13,43	13,46	13,49
- Hotel	0,23	0,22	0,27	0,22	0,21
- Restoran	0,97	1,10	1,10	1,26	1,28
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,05	6,29	6,31	6,67	6,62
a. Angkutan	4,75	5,01	5,02	5,20	5,49
1) Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2) Angkutan Jalan Raya	2,35	2,46	2,46	2,48	2,43
3) Angkutan Laut	1,19	1,23	1,25	1,25	1,23
4) Angkutan Udara	0,68	0,97	0,96	1,18	1,25
5) Jasa Penunjang Angkutan	0,33	0,34	0,35	0,37	0,40
6) Jasa Penunjang Angkutan	1,22	1,20	1,20	1,30	1,43
b. Komunikasi	3,94	4,09	4,30	4,92	5,59
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	0,64	0,79	0,92	1,53	2,04
a. Bank	0,35	0,34	0,35	0,37	0,37
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,29	0,45	0,57	2,74	2,72
c. Sewa Bangunan	2,71	2,69	0,28	0,28	0,28
d. Jasa Perusahaan	0,28	0,28	12,11	11,52	11,25
9. JASA - JASA	11,44	12,09	11,34	10,75	10,46
a. Pemerintahan Umum	10,69	11,33	11,34	0,76	0,77
b. Swasta	0,76	0,77	0,77	0,76	0,39
1) Sosial Masyarakat	0,39	0,39	0,39	0,07	0,07
2) Hiburan dan Rekreasi	0,06	0,07	0,07	0,31	0,32
3) Perumahan dan Rumah tangga	0,31	0,31	0,32	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan

¹⁾ Angka Sementara

Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan 2004

Tabel Lampiran

TABEL 2.2. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SULAWESI SELATAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2000-2004 (%)

LAPANGAN USAHA (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 (4)	2003 (5)	2004 *) (6)
1. PERTANIAN					
a. Tanaman Bahan Makanan	37,5*	36,43	35,53	35,05	33,04
b. Tanaman Perkebunan	18,41	17,37	17,21	16,71	15,03
c. Peternakan	10,2*	9,76	9,83	9,48	9,42
d. Kehutanan	1,22	1,25	1,25	1,28	1,37
e. Perikanan	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21
2. PERTAMBANGAN dan PENGALIAN	7,57	7,72	7,55	7,37	7,01
- Minyak dan Gas Bumi	6,22	6,25	6,55	6,65	6,39
- Pertambangan Tanpa Migas	0,41	0,40	0,40	0,41	0,40
- Pengalihan	8,7*	8,28	7,54	6,03	6,25
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0,6*	0,61	0,61	0,61	0,70
a. INDUSTRI MIGAS	12,5*	12,75	12,5*	12,23	12,35
- Pengalihan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	12,5*	12,75	12,5*	12,27	12,75
1). Makanan, Minuman, dan Tembakau	5,55	5,55	5,57	5,43	5,29
2). Tekstil, Barang dan Kuli, dan Alas Kaki	0,27	0,15	0,17	0,15	0,15
3). Barang dan Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	1,5*	1,53	1,52	1,52	1,55
4). Kertas dan Barang Cetakan	0,22	0,21	0,22	0,22	0,21
5). Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet	0,5*	0,57	0,55	0,55	0,67
6). Besi dan Barang Galvan bukan Logam	4,35	4,62	4,51	5,37	5,42
7). Logam Dasar Besi dan Baja	0,15	0,14	0,14	0,13	0,11
8). Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya	0,25	0,23	0,23	0,23	0,26
9). Barang Lainnya	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22
c. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,61	0,62	0,64	0,64	0,65
- Listrik	0,76	0,81	0,82	0,83	0,77
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	0,11	0,12	0,13	0,11	0,11
4. BANGUNAN	4,2*	4,17	4,25	4,29	4,52
5. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	13,47	14,25	14,19	14,25	14,54
- Perdagangan Besar & Eceran	12,45	12,85	12,53	12,07	12,18
- Hotel	0,23	0,22	0,23	0,21	0,21
- Restoran	0,79	1,03	1,25	1,10	1,14
6. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,76	6,25	6,35	6,50	7,07
a. Pengangkutan	4,75	5,02	5,22	5,42	5,75
1). Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2). Angkutan Jalan Raya	2,21	2,50	2,53	2,56	2,61
3). Angkutan Laut	1,15	1,22	1,24	1,25	1,25
4). Angkutan Udara	0,65	0,67	0,68	0,72	0,78
5). Jasa Penunjang Angkutan	0,33	0,34	0,35	0,37	0,40
b. Komunikasi	1,22	1,22	1,22	1,20	1,22
7. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	3,44	4,52	4,16	4,81	5,90
a. Bank	0,64	0,76	0,67	1,45	2,51
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,23	0,34	0,25	0,37	0,37
c. Sewa Bangunan	2,71	2,64	2,41	2,65	2,71
d. Jasa Perumahan	0,25	0,28	0,28	0,30	0,30
8. JASA - JASA	11,44	11,71	11,57	11,52	11,29
a. Pemerintahan Umum	10,65	11,02	11,21	10,76	10,53
b. Swasta	0,76	0,75	0,70	0,76	0,76
1). Sosial Kemasyarakatan	0,25	0,25	0,37	0,38	0,30
2). Hiburan dan Rekreasi	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06
3). Perorangan dan Rumah tangga	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan

*) Angka Semesta